

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL
DAN SMK YPKK 2 SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:
Bonyfasius Anggada Putra
NIM. 14803241075

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL
DAN SMK YPKK 2 SLEMAN**

SKRIPSI

Oleh:

**BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
14803241075**

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,
Dosen Pembimbing



Amanita Novi Yushita, M.Si.
NIP. 19770810 200604 2 002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:




**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL
DAN SMK YPKK 2 SLEMAN**

Oleh:

BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
14803241075

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 Agustus 2018
dan dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Sukanti, M.Pd.	Ketua Penguji		10/9 2018
Amanita Novi Yushita, M.Si.	Sekretaris Penguji		10/9 2018
Diana Rahmawati, M.Si.	Penguji Utama		7/9 2018

Yogyakarta, 12 September 2018

Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bonyfasius Anggada Putra
NIM : 14803241075
Program Studi : Pendidikan Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Tugas Akhir : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL DAN SMK YPKK 2
SLEMAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Penulis



Bonyfasius Anggada Putra

NIM. 14803241075

MOTTO

Education enables people and societies to be what they can be.

(Bill Richardson)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan segenap jiwa dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku, Ibu Siti Lestari dan Bapak Sudarsono, yang dengan kesabaran tidak terbatas, telah merawatku, membesarkanku, mendukung setiap langkahku, membimbingku, dan memotivasiku. Terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang telah diberikan serta doa-doa yang selalu dihaturkan demi kesuksesanku.
2. Ketiga kakakku, Florentina Maria Rianita, Ani Dwiantari, dan Florensus Kurnadi Setiawan, yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikanku.

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SMK NEGERI 1 TEMPEL
DAN SMK YPKK 2 SLEMAN**

**Oleh:
BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
14803241075**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang ditunjukkan dengan (1) kemandirian, (2) Kemitraan, (3) Partisipasi, (4) Keterbukaan, (5) Akuntabilitas.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan populasi guru dan tenaga kependidikan yang memenuhi kriteria pengalaman bekerja minimal tiga tahun, terdiri dari 54 responden di SMKN 1 Tempel dan 31 responden di SMK YPKK 2 Sleman. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara sebagai data pendukung. Uji validitas instrumen menggunakan penilaian ahli. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kemandirian di SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik masing-masing 55,56% dan 58,06%. Perbedaannya SMKN 1 Tempel mayoritas sumber pendanaan dari pemerintah sedangkan SMK YPKK 2 Sleman mayoritas dari walimurid. Selain itu, tenaga pendidik di SMKN 1 Tempel, dilihat dari tingkat pendidikan dan sertifikat profesi, memiliki kualitas yang lebih baik. (2) Kemitraan di SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, masing-masing sebesar 75,93% dan 61,29%. Sekolah mampu menjalin kerjasama dengan warga sekolah, pemerintah, DUDI, komite, yayasan, dan masyarakat. (3) Partisipasi di SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik masing-masing 70,37% dan 70,97%. Perbedaannya adalah SMKN 1 Tempel memiliki kesempatan yang lebih banyak memperoleh pelatihan dari pemerintah dan kesadaran wali murid dalam kewajiban pembayaran biaya pendidikan lebih baik dibandingkan SMK YPKK 2 Sleman (4) Keterbukaan SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik masing masing sebesar 53,7% dan 61,29%. Keterbukaan disampaikan melalui rapat, papan informasi, dan *website*. Perbedaannya, *website* SMKN 1 Tempel lebih *update* dibandingkan dengan website SMK YPKK 2 Sleman. (5) Akuntabilitas SMKN 1 Tempel 62,93% kategori sangat baik dan SMK YPKK 2 Sleman 48,39% kategori baik. Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban melalui rapat dengan warga sekolah, komite, wali murid, dan pemerintah. Perbedaannya, SMK YPKK 2 Sleman juga menyampaikan pertanggungjawaban kepada yayasan.

Kata kunci : Kemandirian, Kemitraan, Partisipasi, Keterbukaan, Akuntabilitas

**THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL-BASED MANAGEMENT
IN SMK NEGERI 1 TEMPEL AND SMK YPKK 2 SLEMAN**

By:
BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
14803241075

ABSTRACT

This research aims to describe the implementation of school-based management in SMKN 1 Tempel and YPKK 2 Sleman, indicated by (1) Independence, (2) Partnership, (3) Participation, (4) Transparency, and (5) Accountability.

This research is quantitative descriptive. The population of this research were teachers and education personnel who had the minimum work experience criteria of three years, consisting of 54 respondents in SMKN 1 Tempel and 31 respondents in SMK YPKK 2 Sleman. Data collection techniques used in this study were questionnaires and interviews as supporting data. The test of instrument validity used expert judgment. Data analysis technique used was quantitative descriptive data analysis techniques with a percentage.

The results of the study showed that: (1) Independence at SMKN 1 Tempel and SMK YPKK 2 Sleman was in the very good category, 55.56% and 58.06% respectively. The difference is the majority of funding sources of SMKN 1 Tempel is from the government, than SMK YPKK 2 Sleman is from students. In addition, teachers at SMKN 1 Tempel, viewed from the level of education and professional certificates, have better quality. (2) Partnership at the SMKN 1 Tempel and SMK YPKK 2 Sleman is in the very good category, 75.93% and 61.29% respectively. The school is able to collaborate with school residents, government, DUDI, committees, foundations, and the community (3) Participation in SMKN 1 Tempel and SMK YPKK 2 Sleman in good category, 70.37% and 70.97% respectively. The differences are SMKN 1 Tempel has more benefit of training from government and awareness from student guardians of SMKN 1 Tempel towards cost education is better than SMK YPKK 2 Sleman. (4) Transparency of SMKN 1 Tempel and SMK YPKK 2 Sleman in the good category of 53,7% and 61,29% respectively. Transparency is delivered through meetings, information board, and websites. The difference is, the website of SMKN 1 Tempel is more updated than the website of SMK YPKK 2 Sleman. (5) Accountability of SMKN 1 Tempel 62.93% in very good category and SMK YPKK 2 Sleman in 48.39% in the good category. The school expresses accountability through hospitality with school residents, committees, student guardians, and the government. The difference, SMK YPKK 2 Sleman also expressed its accountability to the foundation.

Keywords : Independence, Partnership, Participation, Transparency, Accountability

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman” dengan lancar. Penulis menyadari tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tugas akhir skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan FE UNY yang telah memberikan ijin penelitian dalam penyusunan skripsi.
3. Rr. Indah Mustikawati, M.Si., Ak., C.A., Ketua jurusan Pendidikan Akuntansi FE UNY.
4. Abdullah Taman, S.E., M.Si., dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama studi.
5. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi.
6. Diana Rahmawati, S.E., M.Si., dosen narasumber yang telah membantu memberikan masukan yang bermanfaat.
7. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
8. Dra. Nuning Sulastris M.M., Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel yang telah memberikan ijin penelitian di SMK Negeri 1 Tempel.
9. Drs. Ircham Rosyidi, Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman yang telah memberikan ijin penelitian di SMK YPKK 2 Sleman.
10. Dra. Ratna Wiwara Nugrahaningsih, koordinator penelitian di SMK Negeri 1 Tempel yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti.

11. Dra. Sumarsih, koordinator penelitian di SMK YPKK 2 Sleman, yang telah memberikan bantuan dan arahan kepada peneliti.
12. Teman-teman seperjuangan (Shaka, Miftah, Entin, Hasuna, Praela, Kiki, Annisa, Ningrum) atas bantuan dan dukungan selama penulisan skripsi.
13. Teman-teman Pendidikan Akuntansi B 2014, yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
14. Guru dan tenaga kependidikan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang telah membantu peneliti dengan menjadi responden penelitian.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungan selama penyusunan tugas akhir ini.

Semoga semua kebaikan mereka dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Penulis



Bonyfasius Anggada Putra
NIM. 14803241075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah	14
2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah	18
3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah	20
4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah	22
a. Kemandirian	23

b. Kemitraan	28
c. Partisipasi	31
d. Keterbukaan	35
e. Akuntabilitas	39
B. Penelitian yang Relevan	43
C. Kerangka Berpikir	47
D. Pertanyaan Penelitian	51
E. Prosedur Penelitian.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Desain Penelitian.....	54
B. Subjek Penelitian.....	54
C. Tempat dan Waktu Penelitian	55
D. Definisi Operasional Variabel.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Instrumen Penelitian.....	59
G. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Hasil Penelitian	66
B. Pembahasan Hasil Penelitian	151
C. Keterbatasan Penelitian.....	201
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	202
A. Kesimpulan	202
B. Implikasi.....	206
C. Saran.....	206
DAFTAR PUSTAKA	208

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pola Manajemen Pendidikan Nasional.....	15
2. Kisi-kisi Instrumen Angket.....	60
3. Kisi-Kisi Instrumen Wawancara.....	61
4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen.....	63
5. Pedoman Pengkategorisasian.....	64
6. Kecenderungan Variabel Kemandirian SMK Negeri 1 Tempel.....	67
7. Kecenderungan Variabel Kemandirian SMK YPKK 2 Sleman.....	68
8. Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel.....	70
9. Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel.....	70
10. Kecenderungan Indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel.....	75
11. Kecenderungan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman.....	75
12. Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel.....	78
13. Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman.....	78
14. Kecenderungan Indikator variabel Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel.....	81
15. Kecenderungan Indikator variabel Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman.....	81
16. Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel.....	84
17. Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman.....	84
18. Kecenderungan Variabel Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel.....	87
19. Kecenderungan Variabel Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman.....	87
20. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel.....	89
21. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman.....	90
22. Kecenderungan Indikator Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel.....	93
23. Kecenderungan Indikator Kemitraan Eksternal di SMK YPKK 2 Sleman.....	93
24. Kecenderungan Variabel Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel.....	96
25. Kecenderungan Variabel Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman.....	97
26. Kecenderungan Indikator Kontribusi <i>Stakeholders</i> di SMK Negeri 1 Tempel.....	99
27. Kecenderungan Indikator Kontribusi <i>Stakeholders</i> di SMK YPKK 2 Sleman.....	99

28. Kecenderungan Indikator Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel.....	103
29. Kecenderungan Indikator Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman.....	103
30. Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab <i>Stakeholders</i> di SMK Negeri 1 Tempel.....	106
31. Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab <i>Stakeholders</i> di SMK YPKK 2 Sleman.....	106
32. Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan <i>Stakeholders</i> di SMK Negeri 1 Tempel.....	109
33. Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan <i>Stakeholders</i> di SMK YPKK 2 Sleman.....	110
34. Kecenderungan Indikator Kepedulian <i>Stakeholders</i> di SMK Negeri 1 Tempel.....	113
35. Kecenderungan Indikator Kepedulian <i>Stakeholders</i> di SMK YPKK 2 Sleman.....	113
36. Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi <i>Stakeholders</i> di SMK Negeri 1 Tempel.....	116
37. Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi <i>Stakeholders</i> di SMK YPKK 2 Sleman.....	116
38. Kecenderungan Variabel Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel.....	120
39. Kecenderungan Variabel Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman.....	120
40. Kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel.....	122
41. Kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman.....	122
42. Kecenderungan Indikator Peningkatan Partisipasi Publik di SMK Negeri 1 Tempel.....	126
43. Kecenderungan Indikator Peningkatan Partisipasi Publik di SMK YPKK 2 Sleman.....	126
44. Kecenderungan Indikator Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel.....	130
45. Kecenderungan Indikator Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman.....	130
46. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan.....	134
47. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK YPKK 2 Sleman.....	134
48. Kecenderungan Variabel Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel.....	137
49. Kecenderungan Variabel Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman.....	137
50. Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel.....	140

51.	Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman.....	140
52.	Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel.....	143
53.	Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman.....	143
54.	Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel.....	146
55.	Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman.....	146
56.	Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma.....	149
57.	Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma.....	149
58.	Ringkasan Perbedaan Implementasi Kemandirian.....	152
59.	Ringkasan Perbedaan Implementasi Kemitraan.....	167
60.	Ringkasan Perbedaan Implementasi Partisipasi.....	173
61.	Ringkasan Perbedaan Implementasi Keterbukaan.....	185
62.	Ringkasan Perbedaan Implementasi Akuntabilitas.....	194

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Kecenderungan Variabel Kemandirian	68
2. Diagram Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	69
3. Diagram Kecenderungan Indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya	73
4. Diagram Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen.....	77
5. Diagram Kecenderungan Indikator Kemampuan Kepemimpinan	80
6. Diagram Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi	83
7. Diagram Kecenderungan Variabel Kemitraan	86
8. Diagram Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal.....	88
9. Diagram Kecenderungan Indikator Kemitraan Eksternal	92
10. Diagram Kecenderungan Variabel Partisipasi	95
11. Diagram Kecenderungan Indikator Kontribusi Stakeholders	98
12. Diagram Kecenderungan Indikator Kepercayaan Publik terkait Kewibawaan dan Kebersihan.....	101
13. Diagram Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab <i>Stakeholders</i>	105
14. Diagram Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan <i>Stakeholders</i>	108
15. Diagram Kecenderungan Indikator Kepedulian <i>Stakeholders</i>	112
16. Diagram Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi <i>Stakeholders</i>	115
17. Diagram Kecenderungan Variabel Keterbukaan	118
18. Diagram Kecenderungan Indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik.....	121
19. Diagram Kecenderungan Indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.....	125
20. Diagram Kecenderungan Indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.....	129
21. Diagram Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	133
22. Diagram Kecenderungan Variabel Akuntabilitas	136
23. Diagram Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik	138
24. Diagram Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai	141
25. Diagram Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN	144
26. Diagram Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma.....	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Instrumen Penelitian.....	212
2. Lembar Validasi Kuesioner.....	224
3. Hasil Uji Coba Instrumen.....	261
4. Hasil Analisis Deskriptif	266
5. Reduksi Hasil Wawancara.....	309
6. Surat-surat Penelitian	324

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang harus dimiliki oleh manusia. Dengan memiliki pendidikan yang baik, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial dan meningkatkan kualitas diri. Indonesia sebagai negara yang besar tentu membutuhkan banyak masyarakat terdidik guna melaksanakan pembangunan nasional. Pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Atas dasar itulah pemerintah perlu memberikan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia melalui lembaga pendidikan, yaitu sekolah.

Indonesia telah mengalami perkembangan pendidikan dari masa ke masa, namun mutu pendidikan di Indonesia masih belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil survei *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2015 yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Corporation and Development (OECD)*, yang dimuat dilaman Universitas Surabaya, menunjukkan bahwa performa siswa-siswi Indonesia masih tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata pencapaian skor siswa-siswi Indonesia untuk bidang sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal dari Vietnam dan juga Thailand, serta tertinggal jauh dari Singapura yang menjuarai semua indikator penilaian. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat terkait dengan kemampuan daya saing lulusan sekolah-sekolah di Indonesia.

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk menerapkan solusi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah mengubah pendekatan sentralistik menjadi pendekatan desentralistik. Pendekatan sentralistik cenderung mematikan asas demokrasi. Lebih jauh lagi sentralisasi pendidikan melemahkan partisipasi masyarakat. Pendidikan yang sentralistik menjadikan kinerja pendidikan cenderung memperlakukan peserta didik dan guru sebagai robot, *inhuman*, dan

impersonal. (Siti Irene, 2015:19). Tindakan pemerintah melakukan reorientasi pendidikan merupakan langkah strategis bagi perbaikan mutu pendidikan dasar yang secara formal dan legal memiliki kekuatan hukum. Pendidikan yang desentralistik artinya pendidikan berpusat pada institusi sekolah. Hal tersebut memungkinkan sekolah untuk lebih luwes/fleksibel dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Pendekatan desentralistik dapat meningkatkan demokrasi yang ada disekolah, sehingga sekolah dapat menjalankan kegiatan sekolah dengan meminta pendapat serta masukan pada pihak yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia perlu menerapkan manajemen pendidikan yang baik guna melaksanakan desentralisasi pendidikan. Manajemen pendidikan diperlukan guna mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu bukan hal yang mudah. Sekolah perlu memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemerintah Indonesia dalam rangka melaksanakan era desentralisasi pendidikan telah menerapkan sistem pengelolaan pendidikan yang berbasis pada sekolah, atau yang biasa disebut dengan manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat (1) di nyatakan bahwa, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.” Atas dasar itulah, maka sekolah perlu melaksanakan

manajemen berbasis sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pengelolaan satuan pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Menurut Mulyasa dalam Andang (2002) manajemen berbasis sekolah adalah suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan, agar dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat dan pemerintah. Dengan pemberian otonomi yang besar tersebut, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sesuai dengan kemampuan sekolah serta melibatkan seluruh warga sekolah. Manajemen berbasis sekolah dapat meningkatkan kemandirian sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah dengan standar mutu pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah belum dapat dilaksanakan dengan baik, dan masih menemui kegagalan. Kegagalan terhadap pelaksanaan

MBS disamping karena kurang tepatnya strategi yang dipakai, seringkali juga disebabkan oleh adanya kekurangpahaman esensi pelaksanaan MBS atau kebingungan peran dan tanggung jawab yang dianggap baru terutama oleh kepala sekolah dan guru-guru (Andang, 2014:133). Wohlstee dan Mohrman dalam Andang (2014) menyatakan terdapat empat macam kegagalan pelaksanaan MBS, (1) penerapan MBS hanya sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa upaya kreatif, (2) kepala sekolah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh anggota dewan sekolah; (3) kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak dan cenderung semena-mena; (4) menganggap bahwa MBS adalah hal biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya. Penelitian yang dilakukan Balitbang Diknas RI, dikutip dalam Nurkholis (2006:124) menunjukkan bahwa berdasarkan penilaian guru, tingkat partisipasi orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah rendah yaitu rata-rata hanya 57,1 %. Partisipasi orang tua siswa yang sangat rendah ialah dalam hal menentukan kebijakan program sekolah dan mengawasinya, pertemuan rutin, kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan iklim sekolah. Selanjutnya, berdasarkan berdasarkan artikel berita yang dimuat di laman republika.co.id, lembaga Ombudsman D.I. Yogyakarta menerima sejumlah pengaduan kasus sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Selama 2015-2016, lembaga ini menerima 582 kasus dengan rincian 300 kasus pada 2015 dan 282 kasus pada 2016. Dari banyaknya kasus pengaduan itu, di sektor aparatur pemerintah bidang pendidikan

masih menduduki pengaduan terbanyak, yakni 33 kasus di tahun 2015 dan 37 kasus di tahun 2016. Secara garis besar ruang lingkup materi kasus yang diadakan dibidang pendidikan antara lain penahanan ijazah oleh sekolah, pungutan disekolah yang megatasnamakan sumbangan, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan.

SMK Negeri 1 Tempel merupakan lembaga pendidikan formal yang terletak di Jln. Magelang Km 17, Tempel, Sleman. Sekolah ini memiliki lima kompetensi keahlian yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Bisnis Daring dan Pemasaran, Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Teknik Tata Kelola Logistik. SMK YPKK 2 Sleman merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di Jln. Pemuda Wadas, Tridadi, Sleman. Sekolah ini memiliki dua kompetensi keahlian yaitu Akuntansi dan Keuangan Lembaga, dan Pemasaran. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum SMK Negeri 1 Tempel dan Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman, dapat diketahui bahwa kedua sekolah telah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman merupakan salah satu SMK negeri dan swasta di Kabupaten Sleman. Sekolah negeri dan sekolah swasta memiliki perbedaan. Ada beberapa pembeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta, antara lain prestasi sekolah, sarana prasarana, biaya pendidikan, dan kualitas *input* dan *output* siswa. Pada umumnya, masyarakat memiliki persepsi-

persepsi yang menjadi pembeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri dianggap memiliki kualitas lulusan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Hal inilah yang menyebabkan calon siswa baru berbondong-bondong mendaftar ke sekolah negeri. Akibatnya persebaran nilai siswa baru antar sekolah negeri dan sekolah swasta menjadi tidak merata. Siswa yang memiliki nilai yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima, dan siswa yang nilainya tidak mencukupi untuk masuk ke sekolah negeri, akan mendaftar ke sekolah swasta. Hal inilah yang menyebabkan kualitas input yang berbeda antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Namun untuk menentukan kualitas sekolah tidak hanya bergantung pada inputnya saja. Sekolah dapat menghasilkan output yang baik jika sekolah memiliki kemampuan manajemen pendidikan yang baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui beberapa pelaksanaan prinsip manajemen berbasis sekolah masih belum maksimal dan terdapat beberapa kendala. Sarana dan prasarana ruang kelas SMK Negeri 1 Tempel sudah mencukupi, namun beberapa fasilitas pembelajaran di beberapa kelas masih belum memadai. Partisipasi wali murid berupa dukungan dana, terkadang belum sepenuhnya terpenuhi, karena ada beberapa yang belum menuntaskan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi walimurid siswa yang berasal dari kalangan menengah

kebawah. Selain itu, ada beberapa siswa yang melakukan praktik industri namun tidak sesuai dengan bidang jurusannya. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, juga terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Beberapa sarana dan prasarana belum dapat dirawat dengan baik, karena belum adanya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya. Sekolah telah menjalin hubungan dengan dunia usaha dan dunia industri, namun masih terdapat kendala. Linearitas jurusan siswa dengan pekerjaan saat melakukan praktik industri terkadang masih belum cocok. Partisipasi wali murid berupa dukungan dana masih tergolong rendah, karena sebagian wali murid belum mampu menyelesaikan kewajiban administrasinya, hal ini disebabkan oleh penghasilan wali murid yang rendah. Selain itu, juga terdapat kendala dalam akuntabilitas sekolah, yaitu saat dilakukannya rapat komite, terkadang komite kurang memahami, pertanggungjawaban yang diberikan oleh sekolah.

Penerapan manajemen berbasis sekolah perlu dilakukan, agar sekolah dapat mengelola seluruh kegiatan pendidikan dengan baik. Sekolah akan menjadi lebih mandiri, karena dalam MBS segala program dan pengambilan keputusan bersifat desentralistik bukan sentralistik, namun masih tetap dalam pengawasan pemerintah. Sekolah juga dapat menjalin kerjasama/kemitraan dengan berbagai pihak guna menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk peserta didik. Peran pemangku kepentingan juga akan lebih besar, karena partisipasi dari

pemangku kepentingan (*stakeholders*) akan membantu kelancaran kegiatan sekolah. Sekolah akan lebih terbuka dalam menjalankan program, karena keterbukaan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dari seluruh warga sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Semua kegiatan pendidikan yang dilakukan sekolah tentu memerlukan pertanggungjawaban, dalam hal ini sekolah harus mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan seluruh kegiatan sekolah. Kelima prinsip manajemen berbasis sekolah tersebut dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Penelitian akan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah dirasa penting, karena dapat digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diuraikan berbagai permasalahan terkait dengan implementasi prinsip Manajemen Berbasis Sekolah, diantaranya adalah:

1. Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman masih belum berjalan maksimal, dimana masih terdapat kebutuhan sekolah yang belum terpenuhi. Sarana dan prasarana di SMK Negeri 1 Tempel berupa

fasilitas pembelajaran di beberapa ruang kelas ada yang belum terpenuhi. Sedangkan Di SMK YPKK 2 Sleman, beberapa sarana dan prasarana belum dapat dirawat dengan baik, karena belum adanya sumber daya manusia yang ahli dibidangnya.

2. Kemitraan SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dengan dunia usaha dan dunia industri masih mengalami kendala. Siswa program studi akuntansi, saat melakukan praktik kerja industri, belum sepenuhnya linear antara bidang studi dan bidang pekerjaannya.
3. Partisipasi berupa dukungan dana wali murid di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman masih belum maksimal. Belum sepenuhnya walimurid dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran biaya sekolah pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini diduga disebabkan oleh keadaan ekonomi keluarga wali murid yang berasal dari golongan menengah kebawah.
4. Keterbukaan sekolah, berdasarkan kasus yang diadukan lembaga Ombudsman DIY selama 2015-2016 masih memiliki permasalahan, dimana belum terdapat transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan sekolah di DIY.
5. Akuntabilitas sekolah, berdasarkan kasus yang diadukan lembaga Ombudsman DIY selama 2015-2016 diketahui belum terdapat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Di SMK YPKK 2 Sleman, berkaitan dengan akuntabilitas, masih memiliki kendala pada saat rapat komite, terkadang komite kurang memahami pertanggungjawaban yang diberikan oleh sekolah terkait dengan program-programnya.

C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang di sebutkan dalam identifikasi masalah tidak dapat diteliti semuanya agar penelitian ini lebih terfokus. Penelitian ini hanya dibatasi pada Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang terdiri dari prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
2. Bagaimana kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
3. Bagaimana partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
4. Bagaimana keterbukaan d SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
5. Bagaimana akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.
2. Mengetahui kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.
3. Mengetahui partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.
4. Mengetahui keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.
5. Mengetahui akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi bagi perkembangan keilmuan terkait dengan implementasi manajemen berbasis sekolah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama belajar di Universitas Negeri Yogyakarta, dan dapat menambah wawasan tentang manajemen berbasis sekolah serta penelitian pendidikan.

b. Bagi SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Sebagai referensi untuk meningkatkan implementasi manajemen berbasis sekolah, khususnya dari segi prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah yang masih belum berjalan maksimal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Fattah (2012:42), Manajemen Berbasis Sekolah sebagai terjemahan dari *School Based Management* (SBM), adalah suatu pendekatan praktis yang bertujuan untuk mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Menurut Andang dalam Mulyasa (2002) manajemen berbasis sekolah adalah suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan, agar dapat mengakomodasikan keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antar sekolah, masyarakat dan pemerintah. Jadi, berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi yang lebih besar pada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan di sekolah dengan melibatkan partisipasi aktif dari pihak internal maupun eksternal sekolah.

Manajemen berbasis sekolah merupakan kebijakan di era desentralisasi pendidikan. Era desentralisasi pendidikan muncul sebagai akibat dari lemahnya pola lama manajemen pendidikan nasional yang

cenderung sentralistik. Era desentralisasi pendidikan telah mendorong dilakukannya penyesuaian diri dari pola lama manajemen pendidikan menuju pola baru manajemen pendidikan masa depan yang lebih bernuansa otonomi dan lebih demokratis. Perubahan pola dalam manajemen pendidikan dapat dirangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pola Manajemen Pendidikan Nasional

Pola Lama	Menuju	Pola Baru
Subordinasi	→	Otonomi
Pengambilan keputusan Terpusat	→	Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku	→	Ruang gerak luwes
Pendelegasian	→	Pemberdayaan
Organisasi hierarkis	→	Organisasi datar
Informasi terribadi	→	Informasi terbagi
Pendekatan Birokratik	→	Pendekatan profesional
Sentralistik	→	Desentralistik
Diatur	→	Motivasi
Overregulasi	→	Deregulasi
Mengontrol	→	Mempengaruhi
Mengarahkan	→	Memfasilitasi
Menghindari Risiko	→	Mengelola risiko
Gunakan uang semuanya	→	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	→	<i>Teamwork</i> yang cerdas

Pada pola lama, tugas dan fungsi sekolah lebih pada melaksanakan program daripada mengambil inisiatif merumuskan dan melaksanakan program peningkatan mutu yang dibuat sendiri oleh sekolah. Sedangkan pada pola baru, sekolah memiliki wewenang lebih besar dalam pengelolaan lembaganya, pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan partisipasi masyarakat semakin besar, sekolah lebih luwes dalam mengelola

lembaganya, pendekatan profesionalisme lebih diutamakan daripada pendekatan birokrasi, pengelolaan sekolah lebih desentralistik, perubahan sekolah lebih didorong oleh motivasi diri sekolah daripada diatur pihak luar sekolah, regulasi pendidikan lebih sederhana, peranan pusat bergeser dari mengontrol menjadi mempengaruhi dan dari mengarahkan ke memfasilitasi, dari menghindari risiko menjadi mengelola risiko, penggunaan biaya lebih efisien karena sisa anggaran tahun ini dapat digunakan untuk anggaran tahun depan (*efficiency-based budgeting*), lebih mengutamakan *teamwork*, informasi terbagi ke semua warga sekolah, lebih mengutamakan pemberdayaan, dan struktur organisasi lebih datar sehingga lebih efisien. Pada dasarnya MBS dijiwai oleh pola baru manajemen pendidikan masa depan seperti yang diilustrasikan pada tabel diatas. Berikut merupakan berbagai bentuk utama desentralisasi berbagai negara yang dikutip dalam Bush (2011:13) Federalisme, contohnya adalah di Australia, Jerman, India, dan Amerika Serikat. Devolusi contohnya adalah Britania Raya. Deregulasi contohnya adalah Republik Ceko. Dekonsentrasi contohnya adalah Tanzania. Demokrasi partisipatif termasuk partisipasi yang kuat oleh *stakeholders* ditingkat lembaga contohnya adalah di Australia, Kanada, Inggris dan Wales, dan Afrika Selatan. Mekanisme Pasar contohnya adalah Britania dan Amerika Serikat

MBS muncul sebagai respon pemerintah terhadap berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa ini. Sehingga perwujudannya

merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi masyarakat. Secara khusus dari sisi manajemen sekolah, sistem ini berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partisipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan. (Aedi, 2015:168)

Landasan yuridis manajemen berbasis sekolah sesuai yang dikemukakan oleh Barlian (2013:9) adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 Ayat 1, bahwa Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000—2004, pada bab VII tentang bagian Program Pembangunan Bidang Pendidikan disebutkan bahwa tujuan program pembinaan pendidikan dasar dan persekolah adalah “terselenggaranya pendidikan dasar dan prasekolah berbasis sekolah dan masyarakat”, dengan sasaran “terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat”.

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 tahun 2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

2. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Menurut Andang (2014:130), karakteristik manajemen berbasis sekolah/manajemen berbasis madrasah adalah segala hal yang menjadi kebutuhan dalam keadaan sekolah/madrasah yang kemudian keadaan tersebut diberi kewenangan melakukan pengelolaan sekolah/madrasah sendiri secara otonomi atau berdiri sendiri dengan segala kemungkinan yang dihadapinya serta mampu menjawab tantangan yang dihadapi dengan keluasan peran dan tanggung jawab yang dilimpahkan. Sedangkan Direktorat Tenaga Kependidikan (2014:20), mengungkapkan bahwa dalam menguraikan karakteristik manajemen berbasis sekolah, digunakan pendekatan sistem input-proses-ouput. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sistem sehingga penguraian karakteristik MBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan pada input, proses, dan output. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nurkolis (2006:64) yang menyatakan bahwa, berdasarkan konsep MPMBS karakteristik MBS mencakup karakteristik *output* yang diharapkan, proses dan *input*.

a. *Output* yang diharapkan

Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *output* berprestasi akademik (*academic*

achievement) dan *output* berupa prestasi non-akademik (*non-academic achievement*)

b. Proses

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:

- 1) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi.
- 2) Kepemimpinan sekolah yang kuat.
- 3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
- 4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.
- 5) Sekolah memiliki budaya mutu.
- 6) Sekolah memiliki *teamwork* yang kompak, cerdas, dan dinamis.
- 7) Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian.
- 8) Partisipasi yang tinggi dari sekolah dan warga masyarakat.
- 9) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen.
- 10) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah.
- 11) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
- 12) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan.
- 13) Komunikasi yang baik.
- 14) Sekolah memiliki akuntabilitas.

c. *Input* Pendidikan

Input pendidikan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran yang jelas.

- 2) Sumberdaya tersedia dan siap.
- 3) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
- 4) Memiliki harapan prestasi yang tinggi.
- 5) Fokus pada pelanggan.
- 6) Input manajemen.

3. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah

Barlian (2013:8) mengungkapkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Berdasarkan kewenangan yang diperoleh sekolah atas kebijakan penerapan MBS, maka selayaknya sekolah memanfaatkan dengan sebaiknya peluang otonomi tersebut untuk meningkatkan kualitas sekolah. Lebih jauh lagi, Ikbal barlian (2013:8) menambahkan keharusan diterapkannya manajemen berbasis sekolah melalui pemberian otonomi atau kewenangan kepada sekolah atau warga sekolah untuk mengembangkan sekolah memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah sehingga sekolah dapat lebih leluasa dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam rangka memajukan sekolah.

- b. Sekolah lebih mengetahui semua yang dibutuhkan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- c. Pengambilan keputusan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik untuk dikembangkan sekolahnya.
- d. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah akan dapat menciptakan transparansi yang sehat.
- e. Di harapkan semua warga sekolah akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, terutama rasa tanggung jawab terhadap pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang direncanakan.
- f. Terjadinya persaingan yang sehat antar sekolah dilingkup kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional dalam hal mutu pendidikan. Ini dilakukan melalui upaya-upaya inovatif yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah.

Sejalan dengan Barlian, Aedi (2015:169) mengungkapkan tujuan utama penerapan MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah, pelaksana proses dan pusat,

sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Tujuan ini adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya MBS bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- b. Meningkatnya kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- c. Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, pemerintah tentang mutu sekolahnya.
- d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

4. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah

Implementasi merupakan penerapan dari suatu hal untuk mencapai tujuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, "Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas". Atas dasar itulah, dalam penelitian ini implementasi manajemen berbasis sekolah akan dinilai dari prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

a. Kemandirian

1) Pengertian kemandirian

Kemandirian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar (2013:10) mendefinisikan kemandirian sebagai kewenangan untuk mengelola sumber daya dan mengatur kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi seluruh warga sekolah, sesuai peraturan perundangan. Kemandirian sekolah hendaknya didukung oleh kemampuan sekolah dalam mengambil keputusan terbaik, berdemokrasi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, komunikasi yang efektif, memecahkan masalah, adaptif dan antisipatif terhadap inovasi pendidikan, bersinergi dan berkolaborasi, serta memenuhi kebutuhan sekolah sendiri.

Direktorat Tenaga Kependidikan (2010:15) menyatakan otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri, kemandirian dalam program dan pendanaan merupakan tolok ukur utama kemandirian sekolah. Pada gilirannya, kemandirian yang berlangsung secara terus menerus akan menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan sekolah (sustainability). Istilah otonomi juga sama artinya dengan “swa”, misalnya swasembada, swakelola, swadana, swakarya, dan

swalayan. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi yang dimiliki.

Sekolah mandiri artinya sekolah yang memiliki otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) yang signifikan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam menyelenggarakan sekolah untuk mencapai prestasi-prestasi warga sekolah. Kemandirian sekolah yang dimaksud dalam konteks Indonesia haruslah tetap dalam bingkai/koridor visi, misi, tujuan, standar, legislasi dan regulasi, dan kebijakan-kebijakan Pendidikan Nasional. (Barlian,2013:22). Lebih jauh lagi, kemandirian sekolah akan terwujud jika terdapat dua hal yaitu kemampuan dan kesanggupan sekolah. Kemampuan sekolah meliputi kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan pembekalan), manajemen, organisasi, kepemimpinan, dan administrasi. Sedangkan kesanggupan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang bersumber dari kebutuhan. Oleh karena itu, agar tercipta kesanggupan yang memadai diperlukan pemenuhan berbagai kepentingan sekolah yang bersumber

dari kebutuhan sekolah. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Namun, kemandirian sekolah harus didukung dengan kemandirian dalam menggali sumber daya keuangan dan mengelolanya secara mandiri.

2) **Komponen Kemandirian**

Menurut Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama (2005) dalam Barlian (2013) mengungkapkan terdapat 5 komponen utama kemandirian:

- a. Bebas, yakni tumbuhnya tindakan atas kehendak sendiri, dan bukan karena pihak lain;
- b. Progresif dan ulet, seperti tampak pada usaha mengejar prestasi, penuh ketekunan, merencanakan, dan mewujudkan harapan-harapannya.
- c. Berinisiatif, yakni mampu berpikir dan bertindak secara asli/orisinal/baru, kreatif dan inisiatif;
- d. Pengendalian dari dalam, yakni kemampuan mengendalikan diri dari dalam, kemampuan mempengaruhi lingkungan atas prakarsanya sendiri; dan
- e. Kemantapan diri; yang ditunjukkan oleh harga diri dan kepercayaan diri.

3) Ciri-ciri Sekolah Mandiri

Menurut Andang (2014:132), sekolah yang memiliki ciri-ciri yaitu:

- a. Tingkat kemandirian tinggi sehingga tingkat ketergantungan menjadi rendah.
- b. Bersifat adaptif dan antisipatif dengan memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, dan mengambil risiko).
- c. Bertanggung jawab terhadap input manajemen dan sumber dayanya.
- d. Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja.
- e. Komitmen yang tinggi pada dirinya.
- f. Prestasi merupakan acuan bagi penilainya.

4) Indikator Kemandirian

Berdasarkan kajian teori terkait kemandirian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian akan terwujud jika sekolah memiliki kesanggupan dan kemampuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Kemandirian akan diukur berdasarkan kesanggupan dan kemampuan. Berikut merupakan indikator-indikator tersebut:

- a. Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan. Sekolah harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa selalu tergantung dengan pemerintah pusat. Kebutuhan sekolah meliputi tenaga kependidikan, pendanaan, dan sarana dan prasarana.

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya.

Keberhasilan sekolah dalam mewujudkan kemandirian tidak lepas dari kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Sekolah harus mampu memenuhi sumber daya manusia, dan juga memberikan peran kepada sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, sekolah harus dapat mengelola sumber daya lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah harus didukung dengan pengelolaan yang baik. Sekolah harus mampu mengelola keuangan dan sarana dan prasana dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah.

c. Kemampuan Manajemen

Dalam menjalankan kegiatan pendidikan, sekolah harus memiliki kemampuan manajemen yang baik guna tercapainya tujuan pendidikan disekolah.

d. Kemampuan Kepemimpinan

Kepemimpinan kepala sekolah dalam hal ini berperan penting dalam pelaksanaan kemandirian. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus mampu membimbing dan mengarahkan warga sekolah.

e. Kemampuan Administrasi

Keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah dapat ditunjukkan dengan bukti berupa administrasi yang dibuat oleh warga sekolah.

b. Kemitraan

1) Pengertian Kemitraan

Kemitraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam prinsip kemitraan antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi sejajar, yang melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Keuntungan yang diterima sekolah antara lain meningkatnya kemampuan dan keterampilan peserta didik, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah, diperolehnya sumbangan ide untuk pengembangan sekolah, diperolehnya sumbangan dana untuk peningkatan mutu sekolah, dan tentunya tugas kepala sekolah dan guru. Sekolah bisa menjalin kemitraan, antara lain dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dunia usaha, dunia industry, lembaga pemerintah, organisasi profesi, organisasi pemuda, dan organisasi wanita.

Kemitraan yaitu jalinan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, baik individu, kelompok/organisasi, maupun Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Dalam prinsip kemitraan, antara sekolah dengan masyarakat dalam posisi sejajar, yang melaksanakan kerjasama saling menguntungkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah.. Keuntungan bagi masyarakat biasanya dirasakan secara tidak langsung, misalnya tersedianya tenaga kerja terdidik, terbinanya anggota masyarakat yang berakhlakul karimah, dan terciptanya tertib sosial.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, esensi MBS adalah peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas dan peningkatan partisipasi dalam penyelenggaraan sekolah, baik partisipasi dari warga sekolah maupun warga masyarakat disekitarnya melalui perwakilan komite sekolah. Ini berarti jika MBS dapat dilaksanakan dengan baik, maka sekolah perlu memperbanyak mitra, baik dari dalam maupun luar sekolah. Kemitraan dalam sekolah meliputi kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan seterusnya. Kemitraan sekolah dengan masyarakat sekitarnya meliputi, antara lain: kepala sekolah dengan komite sekolah, guru dengan orangtua siswa, kepala sekolah dengan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, dan seterusnya. Kemitraan penting untuk dilakukan karena disadari sepenuhnya bahwa hasil pendidikan sekolah

merupakan hasil kolektif dari unsur-unsur terkait atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kemitraan dapat menghasilkan teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis merupakan kartu truf bagi keberhasilan MBS (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2010:45).

2) Upaya Peningkatan Kemitraan

Direktorat Tenaga Kependidikan (2010: 45) mengungkapkan bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kemitraan perlu ditempuh melalui:

- a. Pembuatan pedoman mengenai tatacara kemitraan, penyediaan sarana kemitraan dan saluran komunikasi,
- b. Melakukan advokasi, publikasi, dan transparansi terhadap pemangku kepentingan, dan
- c. Melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip relevansi, yuridiksi, dan kompetensi serta kompatibilitas tujuan yang akan dicapai.

3) Indikator Kemitraan

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan di atas dan juga berdasarkan penelitian yang dilakukan Alfarisi (2012) yang menyatakan kemitraan dapat diukur melalui kemitraan internal dan kemitraan eksternal, maka dalam penelitian ini Kemitraan sekolah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kemitraan internal. Kemitraan internal meliputi kerjasama antar warga sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid). Sekolah harus mampu menjalin hubungan baik dengan pihak tersebut.
- b. Kemitraan eksternal. Kerjasama eksternal meliputi sekolah dengan masyarakat sekitar, sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri, sekolah dengan pemerintah. Sekolah harus mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak tersebut.

c. Partisipasi

1) Pengertian Partisipasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2010:67) partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* (warga sekolah dan masyarakat) terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/ pengevaluasian pendidikan sekolah.

Diharapkan, partisipasi dapat mendorong warga sekolah dan masyarakat sekitar untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengevaluasian yang

menyangkut kepentingan sekolah, baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” (*sense of belonging*) terhadap keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah (Aedi, 2015:169).

Pergeseran fokus kebijakan dari pemerintah pusat dan dari dinas pendidikan ke sekolah diharapkan proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan /pengevaluasian pendidikan lebih partisipatif dan benar-benar mengabdikan kepada kepentingan publik dan bukan pada kepentingan elit birokrasi dan politik. Dengan partisipasi aktif diharapkan mampu menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima karena dengan MBS diharapkan mampu mengalirkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke dinas pendidikan ke tangan para pengelola sekolah, yang sebenarnya sangat strategis karena pada level inilah keputusan dapat memperbaiki mutu pendidikan.

2) Tujuan Partisipasi

Tujuan utama peningkatan partisipasi adalah untuk: (1) meningkatkan dedikasi atau kontribusi *stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik dalam bentuk jasa

(pemikiran/intelektualitas, keterampilan), moral, finansial, dan material/barang; (2) memberdayakan kemampuan yang ada pada stakeholders bagi pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (3) meningkatkan peran *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, baik sebagai *advisor, supporter, controller, resource linker, and education provider*, dan (4) menjamin agar setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi *stakeholders* dan menjadikan aspirasi *stakeholders* sebagai panglima bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3) Upaya Peningkatan Partisipasi

Untuk mencapai tujuan partisipasi seperti yang tersebut di atas, upaya-upaya yang diperlukan oleh sekolah dalam meningkatkan partisipasi *stakeholders* sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan dan pedoman sekolah yang dapat menjamin hak *stakeholders* untuk menyampaikan pendapat dalam segala proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengevaluasian pendidikan di sekolah.
- b. Menyediakan sarana partisipasi atau saluran komunikasi agar *stakeholders* dapat mengutarakan pendapatnya atau dapat mengekspresikan keinginan dan aspirasinya melalui pertemuan umum, temu wicara, konsultasi, penyampaian pendapat secara

tertulis, partisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/ pengevaluasian pendidikan di sekolah.

- c. Melakukan advokasi, publikasi, komunikasi, dan transparansi kepada *stakeholders*.
- d. Melibatkan *stakeholders* secara proporsional dengan melibatkan relevansi pelibatangannya, batas-batas yuridisnya, kompetensinya, dan kompatibilitas tujuan yang akan dicapainya.

4) Indikator Keberhasilan Partisipasi

Berikut merupakan indikator keberhasilan Partisipasi yang dikutip dalam Direktorat Tenaga Kependidikan (2010:69) dengan modifikasi:

- a. Kontribusi *Stakeholders*. Kontribusi tersebut sangat berguna bagi sekolah dalam menyelenggarakan seluruh program sekolah.
- b. Kepercayaan *Stakeholders* kepada Sekolah, terutama menyangkut kewibawaan dan kebersihan. Bila *stakeholders* percaya kepada sekolah, maka *stakeholders* akan terus berpartisipasi dalam seluruh kegiatan sekolah.
- c. Tanggung Tawab *Stakeholders* terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Bila *stakeholders* berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, maka tanggungjawab *stakeholders* juga akan meningkat.

- d. Kualitas dan Kuantitas Masukan (kritik dan saran) untuk Peningkatan Mutu Pendidikan. Tingginya partisipasi berbagai pihak, akan meningkatkan kualitas dan kuantitas masukan dari berbagai pihak tersebut.
- e. Kepedulian *stakeholders*. Rasa peduli terhadap sekolah bisa muncul ketika *stakeholders* berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.
- f. Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders*. Partisipasi dari *stakeholders* menyebabkan meningkatnya jumlah pendapat bagi sekolah. Pendapat tersebut bisa dijadikan alternatif dalam pengambilan keputusan sekolah.

d. Keterbukaan

1) Pengertian Keterbukaan

Direktorat Tenaga Kependidikan (2013: 70) mendefinisikan Keterbukaan/Transparansi sekolah sebagai keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Dalam konteks pendidikan, istilah transparansi sangat jelas yaitu kepolosan, apa adanya, tidak bohong, tidak curang, jujur, dan terbuka terhadap publik tentang apa yang dikerjakan oleh sekolah. Ini berarti bahwa sekolah harus memberikan informasi yang benar kepada publik. Transparansi menjamin bahwa data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas. Jika terdapat perubahan terhadap status data

dalam laporan suatu sekolah, transparansi penuh mensyaratkan bahwa perubahan itu harus diungkapkan secara sebenarnya dan dengan segera kepada semua pihak yang terkait.

2) Tujuan Keterbukaan

Pengembangan keterbukaan/transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa. Bersih dalam arti tidak melakukan kegiatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan berwibawa dalam arti professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

3) Upaya Peningkatan Keterbukaan

Keterbukaan/Transparansi sekolah perlu ditingkatkan agar publik memahami situasi sekolah dan dengan demikian mempermudah publik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan transparansi sekolah kepada publik antara lain melalui pendayagunaan berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung melalui temu wicara, maupun secara tidak langsung melalui jalur media tertulis (brosur,

leaflet, newsletter, pengumuman melalui surat kabar) maupun media elektronik (radio dan televisi lokal).

Upaya lain yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, durasi waktu untuk mendapatkan informasi, dan prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik. Sekolah perlu mengupayakan peraturan yang menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi sekolah, fasilitas database, sarana informasi dan komunikasi, dan petunjuk penyebaran produk-produk dan informasi yang ada di sekolah maupun prosedur pengaduan.

4) Indikator Keberhasilan Keterbukaan

Berikut merupakan indikator keberhasilan Partisipasi yang dikutip dalam Direktorat Tenaga Kependidikan (2010:69) dengan modifikasi:

- a. Keyakinan dan kepercayaan publik. Sekolah yang terbuka dalam berbagai hal dapat membuat publik semakin yakin dan percaya dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini disebabkan karena publik berpendapat bahwa sekolah telah melakukan

kegiatan pendidikan sesuai dengan prosedur yang tepat guna peningkatan mutu pendidikan.

- b. Meningkatnya partisipasi publik terhadap penyelenggaraan sekolah. Sekolah yang terbuka dan selalu objektif akan menjadi daya tarik bagi publik untuk terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah.
- c. Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah. Sekolah yang terbuka selalu memberikan informasi yang terkini dan benar kepada para *stakeholders*, sehingga wawasan dan pengetahuan publik akan meningkat sesuai dengan informasi yang diberikan sekolah.
- d. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di sekolah. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sekolah biasanya terjadi jika sekolah tidak menyampaikan seluruh informasi kepada publik dan berusaha menyembunyikan informasi terkait penyelenggaraan program sekolah. Jika sekolah terbuka dan menyampaikan segala informasi kepada publik, maka pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan kemungkinan berkurang, bahkan mungkin tidak terjadi pelanggaran.

e. Akuntabilitas

1) Pengertian Akuntabilitas

Direktorat Tenaga Kependidikan (2013: 73) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders*. Akuntabilitas kinerja sekolah adalah perwujudan kewajiban sekolah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodic.

Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban penyelenggara sekolah yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal: (a) pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, (b) anggaran pendapatan dan belanja sekolah, (c) pengelolaan sumberdaya pendidikan di sekolah, dan (d) keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut jenisnya, akuntabilitas dapat dikategorikan menjadi 4: (1) akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas pilihan atas kebijakan yang akan dilaksanakan, (2) akuntabilitas kinerja (*product/quality accountability*), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan sekolah, (3) akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan proses, prosedur, aturan main, ketentuan, pedoman, dan sebagainya, dan (4) akuntabilitas keuangan (kejujuran) atau sering disebut (*financial accountability*), yaitu akuntabilitas yang berhubungan dengan pendapatan dan pengeluaran uang (*cash in and cash out*). Sering kali istilah *cost accountability* juga digunakan untuk akuntabilitas ini.

2) Tujuan Akuntabilitas

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2013:74) Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Penyelenggara sekolah harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik. Selain itu tujuan akuntabilitas adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan kepada publik.

Untuk mengatur kinerja sekolah secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Sekolah dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Lebih jauh lagi, Direktorat Tenaga Kependidikan mengungkapkan, agar sekolah memiliki akuntabilitas yang tinggi, maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut, (1) Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban. Ini perlu diupayakan untuk menjaga kepastian tentang pentingnya akuntabilitas. (2) Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantuan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang tegas dan jelas. (3) Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/*stakeholders* di awal setiap tahun anggaran. (4) Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada *stakeholders*. (5) Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/*stakeholders* di akhir tahun. (6) Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan atau pengaduan publik.

(7) Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan. (8) Memperbarui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.

4) Indikator keberhasilan akuntabilitas

Berikut merupakan indikator keberhasilan Partisipasi yang dikutip dalam Direktorat Tenaga Kependidikan (2010:69) dengan modifikasi:

- a. Kepercayaan dan Kepuasan publik terhadap Sekolah. Jika sekolah telah melaporkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka publik akan lebih percaya dan merasa puas kepada sekolah atas pelaporan berkalitan dengan akuntabilitas tersebut.
- b. Tumbuhnya Kesadaran Publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan disekolah. Setelah mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan sekolah, publik akan mengetahui informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah. Hal tersebut dapat memicu kesadaran publik untuk menilai seluruh kegiatan sekolah.
- c. Berkurangnya kasus-kasus KKN di sekolah. Sekolah yang berani mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan sekolah kepada publik menunjukkan bahwa sekolah merupakan lembaga yang bersih dari KKN.

d. Kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Setelah dilakukannya akuntabilitas sekolah, maka akan muncul kegiatan-kegiatan sekolah yang sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Setiawan (2016) yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 1 Bantul”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) proses manajemen di SMK Negeri 1 Bantul meliputi; a) perencanaan program sekolah dan jurusan, masing-masing jurusan memiliki program kerja unggulan, b) pelaksanaan program berdasarkan RKAS yang telah dibuat, mengutamakan program dadakan dari PEMDA. 2) proses pembelajaran, terdiri atas; a) penggunaan kurikulum, dengan kurikulum 2013 dan sebagian guru mengintegrasikannya dengan KTSP 2006, b) metode dan strategi guru, terdiri atas; (1) discovery learning, (2) learning by association, (3) problem solving learning; c) PAKEM; (d) fasilitas pendukung pembelajaran; (e) layanan khusus, terdiri atas (1) pendampingan khusus, (2) les bahasa inggris, (3) les 4 mapel, (4) praktikum kewirausahaan, (5) ekstrakurikuler. 3) Peran Serta Masyarakat, terdiri atas; peran Pemerintah Pusat, PEMDA, Dikmenof Bantul, DUDI, Perguruan Tinggi, masyarakat sekitar, wali murid, supervisor, dan sponsor. 4) iklim dan budaya sekolah, *teamwork* bagus dan kompak, memiliki iklim unik

yaitu memasak dan makan bersama pada jurusan keuangan. Kelemhan iklim di SMK Negeri 1 Bantul adalah letak antar ruang jurusan yang jauh sehingga hubungan personal dengan jurusan lain menjadi kurang akrab. Dari penelitian di atas, memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu kesamaan pada kebijakan manajemen berbasis sekolah, dan sama-sama meneliti tentang peran serta masyarakat/partisipasi. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada jenis penelitian, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukarti dan Udik Budi Wibowo (2013) yang berjudul “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri di Kabupaten Sleman”. Hasil penelitian ini adalah implementasi MBS di SMK Negeri 1 Kalasan dan SMK Negeri 2 Depok dari aspek konteks hampir semua aspek di kedua sekolah ini terpenuhi. Dari segi input MBS, SMK Negeri 1 Kalasan dan SMK Negeri 2 Depok, mempunyai dukungan input yang baik. Ditinjau dari proses telah berjalan dengan “baik”. Sedangkan dari aspek produk sangat baik. Dari segi outcome, lulusan dari SMK Negeri 1 Kalasan dan SMK Negeri 2 Depok lebih banyak diserap di dunia kerja daripada melanjutkan ke perguruan tinggi.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif dan sama-sama meneliti sekolah yang ada di Kabupaten Sleman. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian di atas

merupakan penelitian evaluasi sedangkan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Alfian Al Farisi (2012) yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan (1) kemandirian sekolah sudah berjalan baik, yaitu program sekolah dikembangkan atas inisiatif warga sekolah sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan sekolah serta terdapat usaha dan kegiatan sekolah dalam penggalan dana dengan memanfaatkan potensi sumber daya sekolah dengan mendirikan unit produksi dan jasa sekolah; (2) kerjasama sekolah yaitu kerjasama antar warga sekolah dan dengan pihak luar sekolah terjalin dengan baik, sekolah memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan 7 (tujuh) Du/Di dari tahun 2006- 2014; (3) bentuk partisipasi *stakeholders* (pemerintah, masyarakat, dan warga sekolah) yaitu berupa dukungan dana, dukungan material/fasilitas, dukungan pemikiran, dan dukungan tenaga pada kategori baik; (4) keterbukaan sekolah sudah berjalan dengan baik, yaitu program dan keuangan sekolah dirumuskan bersama dengan melibatkan warga sekolah dan komite sekolah. Sekolah membuat media/wadah komunikasi dan informasi terhadap program dan keuangan sekolah dalam bentuk komunikasi langsung, papan pengumuman, website sekolah, maupun laporan kegiatan; dan (5) akuntabilitas sekolah sudah berjalan dengan baik karena sekolah telah memberikan pertanggungjawaban

proses dan hasil pelaksanaan program maupun keuangan sekolah kepada warga sekolah, komite sekolah, yayasan, dan pemerintah.

Persamaan penelitian ini adalah, sama-sama meneliti kelima prinsip Manajemen Berbasis Sekolah yang terdiri dari prinsip kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, dalam penelitian ini hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner dan angket, sedangkan dalam penelitian tersebut menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu dengan kuesioner, angket, dan dokumentasi. Selain itu, perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian, dimana peneliti menggunakan 2 sekolah untuk pengambilan data, sedangkan penelitian tersebut menggunakan 1 sekolah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Valliamah Shoma Vally dan Khadijah Daud (2014) yang berjudul "*The Implementation of School Based Management Policy: An Exploration*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Sekolah Kuala Lumpur memiliki kecenderungan tinggi dalam pengaturan visi dan misi sekolah bersama dengan manajemen sumber daya manusia. Analisis korelasi menunjukkan bahwa semakin efektif kepala sekolah memainkan perannya, semakin efektif visi dan misi sekolah dilaksanakan dan manajemen sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien.

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian dan sama-sama meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah.

Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang kesiapan kepala sekolah dan juga korelasi peran kepala sekolah terhadap pelaksanaan visi dan misi dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menganalisis secara deskriptif prinsip manajemen berbasis sekolah yang terdiri dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Rey Opong Cabardo (2016) yang berjudul *Level of Participation of the School Stakeholders to the Different School-Initiated Activities and the Implementation of School-Based Management*". Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat implemementasi MBS ditemukan melebihi standar minimum. Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan untuk berbagai kegiatan yang diprakarsai sekolah dapat dipengaruhi secara signifikan oleh tingkat pelaksanaan MBS. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang tingkat partisipasi *stakeholders*. Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian dimana penelitian ini merupakan penelitian survey deskriptif-korelasional sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian deskriptif.

C. Kerangka Berpikir

SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman merupakansekolah menengah kejuruan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan kepada masyarakat. Dalam

menyelenggarakan kegiatan pendidikan diperlukan suatu konsep pengelolaan manajemen pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) hadir sebagai konsep pengelolaan sekolah di era desentralisasi pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan MBS dapat diukur dari terlaksananya prinsip-prinsip MBS yang terdiri dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Kemandirian merupakan kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pendidikan menurut prakarsa sekolah tanpa selalu bergantung dengan pihak lain. Sekolah yang mandiri artinya sekolah dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sekolah harus mampu memenuhi kebutuhannya yang terdiri dari sumber daya manusia maupun sumber daya manusia. Kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan juga berperan penting dalam mewujudkan kemandirian. Kemampuan sekolah dapat dilihat dari kemampuan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya lainnya, kemampuan manajemen sekolah, kemampuan kepemimpinan dan kemampuan administrasi.

Kerjasama merupakan jalinan hubungan sekolah dengan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan pendidikan. Kerjasama yang harus dilakukan oleh sekolah adalah kerjasama internal dan kerjasama eksternal. Kerjasama internal antar warga sekolah harus dibangun dengan sungguh-sungguh sehingga tercipta kerjasama yang kompak dan harmonis dalam internal

sekolah. Selain itu, sekolah harus menjalin kerjasama eksternal guna mendukung terlaksananya program. Kerjasama eksternal dapat dijalin dengan pemerintah, DUDI, komite sekolah, yayasan, dan sebagainya. Sekolah harus mampu menjalin kerjasama yang baik agar kegiatan pendidikan/program-program sekolah berjalan dengan lancar.

Partisipasi merupakan keterlibatan *stakeholders* dalam kegiatan sekolah. *Stakeholders* harus mampu berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dengan sekolah. *Stakeholders* bersedia berpartisipasi dengan sekolah jika *stakeholders* percaya dengan kegiatan pendidikan yang dilakukan sekolah. *Stakeholders* harus mampu menjalankan peran sesuai tanggungjawab yang disepakati dengan sekolah. Dengan adanya partisipasi dari *stakeholders*, diharapkan sekolah akan semakin berkualitas melalui masukan-masukan yang membangun dari *stakeholders*. Partisipasi dari *stakeholders* menunjukkan bahwa *stakeholders* peduli dengan sekolah. Keberadaan *stakeholders* diharapkan dapat menjadi pertimbangan sekolah dalam pengambilan keputusan disetiap program sekolah.

Keterbukaan adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kegiatan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan serta kebijakan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada pelayanan publik, sehingga keterbukaan sekolah juga perlu diketahui oleh publik. Dengan keterbukaan, publik akan yakin dan percaya dengan setiap kegiatan sekolah, dengan begitu partisipasi publik pada

sekolah juga akan meningkat. Keterbukaan sekolah akan menambah pengetahuan/wawasan publik terhadap setiap program sekolah. Sekolah yang terbuka menunjukkan bahwa tidak ada informasi yang disembunyikan dalam kegiatan pendidikan serta tidak adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan sekolah.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terkait proses dan hasil dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah pada publik. Akuntabilitas pendidikan akan membuat publik yakin dan percaya kepada sekolah. Publik akan memiliki kesadaran untuk menilai penyelenggaraan pendidikan saat penyampaian akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah, sehingga masukan yang diterima sekolah akan lebih banyak. Sekolah yang memiliki akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa telah berkurangnya praktik kolusi, korupsi maupun nepotisme. Selain itu, akuntabilitas juga akan mendorong kesesuaian kegiatan sekolah dengan nilai dan norma, karena publik bisa menilai dan memberi masukan saat disampaikannya akuntabilitas.

Menilai keberhasilan implementasi MBS dapat dilihat dari pengukuran seberapa baik dan atau seberapa tinggi pelaksanaan prinsip MBS diatas yang terdiri dari kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pengukuran prinsip MBS dilakukan melalui pengisian angket tertutup oleh responden yang memenuhi kriteria dan wawancara dengan responden yang mengetahui lebih detail tentang prinsip-prinsip tersebut.

Diharapkan nantinya, hasil penelitian ini dapat menjadi evaluasi untuk implementasi MBS yang lebih baik lagi bagi sekolah.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
2. Bagaimana Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
3. Bagaimana Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
4. Bagaimana Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
5. Bagaimana Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
6. Bagaimana Kemitraan Internal SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
7. Bagaimana Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
8. Bagaimana Kontribusi *Stakeholders* SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
9. Bagaimana Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan?
10. Bagaimana Tanggung jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?

11. Bagaimana Kualitas dan kuantitas masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
12. Bagaimana Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
13. Bagaimana keputusan sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 dibuat?
14. Bagaimana keyakinan dan kepercayaan publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
15. Apakah partisipasi publik dalam penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman meningkat?
16. Apakah wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah meningkat?
17. Apakah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman telah berkurang?
18. Bagaimana kepercayaan dan kepuasan publik terkait dengan akuntabilitas sekolah?
19. Bagaimana kesadaran publik untuk menilai pendidikan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman?
20. Apakah kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman telah berkurang?
21. Apakah kegiatan sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman sudah sesuai dengan nilai dan norma?

E. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dalam penelitian ini terdiri dari lima tahapan, yaitu: *pertama*, persiapan instrumen penelitian, pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data, seperti: kuesioner tertutup dan pedoman wawancara. *Kedua*, pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data melalui angket dan wawancara. *Ketiga*, reduksi data, pada tahap ini peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan membuang hasil pengumpulan data yang tidak perlu. *Keempat*, analisis data, pada tahap ini peneliti melakukan perhitungan dan mengelompokkan data kuesioner kedalam empat kategori kecenderungan variabel, selanjutnya menambahkan data pendukung berupa wawancara untuk membantu mendeskripsikan data kuesioner. *Kelima*, penarikan kesimpulan dan pembuatan laporan penelitian, pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan dan dilanjutkan pada pembuatan laporan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur dan menilai data dalam bentuk angka, terkait implementasi manajemen berbasis sekolah berdasarkan variabel kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri baik pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2009: 56). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman yang terdiri dari prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas sekolah.

B. Subjek Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah pihak yang telah mengetahui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman diantaranya adalah guru dan tenaga kependidikan. Subjek penelitian dibatasi hanya pada responden dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun, karena dengan pengalaman kerja tersebut responden diasumsikan sudah mengetahui pelaksanaan prinsip manajemen berbasis sekolah.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Tempel yang terletak di Jalan Magelang Km 17, Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta dan SMK YPKK 2 Sleman yang terletak di Jalan Pemuda, Wadas Tridadi, Tridadi, Sleman. Waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Agustus 2018, dimulai dari observasi hingga penyusunan laporan penelitian.

D. Definisi Operasional Variabel

1. Kemandirian

Kemandirian adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki kemampuan dan kesanggupan. Kemampuan sekolah meliputi kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan pembekalan), manajemen, kepemimpinan, dan administrasi. Sedangkan kesanggupan sekolah sangat dipengaruhi oleh kepentingan yang bersumber dari kebutuhan. Oleh karena itu, agar tercipta kesanggupan yang memadai diperlukan pemenuhan berbagai kepentingan sekolah yang bersumber dari kebutuhan sekolah.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah jalinan/ hubungan sekolah dengan berbagai pihak guna mendukung terlaksananya program pendidikan. Untuk menyukseskan

manajemen berbasis sekolah, sekolah perlu menjalin kemitraan/kerjasama dengan berbagai pihak baik dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Kemitraan internal sekolah meliputi kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kemitraan ekternal sekolah dengan pihak internal sekolah meliputi sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan orang tua siswa, sekolah dengan DUDI, sekolah dengan komite sekolah.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan program sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” (*sense of belonging*) terhadap keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Partisipasi dapat ditunjukkan dengan kontribusi *stakeholders* tanggung jawab *stakeholders* dalam penyelenggaraan pendidikan disekolah, kepercayaan *stakeholders* pada sekolah, adanya kritik dan saran dari *stakeholders*, adanya keputusan yang dibuat berdasarkan aspirasi *stakeholders*.

4. Keterbukaan

Keterbukaan/transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan

hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berorientasi pada pelayanan publik, sehingga keterbukaan sekolah dalam hal ini juga perlu diketahui oleh publik selaku *stakeholders*. Keterbukaan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan keyakinan dan kepercayaan publik, meningkatnya partisipasi, bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sekolah perlu memberikan pertanggungjawaban terkait dengan proses dan hasil dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertanggungjawaban sekolah dapat dilihat dari adanya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, kesadaran publik untuk menilai pendidikan di sekolah, berkurangnya kasus KKN di sekolah, kesesuaian kegiatan sekolah dengan nilai dan norma.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dan wawancara.

1. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2014: 142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini terdiri dari beberapa pernyataan yang dapat memberikan informasi bagi peneliti terkait dengan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi secara langsung dari responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014: 231). Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam dari responden. Pedoman wawancara disusun secara sistematis, agar memudahkan peneliti dalam memperoleh data. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan seluruh wakil kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah dipilih karena dianggap paling

mengetahui tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disusun dengan menjabarkan variabel-variabel dalam penelitian, berdasarkan kajian teori. Variabel dalam penelitian ini adalah kemandirian sekolah, Kemitraan sekolah, partisipasi para pemangku kepentingan, keterbukaan sekolah dan akuntabilitas sekolah.

1. Penyusunan Instrumen Penelitian

Penyusunan angket pada penelitian ini menggunakan model skala likert yang terdiri dari 4 pilihan jawaban, yaitu (SS) = Sangat Setuju, (S) = Setuju, (KS) = Kurang Setuju, dan (TS) = Tidak Setuju, dengan skor tertinggi 4 dan skor terendah 1. Pedoman wawancara disusun sesuai dengan variabel penelitian yang digunakan untuk memperoleh informasi lebih dalam terkait dengan variabel tersebut. Untuk memudahkan penyusunan instrumen, maka disusun kisi-kisi instrumen sebagai berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi instrumen Angket

Variabel	Indikator	Nomor Butir	Sumber Data
Kemandirian	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,	Guru dan Tenaga Kependidikan
	Kemampuan SDM dan Sumber Daya Lainnya	9,10,11,12,13, 14,15,16, 17	
	Kemampuan Manajemen	18,19,20,21,22 ,23,24	
	Kemampuan Kepemimpinan	25, 26, 27	
	Kemampuan Administrasi	28, 29, 30	
Kemitraan	Kemitraan Internal	1,2,3,4,5	
	Kemitraan Eksternal	6,7,8,9,10,11	
Partisipasi	Kontribusi <i>Stakeholders</i>	1,2,3,4,5,6, 7,8	
	Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan dari pelanggaran	9,10,11,12	
	Tanggung jawab <i>Stakeholders</i>	13,14,15	
	Kualitas dan kuantitas masukan <i>Stakeholders</i>	16,17,18,19*	
	Kepedulian <i>Stakeholders</i>	20,21,22	
	Keputusan sekolah berdasarkan aspirasi <i>Stakeholders</i>	23,24*,25	
Keterbukaan	Keyakinan dan kepercayaan publik	1,2,3,4,5	
	Peningkatan partisipasi publik	6,7,8	
	Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.	9*,10,11	
	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	12,13,14, 15	
Akuntabilitas	Kepercayaan dan kepuasan publik.	1,2,3*,4	
	Kesadaran publik untuk menilai.	5,6,7,8	
	Berkurangnya kasus KKN.	9,10,11,12	
	Kesesuaian kegiatan sekolah dengan Nilai dan norma.	13,14,15,16	

Keterangan: *) Pertanyaan Negatif

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Wawancara

Variabel	Indikator	Nomor Butir	Sumber Data
Kemandirian	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1	Kepala Sekolah dan WKS
	Kemampuan SDM dan Sumber Daya Lainnya	2,3	
	Kemampuan Manajemen	4	
	Kemampuan Kepemimpinan	5	
	Kemampuan Administrasi	6	
Kemitraan	Kemitraan Internal	7	
	Kemitraan Eksternal	8	
Partisipasi	Kontribusi <i>Stakeholders</i>	9	
	Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan dari pelanggaran	10	
	Tanggung jawab <i>Stakeholders</i>	11	
	Kualitas dan kuantitas masukan <i>Stakeholders</i>	12	
	Kepedulian <i>Stakeholders</i>	13	
	Keputusan sekolah berdasarkan aspirasi <i>Stakeholders</i>	14	
Keterbukaan	Keyakinan dan kepercayaan publik	15	
	Peningkatan partisipasi publik	16	
	Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah.	17	
	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan	18	
Akuntabilitas	Kepercayaan dan kepuasan publik.	19	
	Kesadaran publik untuk menilai.	20	
	Berkurangnya kasus KKN.	21	
	Kesesuaian kegiatan sekolah dengan Nilai dan norma.	22	

2. Uji Coba Instrumen

Kualitas Instrumen Penelitian dapat diketahui dengan cara melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, uji coba instrumen angket dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta dan SMK Negeri 1 Tempel serta SMK YPKK 2 Sleman melalui *judgement* para ahli (Dosen Ahli dan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman). Uji coba instrumen yang digunakan adalah uji validitas isi. Validitas isi instrumen dapat dilakukan dengan memberikan skala penilaian dari angka 1 (tidak baik) sampai 5 (sangat baik), kemudian dilakukan perhitungan menggunakan skala *Aiken* untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid. Indeks validitas butir *Aiken* dirumuskan sebagai berikut:

$$V = \frac{\sum S}{n(c - 1)}$$

Dengan V adalah indeks kesepakatan ahli mengenai validitas butir; S skor yang ditetapkan ahli dikurangi skor terendah dalam kategori yang dipakai ($s = r - 1_0$, dengan r = skor kategori pilihan ahli dan 1_0 , skor terendah dalam kategori penyekoran); n banyaknya ahli, c banyaknya kategori yang dipilih ahli. Indeks V nilainya berkisar antara 0-1. Jika indeksnya kurang atau sama dengan 0,4 dikatakan validitasnya kurang, 0,4 -0,8 dikatakan validitasnya sedang, dan jika lebih besar dari 0,8 dikatakan sangat valid. (Retnawati, 2016:18).

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan skala Aiken dapat diketahui bahwa semua butir instrumen dari kelima variabel dinyatakan valid. Berikut merupakan rangkuman hasil uji validitas instrumen:

Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Nomor Butir Valid	Nomor Butir Tidak Valid
Kemandirian	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan 30	-
Kemitraan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12	-
Partisipasi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25	-
Keterbukaan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15	-
Akuntabilitas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15	-

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 262 - 265

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Data Angket

a. Kategori Kecenderungan Variabel

Deskripsi selanjutnya adalah untuk menentukan kategori skor setiap variabel dan indikator. Kategorisasi disusun berdasarkan Mean (M_i) dan Standar Deviasi (SD_i) yang diperoleh dari rumus sebagai berikut:

$$M_i = \frac{1}{2} (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$SDi = \frac{1}{6} (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

Tabel 5. Pedoman Pengkategorisasian

No.	Rentang	Kategori
1	$X \geq M + 1.5SD$	Sangat Baik
2	$M \leq X \leq + 1.5SD$	Baik
3	$M - 1.5SD \leq X < M$	Kurang
4	$X \leq M - 1.5SD$	Sangat Kurang

(Mardapi, 2008: 123)

b. Diagram Batang

Diagram batang dibuat berdasarkan data kecenderungan yang telah ditampilkan dalam tabel kecenderungan variabel.

2. Analisis Data Wawancara

Data wawancara merupakan data yang berupa kalimat-kalimat dimana data tersebut akan menmpertelas data yang diperoleh dari angket. Informasi yang terkumpul melalui wawancara tidak mungkin disajikan secara apa adanya. Oleh karena itu, data harus dianalisis agar sesuai dengan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Analisis data kualitatif dala penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman dimana aktivas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2015:246).

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data wawancara yang dilakukan, tidak semuanya penting dan relevan dengan informasi yang diperlukan. Maka dari itu diperlukan reduksi data untuk menyaring informasi yang diperoleh. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data disajikan secara naratif yang fungsinya untuk menjelaskan dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang terjadi di lapangan dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tahap selanjutnya.

c. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menganalisis data yang telah disajikan pada tahap kedua kemudian menyesuaikan dengan fokus penelitian untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Tempel yang terletak di Jalan Magelang Km 17, Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta dan SMK YPKK 2 Sleman yang terletak di Jalan Pemuda , Wadas Tridadi, Tridadi, Sleman. Pengumpulan deata dilakukan dengan menggunakan angket tertutup. Subjek penelitian ini adalah pihak yang mengetahui pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Subjek yang dimaksud adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Tata Usaha yang ada di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

Berikut merupakan deskripsi data Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang didapatkan dari masing-masing variabel penelitian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman :

1. Kemandirian

Kemandirian adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Dalam penelitian ini, kemandirian sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman diukur melalui lima indikator, yaitu Kemampuan Manajemen, Kemampuan Sumber Daya

Manusia dan Kemampuan Sumber Daya Lainnya, Kemampuan Manajemen, Kemampuan Kepemimpinan dan Kemampuan Administrasi. Data diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara yang dilakukan kepada wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 30 butir pernyataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 75$ dan $SD_i = 15$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan variabel Kemandirian yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 6. Kecenderungan Variabel Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 97.5$	30	55,56	Sangat Baik
2	$75 \leq X < 97.5$	24	44,44	Baik
3	$52.5 \leq X < 75$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 52.5$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

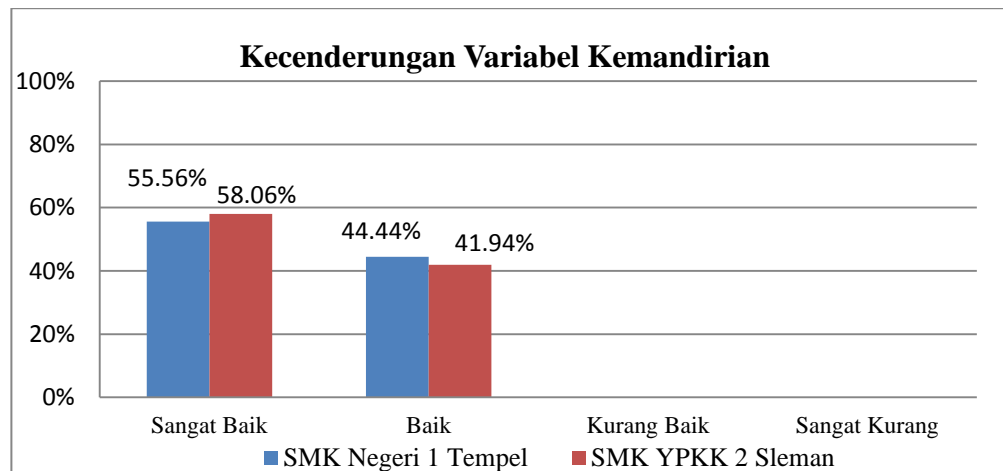
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 267 dan 291

Tabel 7. Kecenderungan Variabel Kemandirian SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 97.5$	18	58.06	Sangat Baik
2	$75 \leq X < 97.5$	13	41.94	Baik
3	$52.5 \leq X < 75$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 52.5$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 279 dan 291

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Kecenderungan variabel Kemandirian

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel menurut 55,56% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 44,44% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan sangat baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan analisis deskriptif dapat diketahui bahwa Kemandirian menurut 58,06% responden pada kategori sangat baik

dan kategori baik 41,94% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian di SMK YPKK 2 Sleman dikategorikan sangat baik.

a. Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman. Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 8 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 20$ dan $SD_i = 4$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMKN 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 8. Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 26$	26	48,15	Sangat Baik
2	$20 \leq X < 26$	28	51,85	Baik
3	$14 \leq X < 20$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 14$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

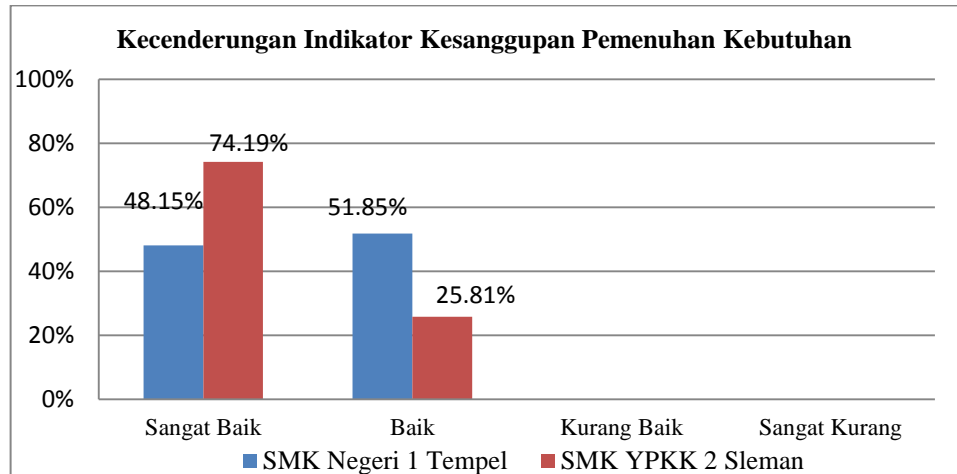
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 270 dan 294

Tabel 9. Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 26$	23	74,19	Sangat Baik
2	$20 \leq X < 26$	8	25,81	Baik
3	$14 \leq X < 20$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 14$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 282 dan 294

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat diagram kecenderungan indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan sebagai berikut:



Gambar 2. Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel menurut 48,15% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 51,85% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan WKS Kesiswaan dan WKS Kurikulum dapat diketahui bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan dilihat dari sumber daya manusia mayoritas sudah sesuai dengan kualifikasinya, dan hanya perlu menambah beberapa tenaga administrasi karena ada beberapa yang akan pensiun. Sekolah memiliki 57 tenaga pendidik dan 15 tenaga kependidikan. Jika dilihat dari kualifikasinya, terdapat 32 guru yang bergelar sarjana, 24 guru yang bergelar S2 dan hanya 1 guru dengan pendidikan Diploma. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, dilihat dari kualifikasinya terdapat 1 orang bergelar sarjana,

3 orang yang bergelar diploma, dan 11 orang dengan pendidikan SMA/SMK. Namun berdasarkan data dokumen diketahui bahwa Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 1 Tempel memiliki pendidikan terakhir SMA

Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sudah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran sekolah memiliki 21 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium, dan ruang praktik siswa. Selain untuk kegiatan pembelajaran, sekolah juga memiliki ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, tempat ibadah dan lain-lain. Dilihat dari pembiayaan, anggaran pemerintah sudah mencukupi untuk penyelenggaraan kegiatan, apabila masih kurang, sekolah menghimpun dana dari wali murid. Sekolah menggunakan pendanaan dari unit usaha sekolah dan *stakeholders*, yang meliputi pemerintah, wali murid, komite sekolah, dan lembaga serta perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, mayoritas pendanaan dalam program sekolah menggunakan dana dari pemerintah. Lebih lanjut diketahui bahwa dana dari pemerintah sudah mencukupi untuk penyelenggaraan kegiatan, dan apabila masih kurang, sekolah menghimpun dana dari wali murid.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK YPKK 2 Sleman menurut 74,19%

responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 25,81% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK YPKK 2 Sleman dikategorikan sangat baik.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK YPKK 2 Sleman secara kuantitas sudah terpenuhi, terdiri dari 42 orang guru dan 11 orang tenaga kependidikan. Jika dilihat dari kualifikasinya terdiri dari 3 guru yang berpendidikan tingkat S2, 38 guru S1, dan 1 guru tamatan SMA. Sedangkan untuk tenaga kependidikan terdiri dari 2 orang dengan pendidikan S1, 9 orang tingkat SMP, dan 2 orang tingkat SMA. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk KBM sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan tempat. kelengkapan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki 18 ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Selain untuk kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, tempat ibadah dan lain-lain. Dari segi pendanaan, sekolah telah mampu mengelola dana yang diterima, namun terdapat kendala dalam penerimaan pendanaan dari wali murid dimana terkadang wali murid belum memenuhi kewajibannya saat

jatuh tempo, padahal dana dari wali murid adalah dana yang paling banyak digunakan oleh sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan.

b. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 9 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 22,5$ dan $SD_i = 4,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kemampuan Manajemen yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 10. Kecenderungan Indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 29,25$	28	51,85	Sangat Baik
2	$22,5 \leq X < 29,25$	26	48,15	Baik
3	$15,75 \leq X < 22,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 15,75$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

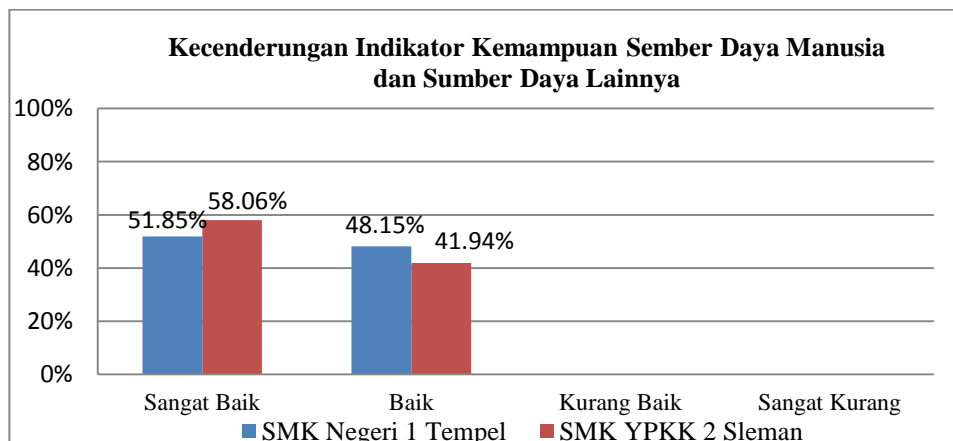
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 271 dan 295

Tabel 11. Kecenderungan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 29,25$	18	58,06	Sangat Baik
2	$22,5 \leq X < 29,25$	13	41,94	Baik
3	$15,75 \leq X < 22,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 15,75$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 282 dan 295

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat diagram indikator Kecenderungan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya sebagai berikut:



Gambar 3. Kecenderungan Indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel menurut 51,85% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 48,15% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Kurikulum SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa kinerja sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) sudah berjalan dengan baik dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya. Pengelolaan sumber daya lainnya terdiri dari pendanaan juga sudah baik, dimana sekolah sudah menggunakan dana yang diterima dari pemerintah untuk program-program sekolah, apabila dana dari pemerintah masih kurang, sekolah menghimpun dana dari wali murid. Sarana dan prasarana telah dikelola dengan baik oleh warga sekolah, dan sekolah juga memiliki teknisi untuk mengelola sarana prasarana tersebut.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman menurut 58,06% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 41,94% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman da;am kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa kinerja guru dan tenaga kependidikan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan administrasi belum sepenuhnya maksimal. Dari pengelolaan sarana dan prasarana, bagian yang memiliki tugas tersebut, belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tapi masih bisa diatasi dengan mendatangkan tenaga dari luar sekolah. Sedangkan jika dilihat dari pendanaan, sekolah mampu mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan sekolah dan mampu menyisihkan 10% dari setiap dana kegiatan yang dianggarkan.

c. Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui kemampuan manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 7 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 17,5$ dan $SD_i = 3,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan

indikator Kemampuan Manajemen yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 12. Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 22,75$	29	53,7	Sangat Baik
2	$17,5 \leq X < 22,75$	25	46,3	Baik
3	$12,25 \leq X < 17,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 12,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

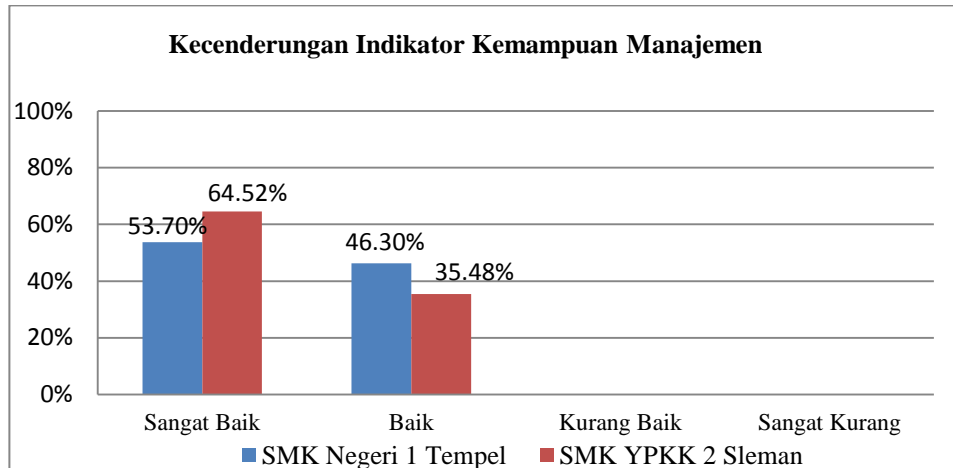
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 271 dan 295

Tabel 13. Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 22,75$	20	64,52	Sangat Baik
2	$17,5 \leq X < 22,75$	11	35,48	Baik
3	$12,25 \leq X < 17,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 12,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 283 dan 295

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat diagram indikator Kecenderungan Kemampuan Manajemen sebagai berikut:



Gambar 4. Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel menurut 53,70% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 46,30% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum dan Kesiswaan, secara umum manajemen sekolah sudah baik, misalnya pada manajemen kurikulum dan manajemen layanan khusus, sekolah telah menggunakan 3 kurikulum pada tahun ajaran 2017/2018 yang terdiri dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Sedangkan manajemen layanan khusus seperti UKS, Koperasi dan lainnya sudah berjalan dengan baik, dimana sekolah juga melibatkan siswa dalam pengelolaannya.

Dari gambar dapat diketahui bahwa Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman menurut 65,42% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 35,48% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa kemampuan manajemen secara umum sudah berjalan baik, manajemen kesiswaan tidak terdapat kendala, tetapi secara pengelolaan tergantung situasi. Kurikulum yang saat ini digunakan di SMK YPKK 2 Sleman adalah kurikulum 2013. Pengelolaan pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manajemen pelayanan khusus telah berjalan dengan baik dimana siswa juga terlibat dalam pengelolaannya.

d. Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kemampuan Kepemimpinan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 14. Kecenderungan Indikator Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	27	50	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	27	50	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

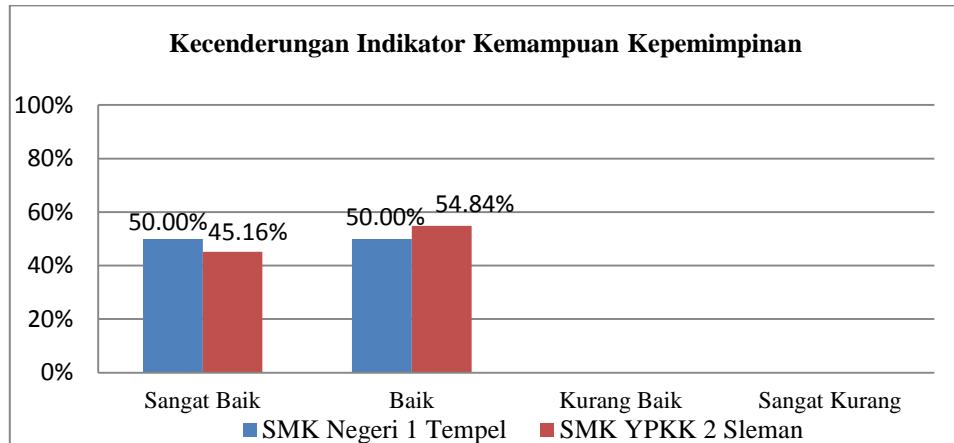
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 272 dan 296

Tabel 15. Kecenderungan Indikator Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	14	45,16	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	17	54,84	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 283 dan 296

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dibuat diagram indikator Kecenderungan Kemampuan Kepemimpinan sebagai berikut:



Gambar 5. Kecenderungan Indikator Kemampuan Kepemimpinan

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel menurut 50% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 50% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan pada dua kategori yaitu baik dan sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dan Kurikulum, kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dilihat dari sisi Kepemimpinan sudah baik. Kepala sekolah tegas dalam memimpin dengan menerapkan aturan-aturan yang disiplin pada warga sekolah. Selain itu, dalam penyelenggaraan program sekolah, kepala sekolah mampu menjalin Kemitraan yang kompak, dan membentuk *teamwork* yang baik dengan setiap warga sekolah yang terlibat dalam kegiatan sekolah.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman menurut 45,16% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 54,84% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman dikategorikan baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah secara sosial sudah baik, artinya kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang baik dan dan mampu menjalin kerjasama dengan warga sekolah maupun *stakeholders*. Namun, berdasarkan penuturan wakil kepala sekolah dapat diketahui bahwa kepala sekolah masih belum tegas dalam menyampaikan teguran kepada warga sekolah yang melanggar aturan.

e. Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kemampuan Administrasi yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 16. Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	21	38,89	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	33	61,11	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

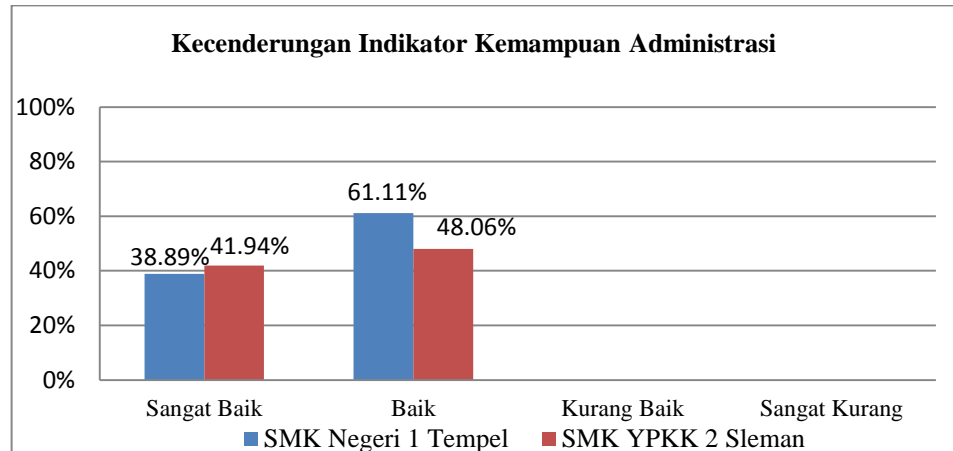
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 272 dan 297

Tabel 17. Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	13	41,94	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	18	58,06	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber Data primer yang diolah pada halaman 284 dan 297

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Kemampuan Administrasi sebagai berikut:



Gambar 6. Kecenderungan indikator Kemampuan Administrasi

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel menurut 38,89% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 61,11% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dikategorikan baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekola kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa guru telah menjalankan kegiatan administrasinya menyusun silabus, RPP, dan perangkat pembelajaran lainnya dengan tertib. Sedangkan enaga kependidikan juga telah menyusun kegiatan administrasi sesuai tugasnya, yang terdiri administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi persuratan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan masyarakat, dan kegiatan administrasi lainnya.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman menurut 41,94% responden pada kategori sangat baik dan kategori baik 58,06% responden. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman dikategorikan baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa guru telah melaksanakan kegiatan administrasi dengan menyusun silabus RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Tenaga kependidikan juga telah menyusun kegiatan administrasi sesuai tugasnya, yang terdiri administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi persuratan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan masyarakat, dan kegiatan administrasi lainnya.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan sekolah dengan berbagai pihak guna mendukung terlaksananya program pendidikan. Untuk menyukseskan Kepemimpinan berbasis sekolah, sekolah perlu menjalin kemitraan/kerjasama dengan berbagai pihak baik dari pihak internal sekolah maupun pihak eksternal sekolah. Kemitraan internal sekolah meliputi kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Kemitraan ekaternal sekolah dengan pihak internal sekolah meliputi sekolah dengan masyarakat, sekolah dengan orang tua siswa, sekolah dengan DUDI, sekolah

dengan komite sekolah. Data diperoleh melalui penyebaran angket yang terdiri dari 12 butir pernyataan dan wawancara dengan wks kesiswaan dan wks kurikulum SMK Negeri 1 Tempel, kepala sekolah, wks kurikulum dan wks kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 12 butir pernyataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 30$ dan $SD_i = 6$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan variabel Kemitraan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 18. Kecenderungan Variabel Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecebderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 39$	41	75,93	Sangat Baik
2	$30 \leq X < 39$	13	24,07	Baik
3	$21 \leq X < 30$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 21$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

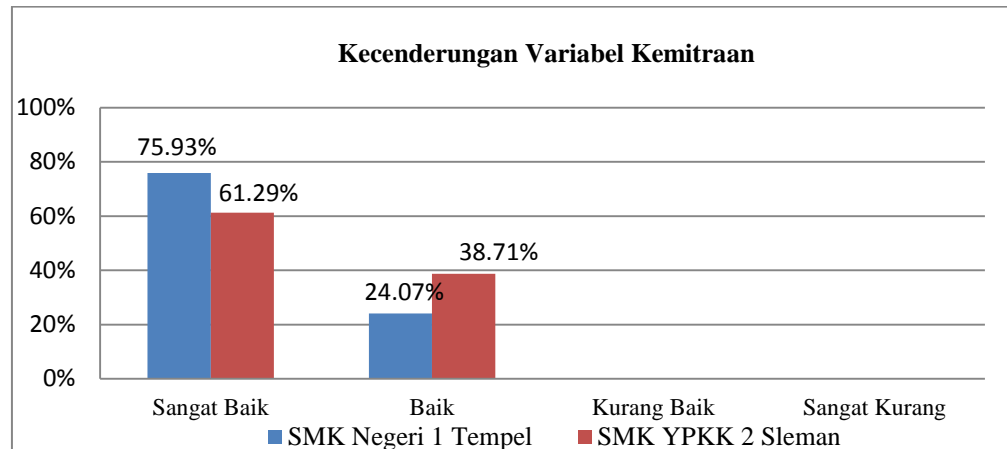
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 268 dan 291

Tabel 19. Kecenderungan Variabel Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecebderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 39$	19	61,29	Sangat Baik
2	$30 \leq X < 39$	12	38,71	Baik
3	$21 \leq X < 30$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 21$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 280 dan 291

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan diagram kecenderungan variabel Kemitraan sebagai berikut:



Gambar 7. Kecenderungan Variabel Kemitraan

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Kemitraan, dapat diketahui bahwa 41 responden (75,93%) menilai bahwa Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 13 responden (24,07%) menilai Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Kemitraan, dapat diketahui bahwa 19 responden (61,29%) menilai bahwa Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 12 responden (38,71%) menilai Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

a. Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 12,5$ dan $SD_i = 2,33$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal :

Tabel 20. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 15,85$	39	72,22	Sangat Baik
2	$12,5 \leq X < 15,85$	15	27,78	Baik
3	$9,15 \leq X < 12,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 9,15$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

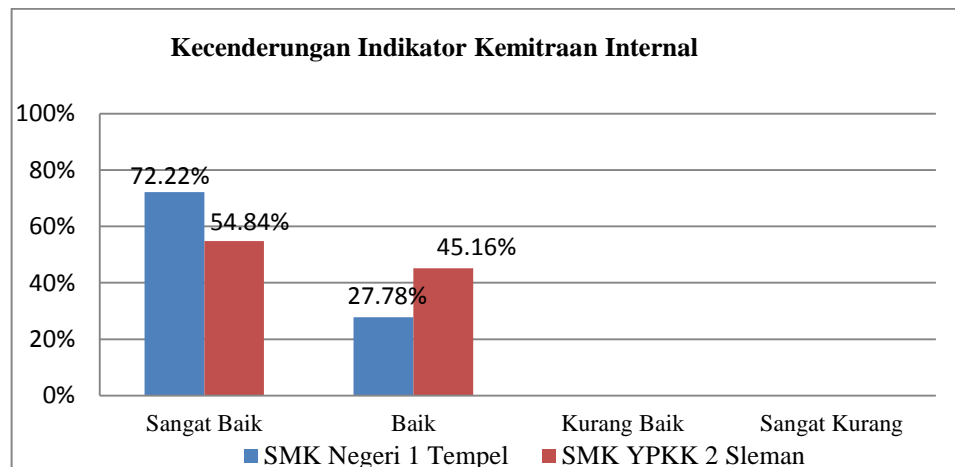
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 273 dan 298

Tabel 21. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 15,85$	17	54,84	Sangat Baik
2	$12,5 \leq X < 15,85$	14	45,16	Baik
3	$9,15 \leq X < 12,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 9,15$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 284 dan 298

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Kemitraan Internal sebagai berikut:



Gambar 8. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 19 responden (72,22%) menilai bahwa Kerjasama Internal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 12 responden (27,78%) menilai Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa telah terjalin Kemitraan yang baik antar guru, jurusan, dan siswa. Kemitraan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terlihat dari rapat rutin sekolah, koordinasi yang baik dalam program sekolah yang melibatkan keduanya, dan kekompakan dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Kemitraan antara guru dan siswa terwujud dalam terciptanya pembelajaran yang efektif disekolah, dimana siswa selalu memperhatikan guru saat pelajaran. Selain itu, sekolah memiliki forum silaturahmi untuk mempererat hubungan. Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal, dapat diketahui bahwa 17 responden (54,84%) menilai bahwa Kerjasama Internal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 14 responden (45,16%) menilai Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa Kemitraan warga sekolah telah berjalan dengan baik, hal ini terwujud dalam kegiatan rapat rutin yang dilakukan sekolah, Kemitraan yang

kompak dalam program sekolah dan terlaksananya tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugasnya. Selain itu, saat terdapat permasalahan sekolah, masing-masing saling berbagi satu sama lain. Namun terkadang ada beberapa yang kurang peduli dengan kegiatan sekolah. Kemitraan antar guru dan siswa tercipta melalui kegiatan pembelajaran dikelas, walaupun masih sering terdapat siswa yang kurang memperhatikan saat pembelajaran.

b. Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 7 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 17,5$ dan $SD_i = 3,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang.

Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 22. Kecenderungan Indikator Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 22,75$	42	77,78	Sangat Baik
2	$17,5 \leq X < 22,75$	12	22,22	Baik
3	$12,25 \leq X < 17,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 12,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

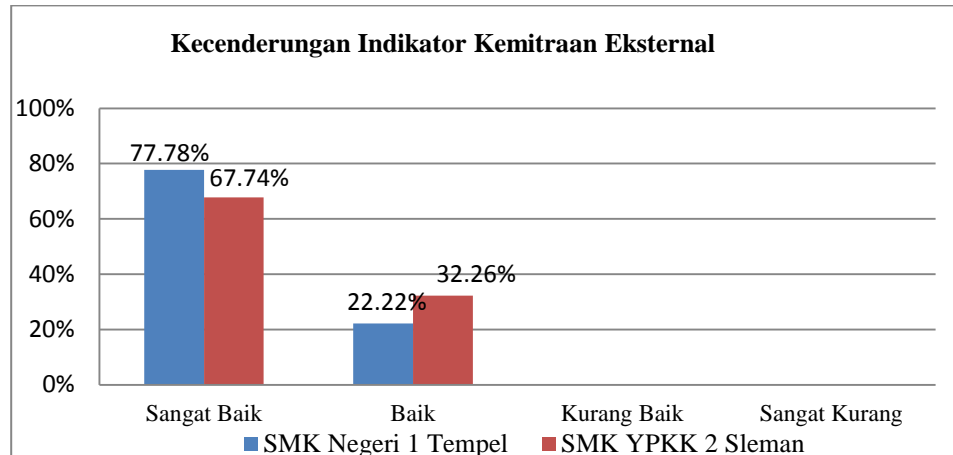
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 273 dan 298

Tabel 23. Kecenderungan Indikator Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 22,75$	21	67,74	Sangat Baik
2	$17,5 \leq X < 22,75$	10	32,26	Baik
3	$12,25 \leq X < 17,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 12,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 285 dan 298

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori kecenderungan indikator Kemitraan Eksternal sebagai berikut:



Gambar 9. Kecenderungan Indikator Kemitraan Eksternal

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 42 responden (77,78%) menilai bahwa Kerjasama Internal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 12 responden (22,22%) menilai Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemitraan eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa,sekolah telah menjalin Kemitraan dengan pemerintah terkait dengan anggaran pendidikan, Kemitraan dengan DUDI untuk melakukan prakerin dan uji kompetensi, dan lembaga perguruan tinggi untuk melakukan prakerin. Selain itu, terdapat kendala dimana linearitas jurusan akuntansi saat

melakukan prakerin masih belum sepenuhnya linear dengan bidang pekerjaan saat prakerin.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kemitraan Eksternal, dapat diketahui bahwa 21 responden (64,74%) menilai bahwa Kerjasama Internal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 10 responden (32,26%) menilai Kemitraan Eksternal SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa sekolah telah menjalin Kemitraan yang baik dengan pemerintah misalnya terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah, dengan DUDI untuk kegiatan prakerin, komite sekolah dan lembaga lainnya.

3. Partisipasi

Partisipasi adalah proses dimana *stakeholders* terlibat aktif baik secara individual maupun kolektif, secara langsung maupun tidak langsung, dalam kegiatan program sekolah. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa jika seseorang dilibatkan (berpartisipasi) dalam pengambilan keputusan maka yang bersangkutan akan mempunyai “rasa memiliki” (*sense of belonging*) terhadap keputusan tersebut, sehingga yang bersangkutan akan bertanggung

jawab dan berdedikasi sepenuhnya untuk mencapai tujuan sekolah. Partisipasi dapat ditunjukkan dengan kontribusi *stakeholders*, kepercayaan *stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan, tanggung jawab *stakeholders*, kualitas dan kuantitas masukan *stakeholders*, kepedulian *stakeholders*, keputusan sekolah berdasarkan aspirasi *stakeholders*. Data diperoleh melalui penyebaran angket yang terdiri dari 25 butir pernyataan dan wawancara yang dengan kepala wakil kepala sekolah kesiswaan SMK Negeri 1 Tempel, kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan SMK YPKK 2 Sleman. Berdasarkan analisis deskriptif data di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui hasil sebagai berikut:

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 25 butir pernyataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 62,5$ dan $SD_i = 12,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan variabel Partisipasi yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Partisipasi:

Tabel 24. Kecenderungan Variabel Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 81,25$	16	29,63	Sangat tinggi
2	$62,5 \leq X < 81,25$	38	70,37	Tinggi
3	$43,75 \leq X < 62,5$	0	0	Rendah
4	$X \leq 43,75$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 268 dan 292

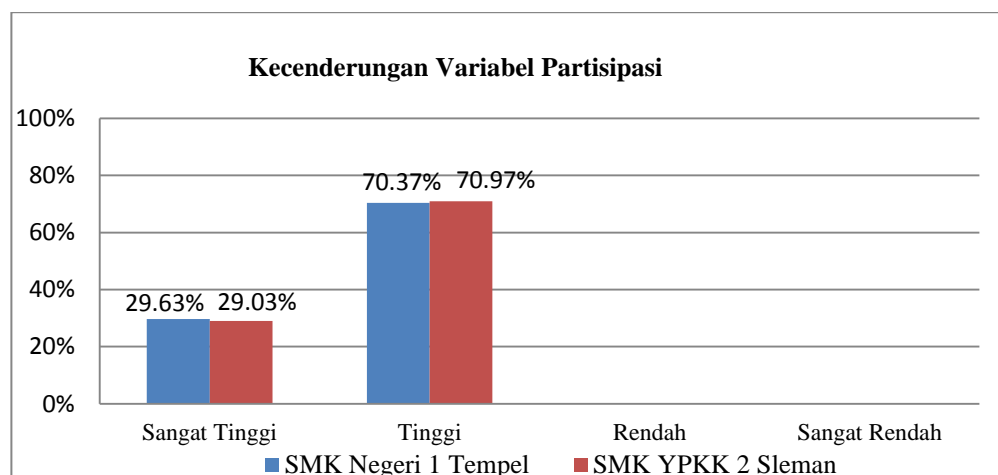
Tabel 25. Kecenderungan Variabel Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 81,25$	9	29,03	Sangat tinggi
2	$62,5 \leq X < 81,25$	22	70,97	Tinggi
3	$43,75 \leq X < 62,5$	0	0	Rendah
4	$X \leq 43,75$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 280 dan 292

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram

kecenderungan variabel Partisipasi sebagai berikut



Gambar 10. Kecenderungan Variabel Partisipasi

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Partisipasi, dapat diketahui bahwa 16 responden (29,63%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 38 responden (70,37%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai bahwa

Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 22 responden (70,97%) menilai Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi.

a. Kontribusi *Stakeholders*

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 8 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 20$ dan $SD_i = 4$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kontribusi *Stakeholders* yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 26. Kecenderungan Indikator Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 26$	13	24,07	Sangat Baik
2	$20 \leq X < 26$	41	75,93	Baik
3	$14 \leq X < 20$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 14$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

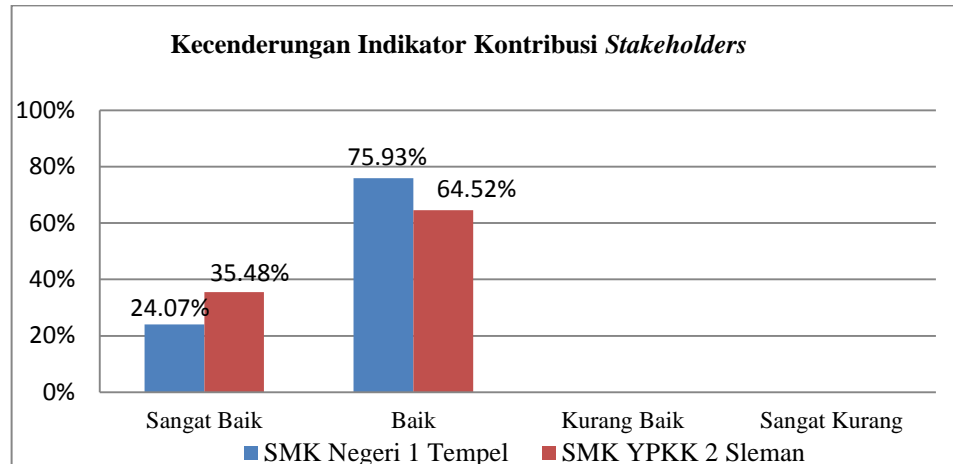
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 274 dan 299

Tabel 27. Kecenderungan Indikator Kontribusi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 26$	11	35,48	Sangat Baik
2	$20 \leq X < 26$	20	64,52	Baik
3	$14 \leq X < 20$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 14$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 285 dan 299

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori kecenderungan indikator Kontribusi *Stakeholders* sebagai berikut:



Gambar 11. Kecenderungan Indikator Kontribusi *Stakeholders*

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 13 responden (24,07) menilai bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 41 responden (75,93%) menilai Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa kontribusi dari wali murid berupa dukungan dana terkadang masih mengalami kendala, dimana wali murid terkadang masih belum bisa menyelesaikan kewajibannya saat jatuh tempo pembayaran, walaupun biaya pendidikan yang ditetapkan sekolah negeri lebih murah daripada sekolah swasta.

Dalam rapat dengan sekolah, *stakeholders* baik pemerintah maupun komite pro aktif memberikan saran yang membangun kepada sekolah terkait dengan program sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan. Kontribusi *stakeholders* dari dukungan tenaga dapat terlihat dari keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah, misalnya adalah pemerintah menjadi pembicara dalam kegiatan sekolah dan memberikan penyuluhan kepada sekolah. Selain itu, pemerintah juga sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru di SMK Negeri 1 Tempel.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kontribusi *Stakeholders*, dapat diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 20 responden (64,52%) menilai Kontribusi *Stakeholders* SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa kontribusi *stakeholders* berupa dukungan pembiayaan, memberikan kesempatan lowongan dan sebagainya. Hanya saja dukungan dana dari wali murid saat jatuh tempo yang diberikan kurang lebih 30% masih belum bisa melunasi kewajibannya. Sedangkan kontribusi *stakeholders*

dari segi pemikiran sudah baik, pemerintah maupun komite memberikan saran yang membangun terkait dengan program sekolah. Kontribusi *stakeholders* dari dukungan tenaga, misalnya adalah melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam program sekolah.

b. Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 28. Kecenderungan Indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	32	59,26	Sangat tinggi
2	$10 \leq X < 13$	22	40,74	Tinggi
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Rendah
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		54	100	

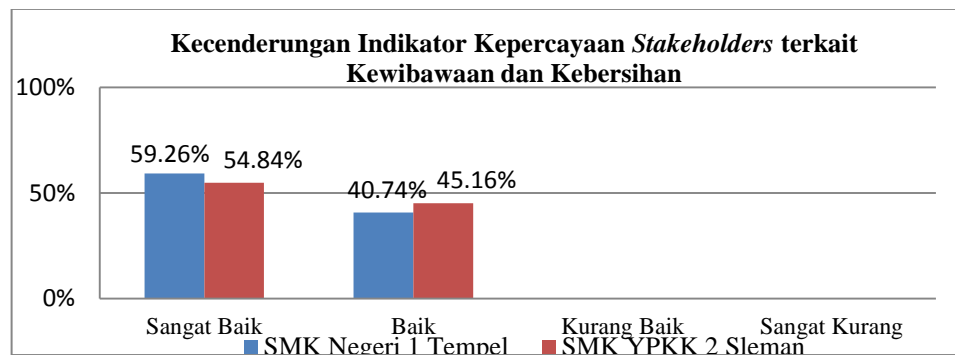
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 274 dan 300

Tabel 29. Kecenderungan Indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	17	54,84	Sangat tinggi
2	$10 \leq X < 13$	14	45,16	Tinggi
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Rendah
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 286 dan 300

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan sebagai berikut:



Gambar 12. Kecenderungan Indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 32 responden (59,26) menilai bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 22 responden (40,74%) menilai Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa *stakeholders* percaya kepada sekolah. Misalnya adalah saat dilakukannya rapat dengan walimurid dimana tidak terdapat protes maupun keberatan yang diterima pihak sekolah dari rapat tersebut. *Stakeholders* patuh pada setiap kebijakan yang dibuat oleh sekolah.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan, dapat diketahui bahwa 17 responden (45,16%) menilai bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi, dan 14 responden (54,84%) menilai Kepercayaan

Stakeholders terkait kewibawaan dan kebersihan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa *stakeholders* percaya bahwa sekolah telah bersih dalam menjalankan kegiatan kependidikan karena *stakeholders* sendiri yang mengalami bahwa sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan dengan terbuka. *Stakeholders* menghormati dan patuh pada setiap kebijakan yang dibuat sekolah dan belum pernah terjadi protes yang menyebabkan hilangnya kepercayaan *stakeholders* pada sekolah.

c. Tanggung Jawab *Stakeholders*

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Tanggungjawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Tanggungjawab Stakeholders yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Tanggungjawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 30. Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	16	29,63	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	38	70,37	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

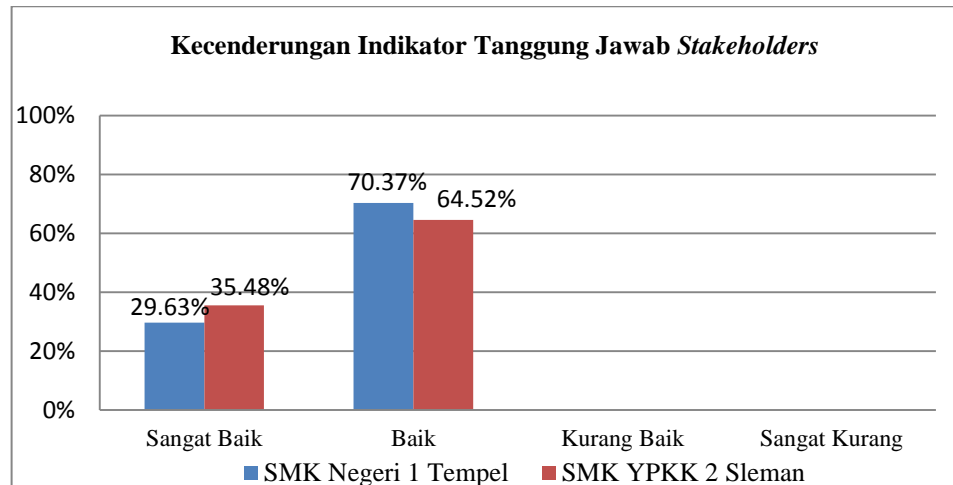
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 274 dan 300

Tabel 31. Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	11	35,48	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	20	64,52	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 286 dan 300

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Tanggungjawab *Stakeholders* sebagai berikut:



Gambar 13. Diagram Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab *Stakeholders*

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 16 responden (29,63%) menilai bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 38 responden (70,37%) menilai Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa *stakeholders* telah bertanggungjawab dengan sekolah karena *stakeholders* telah menjalankan

fungsi dan perannya dengan baik, misalnya pemerintah telah memberikan masukan yang bermanfaat kepada sekolah, DUDI menjalankan tugas sesuai dengan MoU, komite aktif memberikan saran kepada sekolah.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Tanggung Jawab *Stakeholders*, dapat diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 20 responden (64,52%) menilai Tanggung Jawab *Stakeholders* SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa *stakeholders* memiliki tanggung jawab kepada sekolah, hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, wali murid, DUDI dan pihak terkait lainnya.

d. Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders*

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum

dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 32. Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	22	40,74	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	32	59,26	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

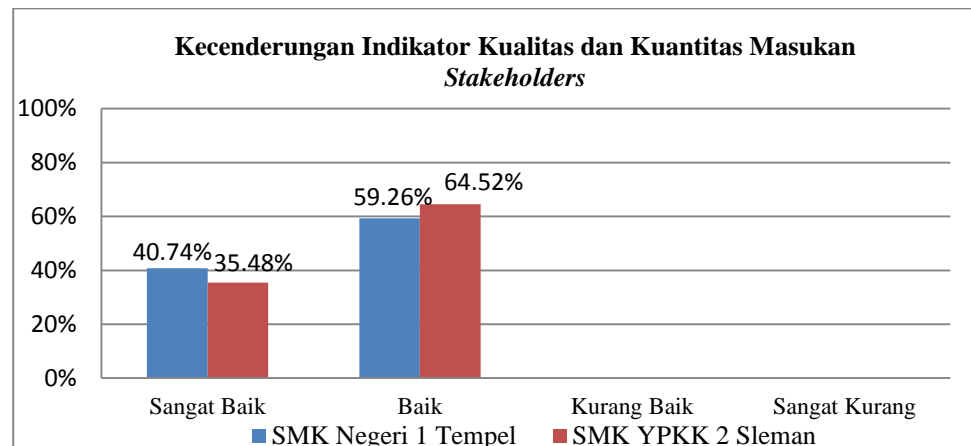
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 275 dan 301

Tabel 33. Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	11	35,48	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	20	64,52	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 286 dan 301

Berdasarkan table tersebut maka dapat digambarkan diagram sebagai berikut:



Gambar 14. Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders*

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 16 responden (40,74) menilai bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 38 responden (59,26%) menilai Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga

dapat disimpulkan bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa masukan dari *stakeholders* diterima saat dilakukannya rapat atau pertemuan. Baik pemerintah, DUDI, ataupun wali murid aktif memberikan saran. Jumlah masukan dari *stakeholders* bervariasi setiap tahun, jika program sekolah dinilai masih perlu dipertimbangkan, maka *stakeholders* akan memberikan banyak saran kepada sekolah agar program sekolah bisa lebih matang. Jika dilihat dari kualitas masukan yang diterima, dari pemerintah maupun komite sekolah memberikan masukan yang bermanfaat. Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders*, dapat diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 20 responden (64,52%) menilai Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa

saran dan masukan dari *stakeholders* akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Jumlah masukan yang diterima sekolah dari *stakeholders* tidak sama setiap tahun tergantung dari kualitas program sekolah, jika program sudah baik, maka masukan *stakeholders* akan lebih sedikit. Dilihat dari kualitasnya, pemerintah dan komite memberikan saran yang bermanfaat bagi sekolah dan akan dijadikan evaluasi untuk keputusan yang akan diambil selanjutnya.

e. Kepedulian *Stakeholders*

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kepedulian *Stakeholders* yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang.

Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 34. Kecenderungan Indikator Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	9	16,67	Sangat tinggi
2	$7,5 \leq X < 9,75$	45	83,33	Tinggi
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Rendah
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		54	100	

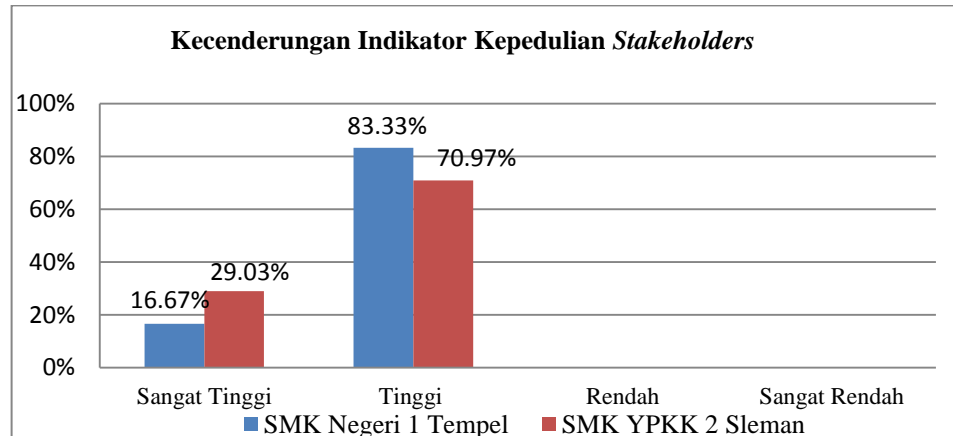
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 275 dan 302

Tabel 35. Kecenderungan Indikator Kepedulian *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	9	29,03	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	22	70,97	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 287 dan 302

Berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan diagram Kecenderungan Indikator Kepedulian *Stakeholders* sebagai berikut:



Gambar 15. Kecenderungan Indikator Kepedulian *Stakeholders*

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 9 responden (16,67) menilai bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 45 responden (83,33%) menilai Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan diketahui bahwa kepedulian *stakeholders* secara umum sudah cukup bagus, begitu pula kepedulian dengan siswa juga lumayan tinggi. Misalnya adalah keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah pada hari raya Idul Adha, bakti sosial dan sebagainya.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kepedulian *Stakeholders*, dapat diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai

bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi, dan 22 responden (70,97%) menilai Kepedulian *Stakeholders* SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa *stakeholders* peduli dengan sekolah. Misalnya adalah pemerintah membantu sekolah menyediakan dana dalam bentuk BOS, rehabilitasi sekolah, bantuan gedung dan lainnya, serta keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah seperti khitanan massal dan bakti sosial.

f. Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders*

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 36. Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	7	12,96	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	47	87,04	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

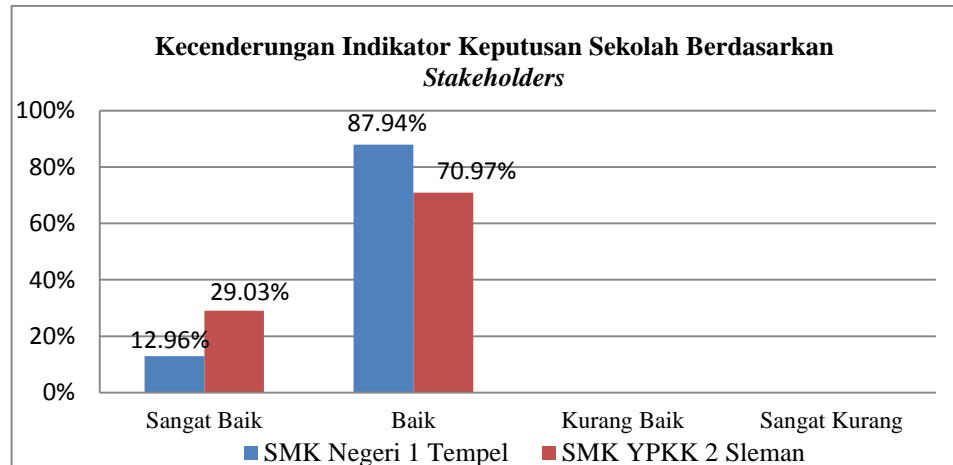
Sumber: Data primer yang diolah pada halaman 275 dan 302

Tabel 37. Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	9	29,03	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	22	70,97	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 287 dan 302

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* sebagai berikut:



Gambar 16. Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders*

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa 7 responden (12,96%) menilai bahwa Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 47 responden (87,04%) menilai Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis konten permasalahannya, apabila keputusan menyangkut program sekolah yang melibatkan warga sekolah, maka keputusan dibuat melalui musyawarah untuk mufakat, dimana aspirasi dari *stakeholders* akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders*, dapat diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai bahwa Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 22 responden (70,97%) menilai Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan diketahui bahwa pengambilan keputusan sekolah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat bersama dengan *stakeholders*.

4. Keterbukaan

Keterbukaan/transparansi sekolah adalah keadaan dimana setiap orang yang terkait dengan kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berorientasi pada pelayanan publik, sehingga keterbukaan sekolah dalam hal ini juga perlu diketahui oleh publik selaku *stakeholders*. Keterbukaan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan keyakinan dan kepercayaan publik, meningkatnya partisipasi, bertambahnya wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan sekolah, berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Data diperoleh melalui penyebaran angket dan wawancara dengan WKS Kesiswaan, WKS Kurikulum, dan WKS Kurikulum SMK Negeri 1 Tempel, kepala sekolah, WKS Kurikulum dan WKS Kesiswaan SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 12 butir pernyataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 30$ dan $SD_i = 6$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan variabel Keterbukaan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 38. Kecenderungan Variabel Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecebderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 48,75$	25	46,3	Sangat Baik
2	$37,5 \leq X < 48,75$	29	53,7	Baik
3	$26,25 \leq X < 30$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 26,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 269 dan 292

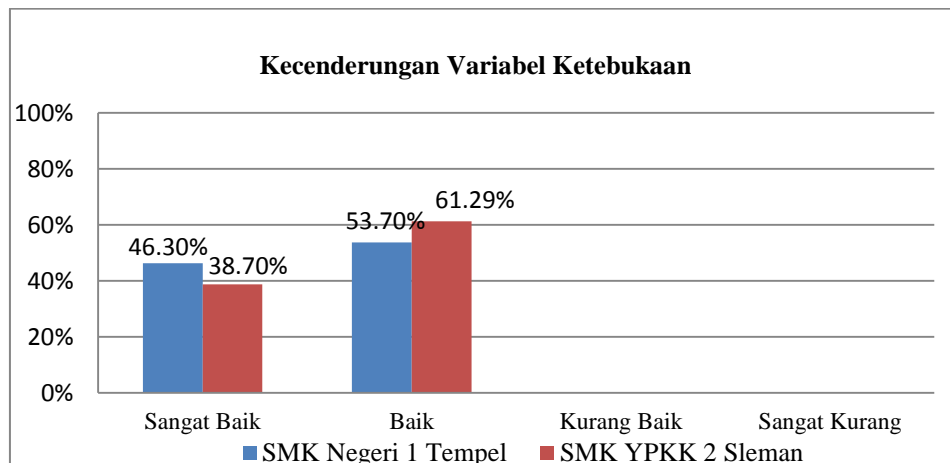
Tabel 39. Kecenderungan Variabel Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecebderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 48,75$	12	38,71	Sangat Baik
2	$37,5 \leq X < 48,75$	19	61,29	Baik
3	$26,25 \leq X < 30$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 26,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 281 dan 292

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori

Kecenderungan Variabel Keterbukaan sebagai berikut:



Gambar 17. Kecenderungan Variabel Keterbukaan

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Keterbukaan, dapat diketahui bahwa 25 responden (46,30%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 29 responden (53,70%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Keterbukaan, dapat diketahui bahwa 12 responden (38,71%) menilai bahwa Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 19 responden (61,29%) menilai Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

a. Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 12,5$ dan $SD_i =$

2,33. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 40. Kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 15,85$	27	50	Sangat Tinggi
2	$12,5 \leq X < 15,85$	27	50	Tinggi
3	$9,15 \leq X < 12,5$	0	0	Rendah
4	$X \leq 9,15$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		54	100	

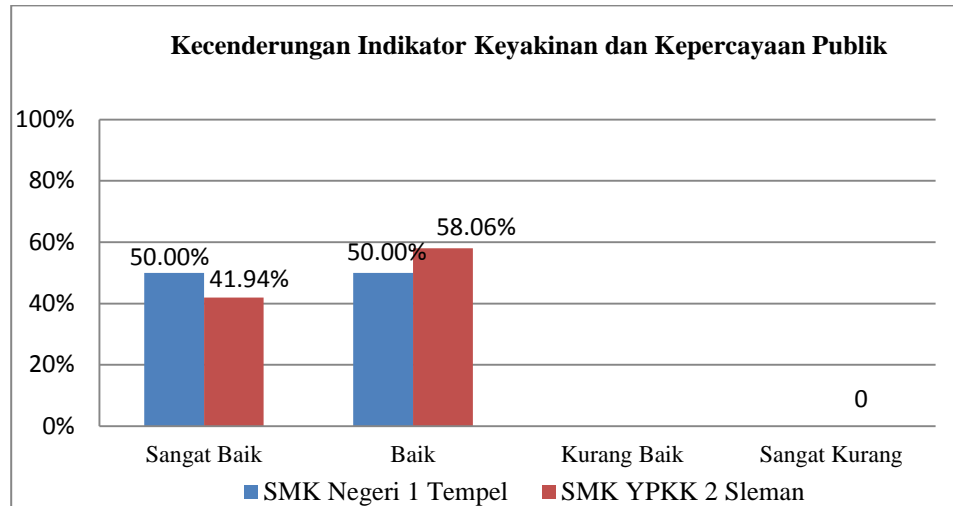
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 276 dan 303

Tabel 41. Kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 15,85$	13	41,94	Sangat tinggi
2	$12,5 \leq X < 15,85$	18	58,06	Tinggi
3	$9,15 \leq X < 12,5$	0	0	Rendah
4	$X \leq 9,15$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 288 dan 303

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik:



Gambar 18. Kecenderungan Indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dapat diketahui bahwa 27 responden (50%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 27 responden (50%) menilai indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam dua kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa sekolah terbuka kepada *stakeholders* baik dari segi keuangan maupun informasi. *Stakeholders* menyampaikan keterbukaan keuangan kepada *stakeholders* melalui rapat, sedangkan kepada pemerintah keuangan sekolah disampaikan melalui website yang dibuat pemerintah. Keterbukaan informasi sekolah ditunjukkan melalui papan informasi, *website* sekolah, maupun media lainnya.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Keyakinan dan Kepercayaan Publik, dapat diketahui bahwa 13 responden (41,94%) menilai bahwa Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 18 responden (58,06%) menilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa publik percaya bahwa sekola sudah terbuka karena sekola tidak pernah menyembunyikan laporan atau rahasia lainnya. Keterbukaan sekolah dapat dilihat dari segi keuangan dan informasi. Dari segi kuangan sekolah menyampaikan pertanggungjawaban melalui rapat kepada *stakeholders*, pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui *website* yang ditunjuk pemerintah, kemudian sekolah melakukan upload data keuangan sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Keterbukaan informasi disampaikan sekolah melalui papan informasi sekolah maupun informasi langsung saat rapat sekolah. *Website* sekolah tidak update dalam memberikan informasi kepada publik, karena sekolah belum memiliki teknisi khusus untuk mengelola *website*.

b. Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 42. Kecenderungan Indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	14	25,93	Sangat tinggi
2	$7,5 \leq X < 9,75$	39	72,22	Tinggi
3	$5,25 \leq X < 7,5$	1	1,85	Rendah
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		54	100	

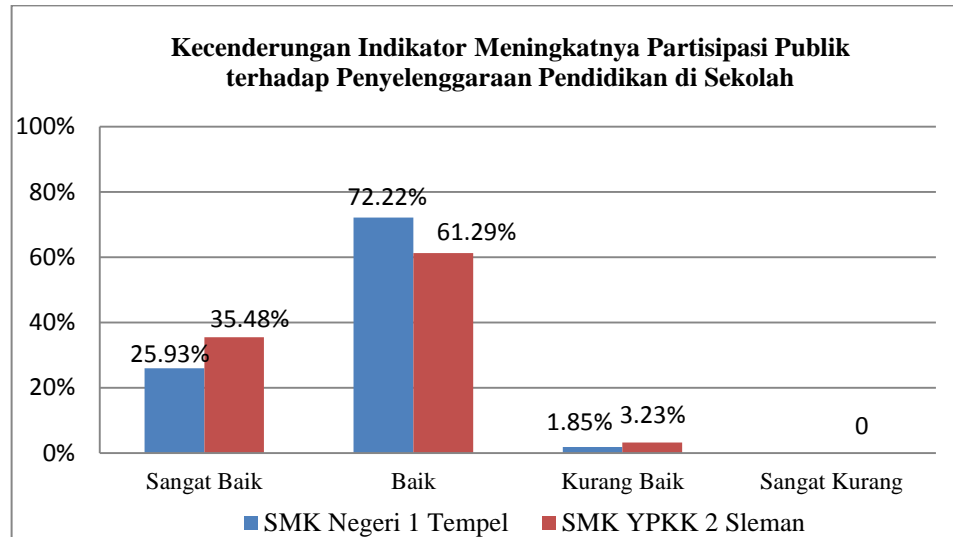
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 276 dan 304

Tabel 43. Kecenderungan Indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	11	35,48	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	19	61,29	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	1	3,23	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 288 dan 304

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram Kecenderungan Indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah sebagai berikut:



Gambar 19. Kecenderungan Indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, dapat diketahui bahwa 14 responden (29,63%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 39 responden (72,22%) menilai dalam kategori tinggi, dan 1 responden (1,85%) menilai Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah dalam kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa peningkatan partisipasi publik dari segi pemikiran/ide secara umum sudah baik. Hanya saja partisipasi dari segi dukungan dana dari wali murid yang setiap tahunnya

terdapat kendala, karena sering terdapat wali murid yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya saat waktu yang ditentukan.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, dapat diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai bahwa Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi, 19 responden (61,29%) menilai Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi dan 1 responden (3,23%) menilai Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa peningkatan partisipasi publik meningkat, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya sekolah karena masukan dan dukungan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan fasilitas pembelajaran dan peningkatan prestasi siswa. Namun, masih terdapat kendala dari dukungan dana wali murid, karena masih terdapat wali murid

yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

c. Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 44. Kecenderungan Indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	14	25,93	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	39	72,22	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	1	1,85	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

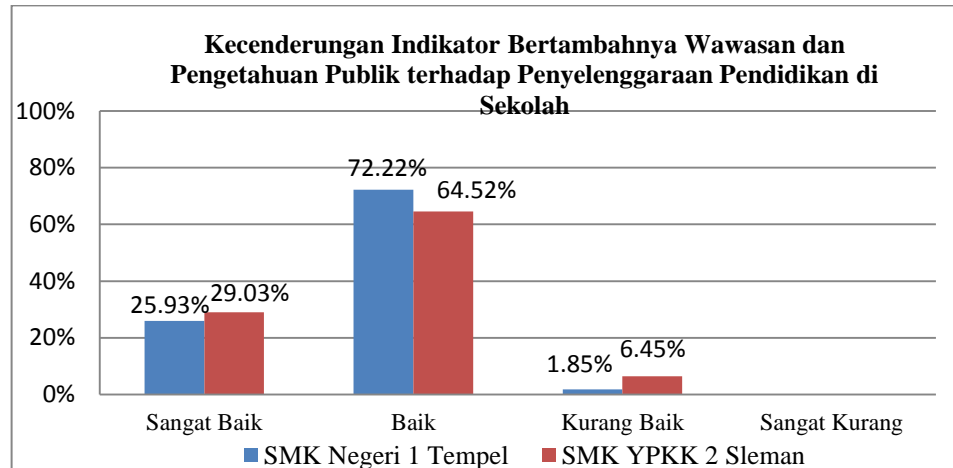
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 277 dan 304

Tabel 45. Kecenderungan Indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	9	29,03	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	20	64,52	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	2	6,45	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 288 dan 304

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah sebagai berikut:



Gambar 20. Kecenderungan Indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, dapat diketahui bahwa 14 responden (25,93%) menilai bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 39 responden (72,22%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik, dan, 1 responden (1,85%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan kurikulum, diketahui bahwa program-program sekolah yang melibatkan publik, akan meningkatkan pengetahuan tentang program sekolah tersebut. Program sekolah tersebut misalnya adalah bakti sosial, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Program-program sekolah tersebut mengenalkan bahwa sekolah tidak hanya lembaga yang bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah, dapat diketahui bahwa 9 responden (38,71%) menilai bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 20 responden (61,29%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik, dan 2 responden (6,45%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa pengetahuan publik meningkat dalam program sekolah, karena publik terlibat dalam program sekolah. Misalnya sekolah menyelenggarakan khitanan massal untuk umum, bakti sosial, dan lain sebagainya. Melalui program sekolah tersebut, tidak hanya manfaat secara materiil yang diterima publik, tetapi juga manfaat dari segi pengetahuan terhadap program sekolah.

d. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang Undangan

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 46. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	30	55,56	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	24	44,44	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

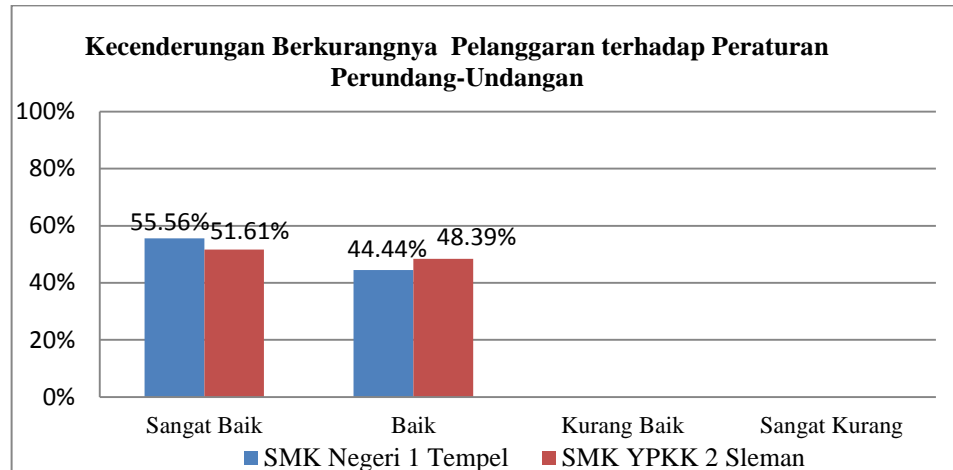
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 277 dan 305

Tabel 47. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	16	51,61	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	15	48,39	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 288 dan 305

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:



Gambar 21. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan gambar kecenderungan indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan, dapat diketahui bahwa 30 responden (55,56%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 24 responden (44,44%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Jadi disimpulkan bahwa Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa belum pernah terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan, dapat diketahui

bahwa 16 responden (51,61%) menilai bahwa Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 15 responden (48,39%) menilai Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa belum pernah terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sekolah perlu memberikan pertanggungjawaban terkait dengan proses dan hasil dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertanggungjawaban sekolah dapat dilihat dari adanya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah, kesadaran publik untuk menilai pendidikan di sekolah, berkurangnya kasus KKN di sekolah, kesesuaian kegiatan sekolah dengan nilai dan norma. Data diperoleh melalui penyebaran angket yang terdiri dari 15 butir pernyataan dan wawancara

dengan wakil kepala kepala sekolah kesiswaan SMK Negeri 1 Tempel, kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah kesiswaan SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 15 butir pernyataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh skor $M_i = 37,5$ dan $SD_i = 7,5$. Data tersebut, kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan variabel Kerjasama yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat rendah. Berikut merupakan kategori kecenderungan variabel Kerjasama di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 48. Kecenderungan Variabel Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecebdderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 48,75$	34	62,96	Sangat Baik
2	$37,5 \leq X < 48,75$	20	37,04	Baik
3	$26,25 \leq X < 37,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 26,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

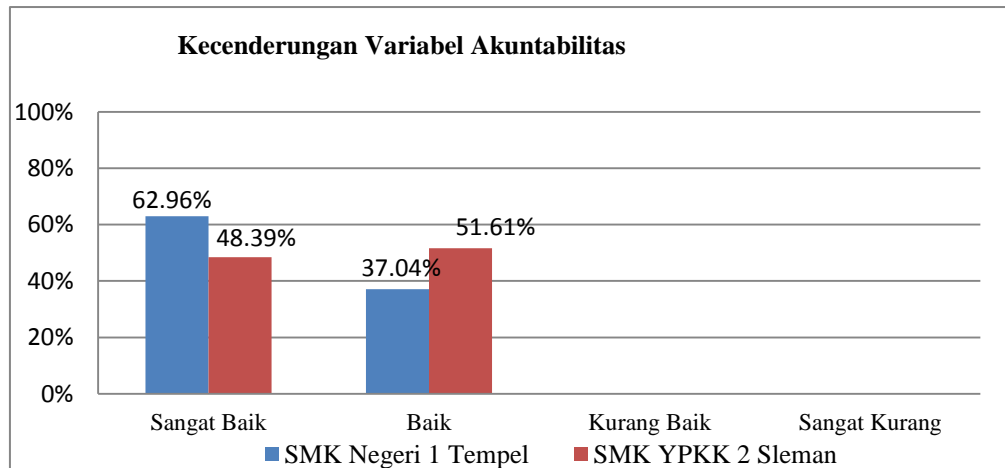
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 269 dan 293

Tabel 49. Kecenderungan Variabel Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 48,75$	15	48,39	Sangat Baik
2	$37,5 \leq X < 48,75$	16	51,61	Baik
3	$26,25 \leq X < 37,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 26,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 281 dan 293

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram Kecenderungan Variabel Akuntabilitas sebagai berikut:



Gambar 22. Kecenderungan Variabel Akuntabilitas

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Akuntabilitas, dapat diketahui bahwa 34 responden (62,96%) menilai bahwa Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 20 responden (37,04%) menilai Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan gambar kategori kecenderungan variabel Akuntabilitas, dapat diketahui bahwa 15 responden (48,39%) menilai bahwa Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 16 responden (51,61%) menilai Akuntabilitas di

SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Slemanl dalam kategori baik.

a. Kepercayaan dan Kepuasan Publik

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 50. Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	15	27,78	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	39	72,22	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

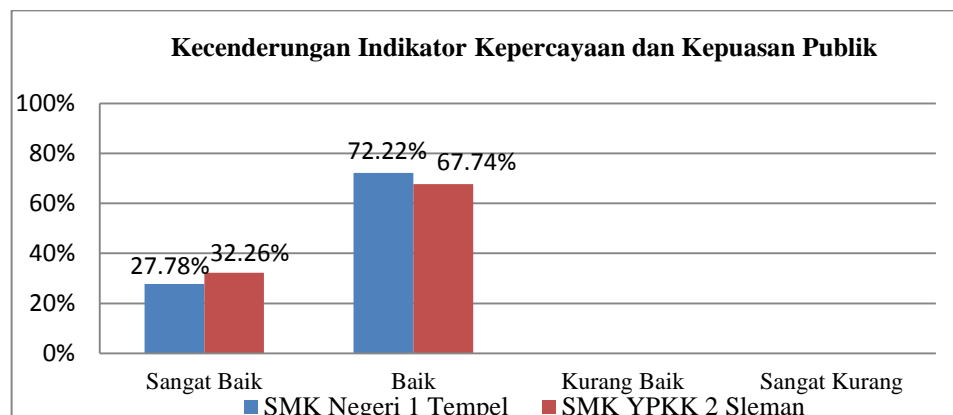
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 278 dan 306

Tabel 51. Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	10	32,26	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	21	67,74	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 289 dan 306

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kecenderungan indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik sebagai berikut:



Gambar 23. Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik, dapat diketahui bahwa 15 responden (27,78%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 39 responden (72,22%) menilai di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara, diketahui bahwa Kepercayaan dan kepuasan publik pada sekolah sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan animo yang tinggi calon siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Tempel. Selain itu, sekolah memiliki prestasi yang baik ditingkat kabupaten dan provinsi. Misalnya adalah saat ujian nasional, dimana SMKN 1 Tempel selalu meraih peringkat tiga besar tingkat kabupaten, dan peringkat 10 besar tingkat provinsi.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik, dapat diketahui bahwa 10 responden (32,26%) menilai bahwa Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 21 responden (67,74%) menilai Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa publik sudah puas dan percaya kepada sekolah karena lulusan SMK YPKK 2 Sleman setelah lulus mayoritas langsung mendapatkan pekerjaan.

b. Kesadaran Publik untuk Menilai

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kesadaran Publik untuk Menilai yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 52. Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	9	16,67	Sangat tinggi
2	$10 \leq X < 13$	45	83,33	Tinggi
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Rendah
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat rendah
Jumlah		54	100	

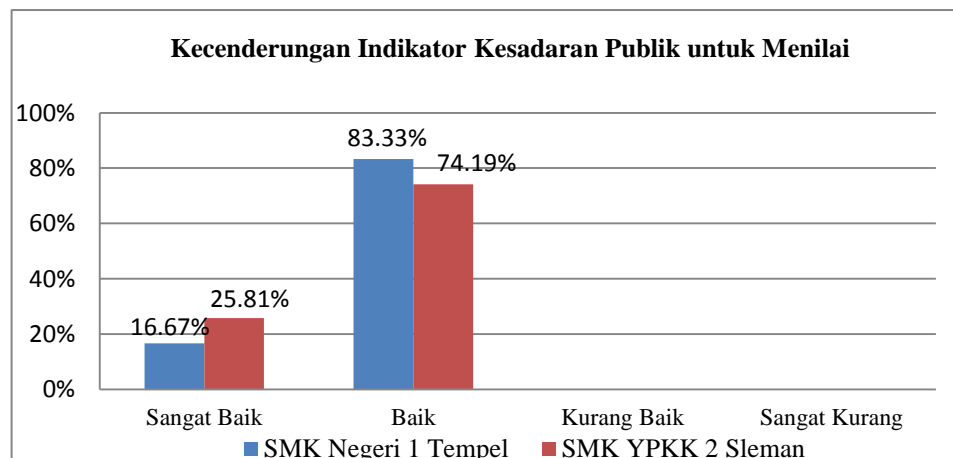
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 278 dan 306

Tabel 53. Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	8	25,81	Sangat Baik
2	$10 \leq X < 13$	23	74,19	Baik
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		31	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 289 dan 306

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori Kecenderungan indikator Kesadaran Publik untuk Menilai sebagai berikut:



Gambar 24. Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kesadaran Publik untuk Menilai, dapat diketahui bahwa 9 responden (16,67%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, dan 45 responden (83,337%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan wks kesiswaan dan wks Kurikulum, diketahui bahwa kesadaran publik untuk menilai penyelenggaraan pendidikan sudah cukup bagus, karena publik sudah berani mengutarakan pendapatnya ketika tidak mengerti dan memberikan penilaian pada program sekolah.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kesadaran Publik untuk Menilai, dapat diketahui bahwa 8 responden (25,81%) menilai bahwa Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 23 responden (74,19%) menilai Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa kesadaran publik untuk menilai penyelenggaraan pendidikan sudah baik,

hal ini dapat ditunjukkan pada saat rapat, publik aktif dan diskusinya hidup.

c. Berkurangnya Kasus KKN

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 3 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 7,5$ dan $SD_i = 1,5$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Kasus KKN yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 54. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	25	46,3	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	29	53,7	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

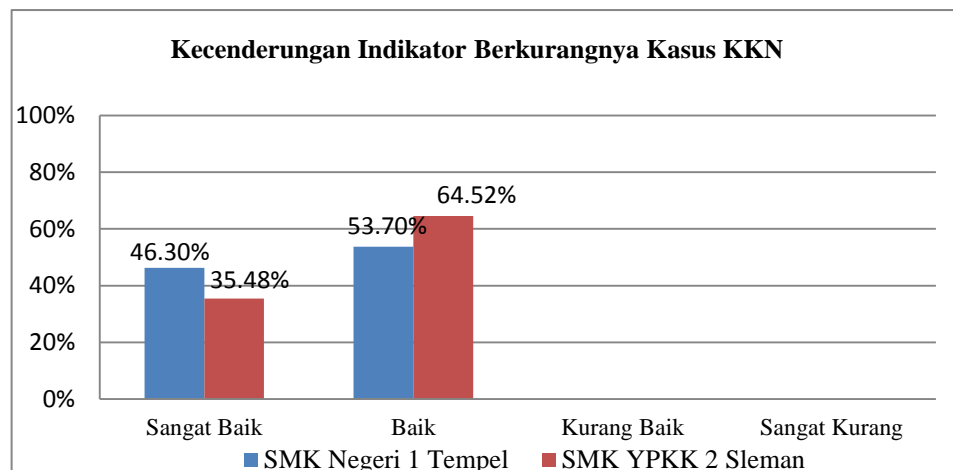
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 278 dan 307

Tabel 55. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 9,75$	11	35,48	Sangat Baik
2	$7,5 \leq X < 9,75$	20	64,52	Baik
3	$5,25 \leq X < 7,5$	0	0	Kurang Baik
4	$X \leq 5,25$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 290 dan 307

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Kasus KKN sebagai berikut:



Gambar 25. Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Kasus KKN, dapat diketahui bahwa 25 responden (46,30%) menilai bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 29 responden (53,70%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan WKS Kesiswaan, WKS Kurikulum, dan WKS Sarana Prasarana diketahui bahwa belum ditemukan kasus KKN, misalnya saat rekrutmen pegawai, sekolah telah menjalankannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Berkurangnya Kasus KKN, dapat diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai bahwa Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, dan 20 responden (64,52%) menilai Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa belum pernah terdapat kasus KKN, sekolah tidak pernah menerima suap, dan melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur.

d. Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma

Pada indikator ini, digunakan untuk mengetahui Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Data ini diperoleh melalui angket dan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum dan wakil kepala sekolah sarana prasarana SMK Negeri 1 Tempel serta wawancara langsung dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan di SMK YPKK 2 Sleman.

Data diperoleh dari angket yang terdiri dari 4 butir pernyataan. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh data skor $M_i = 10$ dan $SD_i = 2$. Data tersebut kemudian digolongkan ke dalam kategori kecenderungan indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma yang disusun dalam 4 kategori yang terdiri dari sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang. Berikut merupakan kategori kecenderungan indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 56. Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Normadi SMK Negeri 1 Tempel

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	39	72,22	Sangat sesuai
2	$10 \leq X < 13$	15	27,78	Sesuai
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Sesuai
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

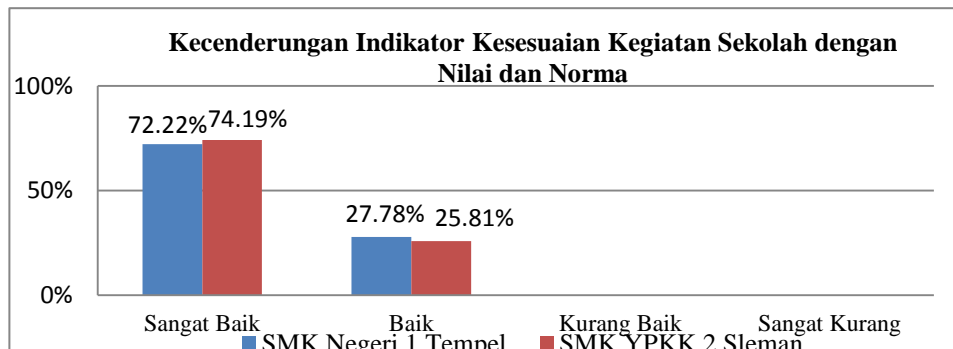
Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 279 dan 308

Tabel 57. Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma

No.	Rentang	Frekuensi		Kategori Kecenderungan
		Absolut	Relatif (%)	
1	$X \geq 13$	23	74,19	Sangat sesuai
2	$10 \leq X < 13$	8	25,81	Sesuai
3	$7 \leq X < 10$	0	0	Kurang Sesuai
4	$X \leq 7$	0	0	Sangat Kurang
Jumlah		54	100	

Sumber : Data primer yang diolah pada halaman 290 dan 308

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat digambarkan diagram kategori kecenderungan indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma sebagai berikut:



Gambar 26. Kategori Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 39 responden (72,22%) menilai Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 15 responden (27,78%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan diketahui bahwa kegiatan sekolah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku masyarakat. Sekolah memiliki program yang terkait dengan nilai tersebut, misalnya bakti sosial, Idul Adha, penggalangan dana dan lain sebagainya.

Berdasarkan gambar kategori kecenderungan indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma, dapat diketahui bahwa 23 responden (74,19%) menilai bahwa Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, dan 8 responden (25,81%) menilai Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa kegiatan sekolah sudah sesuai dengan nilai dan norma. Misalnya adalah sekolah memiliki program bakti sosial, khitanan massal, sholat dhuha untuk meningkatkan keagamaan, dan lain sebagainya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kemandirian

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengategorikan kecenderungan Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 30 responden (55,56%) menilai Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 24 responden (44,44%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 18 responden (58,06%) menilai Kemandirian di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 13 responden (41,94%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berikut merupakan ringkasan hasil wawancara perbedaan Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman:

Tabel 58. Ringkasan Perbedaan Implementasi Kemandirian

Perbedaan	SMK Negeri 1 Tempel	SMK YPKK 2 Sleman
Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas sumber pendanaan berasal dari Pemerintah. 2. Sarana prasarana untuk kegiatan pembelajaran terpenuhi, namun masih perlu penambahan fasilitas pembelajaran berupa LCD di beberapa ruang kelas. 3. SDM sudah memadai, namun perlu mempersiapkan pengganti beberapa tenaga kependidikan karena adayang akan segera pensiun. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas pendanaan berasal dari walimurid. 2. Sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran sudah terpenuhi, namun sekolah memiliki kekurangan lahan untuk parkir siswa. 3. SDM sudah memadai namun sekolah masih kekurangan tenaga ahli untuk mengelola sarana dan prasarana.
Kualitas Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. 24 dari 57 pendidik memiliki pendidikan tingkat S2. 2. Lebih dari 50% memiliki sertifikat pendidik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 3 dari 42 pendidik memiliki pendidikan tingkat S2. 2. Kurang dari 50% memiliki sertifikat pendidik.
Kepemimpinan Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tegas dalam memimpin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang tegas dalam memimpin

a) Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa terdapat 26 responden (48,15%) menilai Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 28 responden (51,85%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat

kurang. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK YPKK 2 Sleman diketahui bahwa terdapat 23 responden (74,19%) menilai Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, 8 responden (25,81%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan dilihat dari sumber daya manusia pada tahun 2017/2018 secara kuantitas sudah terpenuhi. Sekolah memiliki 57 tenaga pendidik dan 15 tenaga kependidikan. Jika dilihat dari kualifikasinya, terdapat 32 guru yang bergelar sarjana, 24 guru yang bergelar S2 dan hanya 1 guru dengan pendidikan Diploma. Selain itu, terdapat 45 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Adapun untuk tenaga kependidikan, dilihat dari kualifikasinya terdapat 1 orang bergelar sarjana, 3 orang yang bergelar diploma, dan 11 orang dengan pendidikan SMA/SMK. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan sudah memenuhi kualifikasinya. Namun berdasarkan wawancara diketahui bahwa Kepala Tata Usaha di SMK Negeri 1 Tempel memiliki pendidikan terakhir SMA. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMK YPKK 2 Sleman secara kuantitas sudah terpenuhi,

terdiri dari 42 orang guru dan 11 orang tenaga kependidikan. Jika dilihat dari kualifikasinya terdiri dari 3 guru yang berpendidikan tingkat S2, 38 guru S1, dan 1 guru tamatan SMA. Selain itu, terdapat 17 guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Adapun untuk tenaga kependidikan terdiri dari 2 orang dengan pendidikan S1, 9 orang tingkat SMA, dan 2 orang tingkat SMP. Namun berdasarkan wawancara diketahui bahwa kepala tata usaha di SMK YPKK 2 Sleman memiliki pendidikan tingkat SMA.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa di SMK Negeri 1 Tempel secara keseluruhan tenaga pendidik sudah terpenuhi kualifikasi pendidikannya dan hanya satu yang belum terpenuhi. Sama halnya dengan SMK Negeri 1 Tempel, di SMK YPKK 2 Sleman secara keseluruhan tenaga pendidik sudah terpenuhi kualifikasi pendidikannya dan hanya satu yang belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru menyatakan bahwa guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sedangkan untuk tenaga kependidikan, baik di SMK Negeri 1 Tempel maupun SMK YPKK 2 Sleman secara keseluruhan sudah sesuai dengan kualifikasi. Namun untuk kepala tenaga tata usaha masih belum memenuhi kualifikasi sesuai yang

ditentukan pada permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah/madrasah yang menyatakan bahwa kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi pendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal empat tahun, atau D3 yang sederajat, program studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 8 tahun.

Jika ditinjau dari sarana dan prasarana, di SMK Negeri 1 Tempel kelengkapan sarana dan prasarana sekolah sudah sesuai dengan standar minimal yang ditetapkan pemerintah melalui Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Dalam melakukan kegiatan pembelajaran sekolah memiliki 21 ruang kelas, 1 ruang perpustakaan, 3 ruang laboratorium, dan ruang praktik siswa. Selain untuk kegiatan pembelajaran, sekolah juga memiliki ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, tempat ibadah dan lain-lain. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa fasilitas pembelajaran berupa LCD/Proyektor masih ada beberapa kelas yang belum terpenuhi. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman kelengkapan sarana dan prasarana sudah sesuai dengan standar minimal yang di tetapkan pemerintah melalui Permendiknas nomor 40 tahun 2008. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki 18 ruang kelas, ruang perpustakaan, dan ruang laboratorium. Selain untuk kegiatan pembelajaran, sekolah memiliki

ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, tempat ibadah dan lain-lain. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan baik, namun sekolah masih memiliki kendala dalam ketersediaan lahan untuk parkir siswa dan juga lapangan olah raga yang berada terpisah dengan sekolah.

Jika ditinjau dari pendanaan sekolah, SMK Negeri 1 Tempel menggunakan pendanaan dari unit usaha sekolah dan *stakeholders*, yang meliputi pemerintah, wali murid, komite sekolah, dan lembaga serta perusahaan yang bersedia menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah. Dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, mayoritas pendanaan dalam program sekolah menggunakan dana dari pemerintah. Lebih lanjut diketahui bahwa dana dari pemerintah sudah mencukupi untuk penyelenggaraan kegiatan, dan apabila masih kurang, sekolah menghimpun dana dari wali murid. Sama halnya dengan SMK Negeri 1 Tempel, SMK YPKK 2 Sleman, dalam menyelenggarakan program, menggunakan dana dari unit usaha sekolah dan *stakeholders*. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun terdapat perbedaan dalam proporsi dana yang dimiliki kedua sekolah tersebut

dimana SMK YPKK 2 Sleman lebih banyak menghimpun dana dari wali murid sedangkan di SMK Negeri 1 Tempel mayoritas pendanaan program menggunakan dana dari pemerintah.

b) Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 28 responden (51,85%) menilai Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 26 responden (48,15%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Berdasarkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMK Negeri 1 Tempel, dapat diketahui bahwa kinerja sumber daya manusia (guru dan tenaga kependidikan) sudah berjalan dengan baik dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan secara tepat waktu. Pengelolaan sumber daya lainnya terdiri dari pendanaan juga sudah baik, dimana sekolah sudah menggunakan dana yang diterima dari pemerintah untuk program-program sekolah, apabila dana dari pemerintah masih kurang, sekolah menghimpun dana dari wali murid. Sarana dan prasarana telah dikelola dengan baik oleh warga sekolah, dan sekolah juga memiliki teknisi untuk mengelola sarana prasarana tersebut.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman diketahui bahwa terdapat 18 responden (58,06%) menilai Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, 13 responden (41,94%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa kinerja guru dan tenaga kependidikan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan lagi, karena kegiatan administrasi belum sepenuhnya maksimal, karena beberapa guru belum tertib dalam pengumpulan kegiatan administrasinya. Dari pengelolaan sarana dan prasarana, bagian yang memiliki tugas tersebut, belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tapi masih bisa diatasi dengan mendatangkan tenaga dari luar sekolah. Sedangkan jika dilihat dari pendanaan, sekolah mampu mengelola dana yang digunakan untuk kegiatan sekolah dan mampu menyisihkan 10% dari setiap dana kegiatan yang dianggarkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa di SMK Negeri 1 Tempel kemampuan sumber daya manusia di SMK Negeri

1 Tempel dilihat dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya penggunaan sarana dan prasarana serta juga pendanaan sudah berjalan dengan sangat baik. Sama halnya dengan SMK Negeri 1 Tempel, di SMK YPKK 2 Sleman kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan sumber daya manusia sudah berjalan dengan sangat baik, dan hanya beberapa saja yang kurang maksimal terkait dengan ketertiban beberapa guru dan kurangnya tenaga pengelola sarana prasarana. Hal ini menunjukan bahwa kedua sekolah tersebut memiliki sumber daya yang memadai dalam kegiatan sekolah. Menurut Wibowo (2013:178) sekolah yang menerapkan MPMBS harus memiliki tingkat kesiapan sumber daya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikannya. Artinya, segala sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumber daya yang ada harus mahal, akan tetapi sekolah yang bersangkutan dapat memanfaatkan keberadaan sumber daya yang ada dilingkungan sekolahnya.

c) Kemampuan Manajemen

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa terdapat 29 responden (53,7%) menilai Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 25 responden (46,3%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden

yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, secara umum kemampuan manajemen sekolah sudah baik, misalnya pada manajemen kurikulum dan manajemen layanan khusus, sekolah telah menggunakan kurikulum sesuai dengan instruksi dari pemerintah. Pada tahun ajaran 2017/2018 sekolah menggunakan 3 kurikulum untuk kelas X,XI, dan XII yang terdiri dari kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan kurikulum 2013 revisi. Sedangkan manajemen layanan khusus seperti UKS, Koperasi dan lainnya sudah berjalan dengan baik, dimana sekolah juga melibatkan siswa dalam pengelolaannya.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman diketahui bahwa terdapat 20 responden (64,52%) menilai Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, 11 responden (35,48%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Manajemen di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa kemampuan manajemen secara umum sudah berjalan baik, manajemen kesiswaan tidak terdapat kendala, tetapi secara pengelolaan tergantung situasi. Dilihat dari

manajemen kurikulum, kurikulum yang digunakan di SMK YPKK 2 Sleman pada tahun ajaran 2017/2018 adalah KTSP dan Kurikulum 2013. manajemen pelayanan khusus telah berjalan dengan baik dimana siswa juga terlibat dalam pengelolaannya, misalnya pada UKS, dan *business center*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman memiliki Kemampuan manajemen yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan manajemen kurikulum, dimana kedua sekolah mampu melaksanakan kurikulum sesuai dengan peraturan pemerintah. Selain itu, kedua sekolah juga mampu mengelola unit layanan khusus yang ada disekolah.

d) Kemampuan Kepemimpinan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa terdapat 27 responden (50%) menilai Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 27 responden (50%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam dua kategori, yaitu sangat baik dan baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dilihat dari sisi Kepemimpinan sudah baik.

Kepala sekolah tegas dalam memimpin dengan menerapkan aturan-aturan yang disiplin pada warga sekolah. Selain itu, dalam penyelenggaraan program sekolah, kepala sekolah mampu menjalin kerjasama yang kompak, dan membentuk *teamwork* yang baik dengan setiap warga sekolah yang terlibat dalam program sekolah.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman diketahui bahwa terdapat 14 responden (45,16%) menilai Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, 17 responden (54,84%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Kepemimpinan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa kepemimpinan kepala sekolah secara sosial sudah baik, artinya kepala sekolah mampu menjalin hubungan yang baik dan dan mampu menjalin kerjasama dengan warga sekolah maupun *stakeholders*. Namun, berdasarkan penuturan wakil kepala sekolah dapat diketahui bahwa kepala sekolah masih belum tegas dalam menyampaikan teguran kepada warga sekolah yang melanggar aturan.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman memiliki

kemampuan kepemimpinan yang baik, namun terdapat perbedaan dalam ketegasan kepala sekolah di kedua sekolah tersebut, dimana kepala sekolah SMK YPKK 2 Sleman masih belum tegas. Namun, secara keseluruhan kedua kepala sekolah telah menjaankan kepemimpinan dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian H.B Sindju (2013) yang menyatakan bahwa sebagai manajer, kepala sekolah berhasil menerapkan MBS di SMK Negeri 3 Singkawang.

e. Kemampuan Administrasi

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa terdapat 21 responden (38,89%) menilai Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 33 responden (61,11%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekola kesiswaan, diketahui bahwa guru telah menjalankan kegiatan administrasinya menyusun silabus, RPP, dan perangkat pembelajaran lainnya dengan tertib. Sedangkan tenaga kependidikan juga telah menyusun kegiatan administrasi sesuai tugasnya, yang terdiri administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi persuratan,

administrasi kesiswaan, administrasi hubungan masyarakat, dan kegiatan administrasi lainnya.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman diketahui bahwa terdapat 13 responden (41,94%) menilai Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik, 18 responden (58,064%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa guru telah melaksanakan kegiatan administrasi dengan menyusun silabus RPP dan perangkat pembelajaran lainnya. Tenaga kependidikan juga telah menyusun kegiatan administrasi sesuai tugasnya, yang terdiri administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, administrasi persuratan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan masyarakat, dan kegiatan administrasi lainnya.

Berdasarkan hasil tersebut, di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman telah memiliki kemampuan administrasi yang baik, dimana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan telah menyusun administrasi sesuai dengan tugasnya. Hal ini sejalan dengan penelitian

Resti Sulistianingrum (2014) yang menyatakan bahwa pelaksanaan administrasi pendidikan di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok sudah bisa dikatakan efektif dan berhasil. Administrasi pendidikan di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok dimana segala aktivitas guru dan staf tata usaha berjalan lancar sesuai dengan kedudukan, fungsi dan kewajiban setiap guru dan staf pelaku pelaksana administrasi pendidikan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tatang (2015) yang menyatakan bahwa MBS ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan yang diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu dan efisiensi kinerja sekolah. Karakteristik MBS bisa diketahui dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi.

Berdasarkan kelima indikator tersebut maka dapat diperoleh beberapa perbedaan terkait dengan implementasi prinsip kemandirian MBS. Pertama bila dilihat dari kesanggupan pemenuhan kebutuhan, kedua sekolah sanggup memenuhi kebutuhannya, namun kebutuhan pendanaan SMK Negeri 1 Tempel mayoritas bersumber dari pemerintah, sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman mayoritas pendanaan bersumber dari wali murid. Kedua, kemampuan sumber daya manusia bila dilihat dari kualifikasi pendidikan serta jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat, SMK Negeri 1 Tempel memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan SMK YPKK 2 Sleman. SMK Negeri 1 Tempel memiliki tenaga pendidik yang bergelar S2 lebih banyak serta tenaga

pendidik yang memiliki sertifikat profesi lebih banyak dibandingkan SMK YPKK 2 Sleman. Ketiga, bila dilihat dari kemampuan kepemimpinan, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tempel tegas dalam menerapkan peraturan pada warga sekolah, sedangkan Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman masih belum tegas menerapkan peraturan kepada warga sekolah.

2. Kemitraan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 41 responden (75,93%) menilai Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 13 responden (24,07%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 19 responden (61,29%) menilai Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 12 responden (38,71%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berikut merupakan ringkasan perbedaan Implementasi Kemitraan di kedua sekolah:

Tabel . Ringkasan Perbedaan Implementasi Kemitraan

Perbedaan	SMK Negeri 1 Tempel	SMK YPKK 2 Sleman
Kemitraan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan antar guru dan antar tenaga kependidikan berjalan dengan kompak. 2. Kemitraan antara guru dan siswa berjalan dengan baik, terwujud dari pembelajaran dikelas yang efektif, dimana siswa memperhatikan saat guru menjelaskan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan antar guru dan antar tenaga kependidikan berjalan dengan kompak, namun ada beberapa guru yang terkadang kurang peduli dengan kegiatan sekolah. 2. Kemitraan antara guru dan siswa berjalan dengan baik namun hampir sebagian siswa terkadang tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan.
Kemitraan Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah menjalin Kemitraan dengan Pemerintah, DUDI, masyarakat, komite, lembaga perguruan tinggi dan lembaga relevan lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah menjalin Kemitraan dengan Pemerintah, DUDI, masyarakat, komite, yayasan, lembaga perguruan tinggi dan lembaga relevan lainnya

a) Kemitraan Internal

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 39 responden (72,22%) menilai Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 15 responden (27,78%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Internal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik.

Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa telah terjalin Kemitraan yang baik antar guru, jurusan, dan siswa. Kemitraan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan terlihat dari rapat rutin sekolah, koordinasi yang baik dalam program sekolah yang melibatkan keduanya, dan kekompakan dalam menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Kemitraan antara guru dan siswa terwujud dalam terciptanya pembelajaran yang efektif disekolah, dimana siswa selalu memperhatikan guru saat pelajaran. Selain itu, sekolah memiliki forum silaturahmi untuk mempererat hubungan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 17 responden (54,84%) menilai Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 14 responden (45,16%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Internal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, dan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa Kemitraan warga sekolah telah berjalan dengan baik, hal ini terwujud dalam kegiatan rapat rutin yang dilakukan sekolah, Kemitraan yang kompak dalam program sekolah dan terlaksananya tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tugasnya. Selain itu, saat terdapat permasalahan sekolah,

masing-masing saling berbagi satu sama lain. Namun terkadang ada beberapa tenaga pendidik yang kurang peduli dengan kegiatan sekolah. Kemitraan antar guru dan siswa tercipta melalui kegiatan pembelajaran dikelas, walaupun masih sering terdapat siswa yang kurang memperhatikan saat pembelajaran.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman telah terjalin Kemitraan internal dengan sangat baik dimana kedua sekolah mampu menjalin Kemitraan yang kompak antar warga sekolah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi (2011:136) yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil angket Kemitraan internal di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik. Data ini dikuatkan dengan pernyataan dari wakil kepala sekolah yang menyatakan bahwa Kemitraan internal sekolah berjalan dengan baik, terlihat dari adanya *teamwork* berupa unit-unit kelompok kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis dalam pelaksanaan program sekolah, pelaksanaan kegiatan piket dan kegiatan rapat antar warga sekolah yang baik.

b) Kemitraan Eksternal

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 42 responden (77,78%) menilai Kemitraan Eksternal di SMK

Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 12 responden (22,22%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa, sekolah telah menjalin Kemitraan dengan pemerintah terkait dengan anggaran pendidikan, Kemitraan dengan DUDI untuk melakukan prakerin dan uji kompetensi serta penyaluran tenaga kerja, lembaga perguruan tinggi untuk melakukan prakerin, komite terkait dengan penyelenggaraan program sekolah. Selain itu, terdapat kendala dimana linearitas jurusan akuntansi saat melakukan prakerin masih belum sepenuhnya linear dengan bidang pekerjaan saat prakerin.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 21 responden (67,74%) menilai Kemitraan Eksternal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 10 responden (32,26%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kemitraan Eksternal di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa sekolah telah menjalin Kemitraan yang baik dengan pemerintah misalnya terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah,

dengan DUDI untuk kegiatan prakerin, uji kompetensi, dan penyaluran tenaga kerja. Komite sekolah misalnya adalah terkait dengan program sekolah, dan lembaga lainnya. Di SMK YPKK 2 Sleman juga terdapat kendala terkait dengan linearitas jurusan akuntansi saat prakerin, hal ini disebabkan oleh data keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, sehingga siswa tidak dapat ditempatkan dibidang keuangan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman telah terjalin Kemitraan Eksternal dengan sangat baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alfian Alfarisi (2011) yang menyatakan bahwa Kemitraan Eksternal di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kategori baik. Hal ini menandakan Kemitraan antara sekolah dan pihak terkait lainnya telah berlangsung dengan baik. Kemitraan dalam pelaksanaan program sekolah dilakukan dengan pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan kedua indikator tersebut maka dapat diketahui bahwa kedua sekolah memiliki Kemitraan internal yang sangat baik, namun berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa Kemitraan internal dan eksternal di SMK Negeri 1 Tempel lebih baik bila dibandingkan dengan SMK YPKK 2 Sleman. Perbedaannya dalam hal ini SMK Negeri 1 Tempel memiliki Kemitraan internal yang kompak dan saling peduli, sedangkan SMK YPKK 2 Sleman ada beberapa yang terkadang kurang peduli dengan kegiatan sekolah

dan terkadang hampir sebagian siswa kurang memperhatikan saat guru menjelaskan.

3. Partisipasi

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 16 responden (29,63%) menilai Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 38 responden (70,37%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 22 responden (70,97%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berikut merupakan ringkasan perbedaan Implementasi Partisipasi di kedua sekolah:

Tabel 60. Ringkasan Perbedaan Implementasi Partisipasi

Perbedaan	SMK Negeri 1 Tempel	SMK YPKK 2 Sleman
Partisipasi dari Pemerintah	Memperoleh lebih banyak kesempatan pelatihan kepada guru.	Kesempatan pelatihan yang diberikan lebih sedikit dibandingkan sekolah negeri.
Partisipasi dari wali murid.	Mayoritas sudah tertib dan memiliki kesadaran menjalankan kewajiban pembayarannya karena biaya sekolah yang terjangkau.	Masih cukup banyak yang belum memiliki kesadaran untuk melunasi kewajibannya pada saat batas waktu yang ditentukan.

a) **Kontribusi *Stakeholders***

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 13 responden (24,07%) menilai Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 41 responden (75,93%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa kontribusi dari wali murid berupa dukungan dana mayoritas sudah terpenuhi karena wali murid tertib dalam pembayaran biaya pendidikan. Dalam rapat dengan sekolah, *stakeholders* baik pemerintah maupun komite pro aktif memberikan saran yang membangun kepada sekolah terkait dengan program sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, pemerintah sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru di SMK Negeri 1 Tempel. Pelatihan tersebut misalnya adalah pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran, pelatihan penulisan karya ilmiah, pengembangan kurikulum, pembuatan media pembelajaran kreatif dan sebagainya. Kontribusi *stakeholders* dari dukungan tenaga dapat terlihat dari keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah, misalnya adalah pemerintah menjadi pembicara dalam kegiatan sekolah dan memberikan penyuluhan kepada sekolah.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai Kontribusi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 20 responden (64,52%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontribusi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa kontribusi *stakeholders* berupa dukungan pembiayaan, memberikan kesempatan lowongan dan sebagainya. Hanya saja dukungan dana dari wali murid saat jatuh tempo yang diberikan kurang lebih 30% masih belum bisa melunasi kewajibannya. Sedangkan kontribusi *stakeholders* dari segi pemikiran sudah baik, pemerintah maupun komite memberikan saran yang membangun terkait dengan

program sekolah dan memberikan kesempatan pelatihan kepada guru walaupun tidak sering seperti sekolah negeri. Kontribusi *stakeholders* dari dukungan tenaga, misalnya adalah melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam program sekolah.

Dari hasil tersebut dapat diketahui kontribusi *stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Alfian Alfarisi (2011) yang menyatakan bahwa partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan dana pada kategori baik, partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan material/fasilitas pada kategori cukup baik, dan partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan program sekolah berupa dukungan pemikiran pada kategori baik.

b) Kepercayaan *Stakeholders* terkait kewibawaan dan kebersihan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 32 responden (59,26%) menilai Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 22 responden (40,74%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada

responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa *stakeholders* percaya kepada sekolah. Misalnya adalah saat dilakukannya rapat dengan walimurid dimana tidak terdapat protes maupun keberatan yang diterima pihak sekolah dari rapat tersebut. *Stakeholders* patuh pada setiap kebijakan yang dibuat oleh sekolah.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 17 responden (54,84%) menilai Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 14 responden (45,16%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa *stakeholders* percaya bahwa sekolah telah bersih dalam menjalankan kegiatan pendidikan karena *stakeholders* sendiri yang mengalami bahwa sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan dengan terbuka. *Stakeholders* menghormati dan patuh pada

setiap kebijakan yang dibuat sekolah dan belum pernah terjadi protes yang menyebabkan hilangnya kepercayaan *stakeholders* pada sekolah.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa *stakeholders* kedua sekolah memiliki kepercayaan kepada sekolah. hal ini ditunjukkan pada saat rapat dengan wali murid tidak terdapat protes maupun keberatan terhadap sekolah.

c) **Tanggung Jawab *Stakeholders***

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 16 responden (29,63%) menilai Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 38 responden (70,37%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa *stakeholders* telah bertanggungjawab dengan sekolah karena *stakeholders* telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, misalnya pemerintah telah memberikan masukan yang bermanfaat kepada sekolah, DUDI menjalankan tugas sesuai dengan MoU, komite aktif memberikan saran kepada sekolah.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 20 responden (64,52%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa *stakeholders* memiliki tanggung jawab kepada sekolah, hal ini dapat dilihat dari bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah, wali murid, DUDI dan pihak terkait lainnya.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa *stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel maupun SMK YPKK 2 Sleman memiliki tanggung jawab yang baik pada sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nurkolis (2005: 133) yang menyatakan bahwa salah satu strategi implementasi MBS akan berhasil adalah semua pihak harus memahami peran dan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.

d) Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders*

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 22 responden (40,74%) menilai Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam

kategori sangat baik, 32 responden (59,26%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden diketahui bahwa masukan dari *stakeholders* diterima saat dilakukannya rapat atau pertemuan. Baik pemerintah, DUDI, ataupun wali murid aktif memberikan saran. Jumlah masukan dari *stakeholders* bervariasi setiap tahun, jika program sekolah dinilai masih perlu dipertimbangkan, maka *stakeholders* akan memberikan banyak saran kepada sekolah agar program sekolah bisa lebih matang. Jika dilihat dari kualitas masukan yang diterima, dari pemerintah maupun komite sekolah memberikan masukan yang bermanfaat dan akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 20 responden (64,52%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik.

Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa saran dan masukan dari *stakeholders* akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Jumlah masukan yang diterima sekolah dari *stakeholders* tidak sama setiap tahun tergantung dari kualitas program sekolah, jika program sudah baik, maka masukan *stakeholders* akan lebih sedikit. Dilihat dari kualitasnya, pemerintah dan komite memberikan saran yang bermanfaat bagi sekolah dan akan dijadikan evaluasi untuk keputusan yang akan diambil selanjutnya.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas masukan *stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suparlan (2015: 53) yang menyatakan bahwa MBS memberikan keterbukaan kepada semua pemangku kepentingan dalam memberikan saran dan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan penting yang diperlukan oleh sekolah. Dengan demikian, aspirasi dari semua pemangku kepentingan sangat dihargai untuk menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga pendidikan sekolah.

e) Kepedulian *Stakeholders*

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 tempel

diketahui bahwa 9 responden (16,67%) menilai Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 45 responden (83,33%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan diketahui bahwa kepedulian *stakeholders* secara umum sudah cukup bagus, begitu pula kepedulian dengan siswa juga lumayan tinggi. Misalnya adalah keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah pada hari raya Idul Adha, bakti sosial dan sebagainya.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai Kepedulian *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 22 responden (70,97%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepedulian *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum, diketahui bahwa *stakeholders* peduli dengan sekolah. Misalnya adalah pemerintah membantu sekolah menyediakan dana dalam bentuk BOS, rehabilitasi sekolah, bantuan gedung dan lainnya, serta

keterlibatan *stakeholders* dalam program sekolah seperti khitanan massal dan bakti sosial.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman memiliki kepedulian yang tinggi pada sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wibowo (2013:168) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan MPMBS adalah untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama.

f) Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi *Stakeholders*

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 7 responden (12,96%) menilai Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 47 responden (87,04%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa pengambilan keputusan dilakukan dengan menganalisis konten permasalahannya, apabila keputusan menyangkut program sekolah yang melibatkan warga sekolah, maka keputusan dibuat melalui musyawarah

untuk mufakat, dimana aspirasi dari *stakeholders* akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 22 responden (70,97%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden, diketahui bahwa pengambilan keputusan sekolah mayoritas dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat bersama dengan internal sekolah maupun *stakeholders*.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman keputusan sekolah dibuat berdasarkan aspirasi dari *stakeholders*. Hal ini sejalan dengan pernyataan Nurkholis (2005: 59) yang menyatakan bahwa dalam MBS gaya pengambilan keputusan pada tingkat sekolah adalah melalui pembagian kekuasaan atau partisipasi. Partisipasi atau keterlibatan guru, orang tua siswa adalah sumbangan yang penting. Partisipasi dalam pengambilan keputusan memberikan kesempatan kepada warga dan bahkan administrator untuk belajar dan

berkembang dan juga mengerti dalam pengelolaan sekolah. Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah proses untuk mendorong guru-guru, orang tua, dan siswa untuk terlibat di sekolah.

Berdasarkan keenam indikator tersebut, dapat diketahui perbedaan Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. SMK Negeri 1 Tempel memiliki dukungan partisipasi dari pemerintah yang lebih banyak dibandingkan dengan SMK YPKK 2 Sleman. Pemerintah sering memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru di SMKN 1 Tempel baik terkait dengan kegiatan pengembangan belajar maupun kegiatan pendidikan lainnya. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, pemerintah juga memberikan pelatihan namun tidak sesering sekolah negeri. Perbedaan lainnya terletak pada partisipasi dukungan dana dari wali murid dimana di SMK Negeri 1 Tempel mayoritas sudah tertib dan memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman masih banyak wali murid yang belum memiliki kesadaran untuk melunasi pembayaran biaya pendidikan sampai pada waktu yang telah ditentukan.

4. Keterbukaan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 25 responden (46,3%) menilai Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 29 responden (53,7%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat

kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 12 responden (38,71%) menilai Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 19 responden (61,29%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berikut merupakan ringkasan perbedaan Implementasi Keterbukaan:

Tabel 61. Ringkasan Perbedaan Implementasi Keterbukaan

Perbedaan	SMK Negeri 1 Tempel	SMK YPKK 2 Sleman
Keterbukaan Informasi	Memiliki <i>website</i> sekolah yang <i>update</i> yang berisi profil sekolah secara detail serta informasi berkaitan dengan kegiatan sekolah.	<i>Website</i> sekolah tidak <i>update</i> bahkan tidak aktif dalam memberikan informasi.

a) Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 27 responden (50%) menilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 27 responden (50%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi

dapat disimpulkan bahwa Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel berdasarkan penilaian berada dalam dua kategori, yaitu sangat tinggi dan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden, diketahui bahwa publik telah yakin dan percaya kepada karena sekolah telah terbuka kepada *stakeholders* baik dari segi keuangan maupun informasi. *Stakeholders* menyampaikan keterbukaan keuangan kepada *stakeholders* melalui rapat, sedangkan kepada pemerintah keuangan sekolah disampaikan melalui *website* yang dibuat pemerintah dan sekolah tinggal melakukan *upload* data keuangan. Keterbukaan informasi sekolah ditunjukkan melalui papan informasi, website sekolah, maupun media lainnya. Sekolah memiliki *website* yang *update* yang berisi profil sekolah maupun berita tentang kegiatan sekolah.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 13 responden (41,94%) menilai Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 18 responden (58,06%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa publik percaya bahwa sekola sudah terbuka karena sekolah tidak pernah menyembunyikan laporan atau hal yang bersifat rahasia lainnya. Keterbukaan sekolah dapat dilihat dari segi

keuangan dan informasi. Dari segi keuangan sekolah menyampaikan pertanggungjawaban melalui rapat kepada *stakeholders*, pertanggungjawaban kepada pemerintah melalui website yang ditunjuk pemerintah, kemudian sekolah melakukan upload data keuangan sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah. Keterbukaan informasi disampaikan sekolah melalui papan informasi sekolah maupun informasi langsung saat rapat sekolah. *Website* sekolah tidak *update* dalam memberikan informasi kepada publik, karena sekolah belum memiliki teknisi khusus untuk mengelola *website*.

Dari hasil tersebut, diketahui bahwa publik telah memiliki keyakinan dan kepercayaan yang tinggi terhadap keterbukaan/transparansi di SMK Negeri 1 Tempel maupun SMK YPKK 2 Sleman. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Novie Kiftiah Maries, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2017) yang menunjukkan bahwa penerapan transparansi yayasan Mardatillah sudah cukup baik ditunjukkan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yayasan. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan pernyataan Muhammad yang dikutip dalam Kompri (2017: 91) yang menyatakan bahwa transparansi ditunjukkan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan kepada sekolah bahwa sekolah adalah organisasi pelayanan pendidikan yang bersih dan berwibawa, bersih dalam arti tidak KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan berwibawa dalam arti

professional. Transparansi bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara sekolah dan publik melalui informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat.

b) Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 14 responden (25,93%) menilai Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 39 responden (72,22%) menilai dalam kategori tinggi, 1 responden (1,85%) dalam kategori rendah dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa peningkatan partisipasi publik dari segi pemikiran/ide secara umum sudah baik. Hanya saja partisipasi dari segi dukungan dana dari wali murid yang setiap tahunnya terdapat kendala, karena sering terdapat wali murid yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya saat waktu yang ditentukan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 19 responden (61,29%) menilai dalam kategori tinggi, 1 responden (3,23%) dalam kategori rendah dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa peningkatan partisipasi publik meningkat, hal ini dapat dilihat dari semakin baiknya sekolah karena masukan dan dukungan yang bermanfaat dari berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan fasilitas pembelajaran dan peningkatan prestasi siswa. Namun, masih terdapat kendala dari dukungan dana wali murid, karena masih terdapat wali murid yang belum bisa menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman terjadi peningkatan partisipasi publik yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wibowo (2013: 174) yang menyatakan bahwa sekolah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik

bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin besar rasa memiliki.

c) Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 14 responden (25,93%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 39 responden (72,22%) menilai dalam kategori baik, 1 responden (1,85%) dalam kategori kurang baik dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah kesiswaan, diketahui bahwa program program sekolah yang melibatkan publik, akan meningkatkan pengetahuan tentang program sekolah tersebut. Program sekolah tersebut misalnya adalah bakti sosial, hari raya Idul Adha, dan sebagainya. Program-program sekolah tersebut mengenalkan bahwa

sekolah tidak hanya lembaga yang bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 9 responden (29,03%) menilai Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik sedangkan 20 responden (64,52%) menilai dalam kategori baik, 2 responden (3,23%) dalam kategori kurang baik dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara responden diketahui bahwa pengetahuan publik meningkat dalam program sekolah, karena publik terlibat dalam program sekolah. Misalnya sekolah menyelenggarakan khitanan massal untuk umum, bakti sosial, dan lain sebagainya. Melalui program sekolah tersebut, tidak hanya manfaat secara materiil yang diterima publik, tetapi juga manfaat dari segi pengetahuan terhadap program sekolah.

d) Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-

Undangan di SMK Negeri 1 Tempel diketahui bahwa 30 responden (55,56%) menilai Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 24 responden (44,44%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan responden diketahui bahwa belum pernah terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 16 responden (51,61%) menilai Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 15 responden (48,39%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa belum pernah terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keempat indikator tersebut dapat diketahui perbedaan pelaksanaan keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, dimana SMK Negeri 1 Tempel memiliki keterbukaan informasi yang lebih baik karena SMKN 1 Tempel memiliki *website* sekolah yang memuat informasi lengkap terkait profil sekolah maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Sebaliknya, keterbukaan informasi di SMK YPKK 2 Sleman bila dilihat dari *website* sekolah, masih belum aktif, hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya yang mengelola.

5. Akuntabilitas

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Akuntabilitas di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 34 responden (62,93%) menilai Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 20 responden (37%,04) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 15 responden (48,39%) menilai Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 16 responden (51,61%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman dalam

kategori sangat baik. Berikut merupakan ringkasan perbedaan Implementasi Akuntabilitas:

Tabel 62. Ringkasan Perbedaan Implementasi Akuntabilitas

Perbedaan	SMK Negeri 1 Tempel	SMK YPKK 2 Sleman
Kepercayaan dan Kepuasan Publik	Ditunjukkan dengan animo yang tinggi calon siswa baru yang akan mendaftar. Kepuasan publik muncul karena prestasi yang diraih SMKN 1 Tempel baik ditingkat Kabupaten atau Provinsi.	Kepercayaan dan Kepuasan publik muncul karena mayoritas alumni SMK YPKK 2 Sleman setelah lulus dapat langsung memperoleh pekerjaan.
Pihak yang diberikan pertanggungjawaban oleh sekolah	Sekolah menyampaikan akuntabilitas melalui rapat/pertemuan dengan pemerintah, wali murid, komite, DUDI.	Sekolah menyampaikan akuntabilitas melalui rapat/pertemuan dengan pemerintah, wali murid, komite, DUDI, dan juga yayasan.

a) Kepercayaan dan Kepuasan Publik

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 15 responden (27,78%) menilai Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 39 responden (72,22%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara

dengan responden, diketahui bahwa Kepercayaan dan kepuasan publik pada sekolah sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan animo yang tinggi calon siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Tempel. Selain itu, sekolah memiliki prestasi yang baik ditingkat kabupaten dan provinsi. Misalnya adalah saat ujian nasional, dimana SMKN 1 Tempel selalu meraih peringkat tiga besar tingkat kabupaten, dan peringkat 10 besar tingkat provinsi.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 10 responden (32,26%) menilai Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 21 responden (67,74%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa publik sudah puas dan percaya kepada sekolah karena lulusan SMK YPKK 2 Sleman setelah lulus mayoritas langsung mendapatkan pekerjaan, dan masa tunggu lulusan hanyalah 0 bulan, karena sekolah selalu mendapat permintaan tenaga kerja dari DUDI.

Berdasarkan hasil analisis tersebut diketahui bahwa publik memiliki kepercayaan dan kepuasan yang tinggi terkait akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Wibowo (2013: 192) yang menyatakan bahwa, akuntabilitas yang baik akan menimbulkan kepercayaan masyarakat pada sekolah. Kepercayaan masyarakat yang timbul melalui akuntabilitas pendidikan, secara nyata akan memperbaiki citra sekolah sehingga sekolah lebih dikenal.

b) Kesadaran Publik untuk Menilai

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 9 responden (16,67%) menilai Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 45 responden (83,33%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori baik. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa kesadaran publik untuk menilai penyelenggaraan pendidikan sudah cukup bagus, karena publik sudah berani mengutarakan pendapatnya saat dilakukan pertemuan, dan sekolah berusaha menjelaskan.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 8 responden (25,81%) menilai Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 23 responden (74,19%) menilai dalam kategori tinggi,

dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa kesadaran publik untuk menilai penyelenggaraan pendidikan sudah baik, hal ini dapat ditunjukkan pada saat rapat, publik aktif dan diskusinya hidup.

c. Berkurangnya Kasus KKN

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengategorikan kecenderungan Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel, diketahui bahwa 25 responden (46,3%) menilai Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat tinggi, 29 responden (53,7%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel berada dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa belum ditemukan kasus KKN, misalnya saat rekrutmen pegawai, sekolah telah menjalankannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Sekolah tidak menerima suap maupun gratifikasi dalam bentuk apapun.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 11 responden (35,48%) menilai Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi

sedangkan 20 responden (64,52%) menilai dalam kategori tinggi, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori rendah dan sangat rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Berkurangnya Kasus KKN di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori tinggi. Berdasarkan wawancara dengan responden diketahui bahwa belum pernah terdapat kasus KKN, sekolah telah melakukan segala sesuatu sesuai prosedur, misalnya dalam hal perekrutan karyawan. Sselain itu sekolah tidak pernah menerima suap dalam hal apapun.

Dari hasil tersebut diketahui bahwa kasus KKN telah berkurang baik di SMK Negeri 1 Tempel maupun SMK YPKK 2 Sleman. Hal ini sejalan dengan pernyataan Wibowo (2013: 191) yang menyatakan bahwa paparan data dari akuntabilitas pendidikan, akan menjadi kabar baik yang diketahui masyarakat bahwa tidak semua sekolah melakukan korupsi, dan hanya sekolah tertentu yang tidak melakukan akuntabilitas pendidikan yang perlu dipertanyakan (dicurigai) kredibilitasnya.

d) Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma

Berdasarkan analisis deskriptif dengan mengkategorikan kecenderungan Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 tempel diketahui bahwa 39 responden (72,22%) menilai Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik, 15 responden (27,78%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori

kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah kesiswaan diketahui bahwa kegiatan sekolah sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku masyarakat. Sekolah memiliki program yang terkait dengan nilai tersebut, misalnya bakti sosial, Idul Adha, penggalangan dana dan lain sebagainya.

Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa 23 responden (74,19%) menilai Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat tinggi sedangkan 8 responden (25,81%) menilai dalam kategori baik, dan tidak ada responden yang menilai dalam kategori kurang baik dan sangat kurang. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK YPKK 2 Sleman dalam kategori sangat baik. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, dan wakil kepala sekolah kurikulum diketahui bahwa kegiatan sekolah sudah sesuai dengan nilai dan norma. Misalnya adalah sekolah memiliki program bakti sosial, khitanan massal, sholat dhuha untuk meningkatkan keagamaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan sekolah sudah sangat sesuai dengan nilai dan norma. Hal ini sejalan dengan

pernyataan Nurkolis (2005: 201) yang menyatakan bahwa dalam MBS dituntut adanya perubahan budaya organisasi yang diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan, karena aspek budaya memiliki peran yang cukup penting dalam mencapai mutu berkelanjutan. Budaya organisasi adalah kerangka kerja yang disadari terdiri dari sikap-sikap, nilai-nilai, norma-norma, perilaku-perilaku, dan harapan diantara anggota organisasi.'

Berdasarkan keempat indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua sekolah telah menyampaikan akuntabilitasnya kepada warga sekolah dan publik. Sekolah menyampaikan akuntabilitas saat rapat dengan warga sekolah, komite, wali murid, dan pemerintah. Perbedaannya adalah SMK YPKK 2 Sleman juga menyampaikan akuntabilitas kepada yayasan. Selain itu, perbedaan lainnya dapat dilihat dari kepercayaan dan kepuasan publik dimana di SMK Negeri 1 Tempel publik percaya dan puas dengan sekolah hal ini dapat dilihat dari animo yang tinggi dari calon siswa baru yang mendaftar serta prestasi yang telah diraih oleh sekolah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman publik percaya dan puas dengan sekolah karena mayoritas lulusan SMK YPKK 2 Sleman dapat terserap di dunia kerja.

C. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dalam pengambilan data, diantaranya adalah:

1. Data wawancara di SMK Negei 1 Tempel berdasarkan 2 responden yaitu wakil kepala sekolah kesiswaan dan wakil kepala sekolah kurikulum. Peneliti tidak berhasil mewawancarai kepala sekolah dan wks sarana prasarana hingga batas waktu penelitian, karena kesibukan responden.
2. Beberapa indikator yaitu Kepercayaan *Stakeholders* terhadap Kewibawaan dan Kebersihan Sekolah, Keyakinan dan Kepercayaan Publik, Kepuasan dan Kepercayaan Publik, hanya diukur berdasarkan penilaian responden (guru dan tenaga kependidikan) bukan berdasarkan penilaian *stakeholders* maupun publik secara langsung.
3. Beberapa indikator yaitu Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya tidak didukung dengan data dokumen karena kesulitan peneliti dalam memperoleh data tersebut. Data indikator tersebut diperoleh melalui angket dan diperdalam melalui wawancara dengan responden.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Kepemimpinan Berbasis Sekolah secara keseluruhan dalam kategori sangat baik. Secara rinci, Implementasi Kepemimpinan Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kemampuan Kepemimpinan 48,15% dalam kategori baik, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya 51,85% dalam kategori sangat baik, Kemampuan Manajemen 53,7% dalam kategori sangat baik, Kemampuan Kepemimpinan 50% dalam kategori sangat baik dan 50% dalam kategori baik, Kemampuan Administrasi 61,11% dalam kategori baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, kemandirian juga dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kemampuan Kepemimpinan 74,19% dalam kategori sangat baik, Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya 58,06% dalam kategori sangat baik, Kemampuan Kepemimpinan 64,52% dalam kategori sangat baik, Kemampuan Kepemimpinan 45,16% dalam kategori baik, Kemampuan Administrasi 58,06% dalam kategori baik. SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman sanggup memenuhi kebutuhannya, tanpa selalu tergantung dengan

pemerintah maupun yayasan. Kedua sekolah memiliki kemampuan sumber daya yang baik, kemampuan manajemen, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan administrasi yang baik. Perbedaannya adalah pemenuhan kebutuhan pendanaan sekolah di SMKN 1 Tempel mayoritas berasal dari pemerintah, sedangkan SMK YPKK 2 Sleman mayoritas berasal dari wali murid. Perbedaan kemampuan di kedua sekolah terletak pada kualitas sumber daya manusia, dimana SMKN 1 Tempel memiliki tenaga pendidik yang bersertifikat lebih banyak dibandingkan SMK YPKK 2 Sleman.

2. Kemitraan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kemitraan Internal 72,22% dalam kategori sangat baik dan Kemitraan Eksternal 77,78% dalam kategori sangat baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, Kemitraan juga dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kemitraan Internal 54,84% dalam kategori sangat baik dan Kemitraan Eksternal 67,74% dalam kategori sangat baik. Kedua sekolah mampu menjalin Kemitraan yang baik antar warga sekolah serta pihak eksternal sekolah yang meliputi pemerintah, DUDI, komite, dan masyarakat.
3. Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Kontribusi *Stakeholders* 75,93% dalam kategori baik, Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan 59,26% dalam kategori sangat tinggi, Tanggung Jawab *Stakeholders* 70,37% dalam kategori baik, Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* 59,26% dalam kategori

baik, Kepedulian *Stakeholders* 83,33% dalam kategori tinggi dan Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* 87,04% dalam kategori baik. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, Partisipasi juga dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Kontribusi *Stakeholders* 64,52% dalam kategori baik, Kepercayaan *Stakeholders* terkait Kewibawaan dan Kebersihan 54,84% dalam kategori sangat tinggi, Tanggung Jawab *Stakeholders* 64,52% dalam kategori baik, Kualitas dan Kuantitas Masukan *Stakeholders* 64,52% dalam kategori baik, Kepedulian *Stakeholders* 70,97% dalam kategori tinggi dan Keputusan Sekolah berdasarkan Aspirasi *Stakeholders* 87,04% dalam kategori baik. *Stakeholders* kedua sekolah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan sekolah melalui dana, pemikiran maupun tenaga. *Stakeholders* percaya kepada sekolah, bertanggung jawab sesuai dengan perannya, memberikan masukan yang bermanfaat, peduli dengan sekolah, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Perbedaannya adalah SMKN 1 Tempel memiliki kesempatan pelatihan yang lebih banyak dari pemerintah dibanding SMK YPKK 2 Sleman, selain itu wali murid SMKN 1 Tempel memiliki kesadaran yang lebih baik.

4. Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan Keyakinan dan Kepercayaan Publik 50% dalam kategori sangat baik dan 50% dalam kategori baik, Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 72,22% dalam kategori tinggi, Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap

Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 72,22% dalam kategori baik, dan Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan 55,56% dalam kategori sangat tinggi. sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, Keterbukaan juga dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan Keyakinan dan Kepercayaan Publik 58,06% dalam kategori baik, Meningkatnya Partisipasi Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 61,21% dalam kategori tinggi, Bertambahnya Wawasan dan Pengetahuan Publik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah 64,52% dalam kategori baik, dan Berkurangnya Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan 51,61% dalam kategori sangat tinggi. Sekolah terbuka kepada publik dalam setiap kegiatan sekolah baik dari segi dana, informasi, maupun program sekolah, dimana sekolah menyampaikan keterbukaan melalui papan informasi, rapat, dan *website*. Perbedaannya adalah SMKN 1 Tempel memiliki *website* yang lebih update dibandingkan SMK YPKK 2 Sleman.

5. Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kepercayaan dan Kepuasan Publik 72,22% dalam kategori tinggi, Kesadaran Publik untuk Menilai 83,33% dalam kategori baik, Berkurangnya Kasus KKN 53,7% dalam kategori tinggi, Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma 72,22% dalam kategori sangat sesuai. Sedangkan di SMK YPKK 2 Sleman, akuntabilitas juga berada dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dengan Kepercayaan dan Kepuasan Publik 67,74% dalam kategori tinggi, Kesadaran Publik untuk Menilai 74,19% dalam

kategori baik, Berkurangnya Kasus KKN 64,52% dalam kategori tinggi, Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma 74,19% dalam kategori sangat sesuai. Sekolah menyampaikan pertanggungjawaban kepada pemerintah, walimurid, DUDI dan pihak lainya melalui rapat, maupun hal lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Publik percaya dan puas dengan akuntabilitas sekolah, mampu menilai akuntabilitas yang dilakukan sekolah. Sekolah tidak melaukkan praktik KKN. Kegiatan sekolah sesuai dengan nilai dan norma, misalnya adalah nilai budaya, nilai religious dan norma hukum.

B. Implikasi

Dengan diketahuinya implementasi manajemen berbasis sekolah yang terdiri dari kemandirian, Kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan prinsip manajemen berbasis sekolah yang masih belum maksimal dilihat dari indikator-indikator yang digunakan peneliti. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi implementasi prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

C. SARAN

Berdasarkan deskripsi data, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi SMK Negeri 1 Tempel, sekolah sebaiknya meningkatkan Kemitraan dengan DUDI terkait dengan bidang pekerjaan yang lebih sesuai dengan bidang studi siswa jurusan akuntansi. Selain itu, sekolah seharusnya segera mencari pengganti pegawai tata usaha yang akan pensiun, agar kegiatan administrasi sekolah dapat berjalan lancar.
2. Bagi SMK YPKK 2 Sleman, kepala sekolah sebaiknya memiliki ketegasan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena kepala sekolah memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Sekolah juga perlu meningkatkan linearitas bidang studi dengan bidang pekerjaan saat prakerin. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pendidik dengan mendorong guru yang belum bersertifikat pendidik untuk mengikuti sertifikasi profesi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi, Nur. (2015). *Dasar-Dasar Kepemimpinan Pendidikan*. Yogyakarta: Goshen Publishing.
- Alfarisi, M.Alfan. (2012). Implementasi Kepemimpinan Berbasis Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andang. (2014). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. (2015). *Penyusunan Skala Psikologi Edisi 2*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barlian, Ikbali. (2013). *Kepemimpinan Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Erlangga.
- Bush, Tony. (2011). *Theories of Educational Leadership and Management*. London : SAGE Publications
- Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar. (2013). *Panduan Replikasi Majamen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar*.
- Direktorat Tenaga Kependidikan. (2010). *Kepemimpinan Berbasis Sekolah (Materi Penguatan Pelatihan Kemampuan Sekolah)*
- Fattah, Nanang.. (2012). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hazrul Iswadi. (2016). Sekelumit Dari Hasil PISA yang Baru Dirilis. Diakses dari http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/230/Overview-of-the-PISA-2015-results-that-have-just-been-Released.html. Pada tanggal 19 Juli.
- Jimmy Rey Opong Cabardo .(2016). *Level of Participation of the School Stakeholders to the Different School-Initiated Activities and the Implementation of School-Based Management*. *Journal:Hagonoy National High School*

- Irene, Siti.. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari kbbi.web.id
- Mardapi, D. (2008). *Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes*. Yogyakarta: Mitra Cendekia
- Mulyasa. (2002). *Kepemimpinan Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurkolis. (2006). *Kepemimpinan Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Purnomo, Joko. (2014). Analisis Pengukuran Kinerja Kepemimpinan Berbasis Sekolah dengan Pendekatan Balanced Scorecard di SMK Negeri 6 Surakarta. *Tesis*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Setiawan, Edi. (2016). Implementasi Kepemimpinan Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri 1 Bantul. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Sulistianingrum, Resti. (2014). Implementasi Administrasi Pendidikan di SMK Ma'arif NU 1 Cilongok Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokweto
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2015). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarti dan Udik Wibowo. (2013). Implementasi Kepemimpinan Berbasis Sekolah (MBS) di SMK Negeri di Kabupaten Sleman. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparlan. (2013). *Manajemen Berbasis Sekolah: dari teori sampai praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Valimah & Khadijah. (2014). *Implementation of School Based Management Policy: An Exploration. Journal* : University Technology Malaysia

Wibowo, Agus (2013). *Akuntabilitas Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008

Permendiknas No. 16 Tahun 2007

Permendiknas No. 24 Tahun 2008

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

INSTRUMEN PENELITIAN

ANGKET PENELITIAN

Dengan Hormat,

Bapak/Ibu Guru dan karyawan yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf apabila kegiatan yang saya lakukan mengganggu aktivitas Bapak/ibu. Adapun kegiatan yang akan saya lakukan adalah pengambilan data untuk penyusunan tugas akhir skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman”**. Untuk itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket penelitian saya sesuai dengan kondisi yang Bapak/Ibu rasakan bukan yang Bapak/Ibu harapkan. Pengisian angket ini akan sangat bermanfaat bagi saya dalam penyusunan tugas akhir skripsi. Sebagai peneliti saya akan menjaga kerahasiaan tentang identitas diri terkait jawaban dari Bapak/Ibu di angket ini. Atas perhatian dan kesediaannya dalam mengisi angket ini, saya mengucapkan terimakasih.

Petunjuk Pengisian Angket

1. Mengisi Identitas responden sebelum mengisi kuesioner.
2. Responden hanya diperkenankan memilih 1 jawaban dari setiap butir pernyataan, dengan memberi tanda (X) pada jawaban yang dipilih.

Peneliti

Bonyfasius Anggada Putra

NIM. 14803241075

Identitas Responden:

Nama* :

Jabatan :

Jenis Kelamin : Laki-laki : PerempuanPengalaman Bekerja* : >= 3 tahun : <= 3 tahun

*= Wajib Di isi

Kemandirian Sekolah

Keterangan :

SM : Sangat Memenuhi

M : Memenuhi

KM : Kurang Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

No	Butir Pernyataan	SM	M	KM	TM
1	Sarana dan prasarana ruang kelas memadai untuk kegiatan pembelajaran.				
2	Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan				
3	Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer.				
4	Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.				
5	Tingkat pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan.				
No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
6	Ketersediaan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya.				

7	Ketersediaan karyawan yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.				
No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
8	Sekolah hanya mengandalkan bantuan pendanaan dari pemerintah dalam melaksanakan program sekolah.				
9	Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.				
10	Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.				
11	Tenaga administrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.				
12	Tenaga perpustakaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sumber belajar di perpustakaan.				
13	Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.				
14	Sarana dan prasarana sekolah kurang terawat dengan baik.				
15	Bangunan sekolah terawat dengan baik.				
16	Warga sekolah menggunakan perlengkapan yang disediakan sekolah dengan baik.				
17	Sekolah mampu menggunakan dana yang diterima dari pemerintah dengan baik.				
18	Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kurikulum telah terlaksana dengan baik.				
19	Pengelolaan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur.				
20	Pengelolaan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak lain				

	telah berjalan dengan baik.				
21	Manajemen kesiswaan sekolah telah berjalan dengan baik.				
22	Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				
No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
23	Manajemen sarana dan prasarana sekolah telah berjalan dengan baik.				
24	Manajemen layanan khusus sekolah (koperasi, UKS, dll) telah berjalan dengan baik.				
25	Kepala sekolah menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.				
26	Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah-masalah kerjanya.				
27	Kepala sekolah dapat membangun kelompok kerja, aktif, kreatif dan produktif.				
28	Administrasi pembelajaran telah disusun oleh guru dengan lengkap.				
29	Kegiatan surat menyurat telah sesuai dengan prosedur.				
30	Administrasi keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				

Kerjasama Sekolah

SB : Sangat Baik
 B : Baik
 KB : Kurang Baik
 TB : Tidak Baik

No	Butir Pernyataan	SB	B	KB	TB
1	<i>Teamwork</i> (kelompok kerja) warga sekolah dalam				

No	Butir Pernyataan	SB	B	KB	TB
	pelaksanaan program sekolah.				
2	Hubungan guru dengan siswa di sekolah.				
3	Terciptanya iklim kerja yang kondusif antar tenaga kependidikan di sekolah.				
4	Terciptanya suasana belajar siswa yang kondusif di sekolah.				
5	Keluaran (output) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah				
6	Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga pemerintah lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah.				
7	Hubungan kerjasama sekolah dengan komite sekolah.				
8	Hubungan kerjasama sekolah dengan walimurid.				
9	Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan karyawan).				
10	Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya).				
11	Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja.				
12	Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/ <i>memeorandum of understanding</i> (MOU) denga dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah.				

Partisipasi

SB : Sangat Baik
 B : Baik
 KB : Kurang Baik
 TB : Tidak Baik

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 KS : Kurang Setuju
 TS : Tidak Setuju

No	Butir Pertanyaan	SB	B	KB	TB
1	Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.				
No	Butir Pernyataan	SB	B	KB	TB
2	Partisipasi dari komite sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.				
3	Partisipasi wali murid berupa dana pendidikan untuk siswa.				
4	Partisipasi dari DUDI/pihak relevan lainnya berupa dukungan fasilitas pendidikan.				
5	Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah.				
6	Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan ide/pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.				
7	Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.				
8	Partisipasi dari wali murid berupa dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah.				
No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
9	<i>Stakeholders</i> bersedia menjalin kerjasama dengan sekolah karena <i>stakeholders</i> percaya dengan sekolah.				
10	Sekolah yang bersih dari penyimpangan merupakan salah satu faktor bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.				
11	Dalam menjalin partisipasi dengan sekolah, <i>stakeholders</i>				

	patuh terhadap kebijakan sekolah				
12	Keberlanjutan partisipasi <i>stakeholders</i> dikarenakan sekolah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.				
13	<i>Stakeholders</i> sadar akan peran-perannya untuk sekolah.				
14	<i>Stakeholders</i> menjalankan tugas dan perannya dengan baik.				
15	<i>Stakeholders</i> bersedia bertanggungjawab atas keputusan/tindakan yang dilakukan.				
16	Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> sangat bermanfaat bagi kemajuan sekolah.				
No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
17	Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> bersifat membangun bagi pendidikan di sekolah.				
18	Sekolah menerima banyak masukan dari pihak <i>Stakeholders</i>				
19	Jumlah saran/pendapat yang diberikan <i>Stakeholders</i> menurun dari tahun ke tahun.				
20	<i>Stakeholders</i> peduli dengan keadaan sekolah.				
21	<i>Stakeholders</i> memiliki rasa simpati pada sekolah.				
22	Saat sekolah membutuhkan bantuan, <i>stakeholders</i> siap membantu sekolah.				
23	Saran/pendapat <i>stakeholders</i> akan ditindak lanjuti untuk pengambilan keputusan sekolah.				
24	Pengambilan keputusan sekolah mayoritas hanya menunggu keputusan dari pemerintah.				
25	Pengambilan Keputusan Sekolah, berdasarkan pertimbangan saran/pendapat <i>Stakeholders</i>				

Keterbukaan Sekolah

SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
1	Publik yakin bahwa sekolah menjalankan kegiatan pendidikan secara terbuka kepada publik.				
2	Keterbukaan sekolah membuat publik percaya dengan sekolah.				
3	Publik mendukung sepenuhnya program yang dilakukan sekolah.				
4	Publik yakin sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat.				
5	Publik percaya bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.				
6	Partisipasi publik berupa ide/pemikiran meningkat dari tahun sebelumnya.				
7	Partisipasi berupa dana meningkat dari tahun sebelumnya.				
8	Partisipasi berupa fasilitas sekolah meningkat dari tahun ke tahun.				
9	Publik tidak mengetahui program-program sekolah.				
10	Program-program sekolah dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap program tersebut.				
11	Sekolah memberikan informasi terkait dengan program sekolah kepada publik.				
12	Sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				
13	Kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.				

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
14	Guru telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.				
15	Karyawan telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.				

Akuntabilitas

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
1	Publik percaya dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.				
2	Publik puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.				
3	Tingkat kepercayaan publik dari tahun-tahun sebelumnya sama saja (tidak ada peningkatan).				
4	Tingkat kepuasan publik dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.				
5	Publik sadar akan pentingnya program yang diselenggarakan sekolah.				
6	Publik tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya terkait program sekolah.				
7	Publik berani menilai penyelenggaraan program sekolah.				
8	Publik berani menilai kinerja tenaga kependidikan sekolah.				
9	Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersih dari korupsi.				

No	Butir Pernyataan	SS	S	KS	TS
10	Sekolah melakukan kegiatan perekrutan sesuai dengan prosedur yang tepat tanpa adanya nepotisme.				
11	Pelanggaran dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak terjadi /telah berkurang.				
12	Sekolah memiliki program untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.				
13	Sekolah telah menanamkan nilai moral kepada siswa melalui program sekolah.				
14	Sekolah memiliki program untuk meningkatkan nilai religius/keagamaan pada siswa.				
15	Dalam menyusun program, sekolah mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.				

PEDOMAN WAWANCARA

Instrumen ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman. Sumber Datanya adalah Kepala Sekolah, dan Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman.

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan sekolah dilihat dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan sekolah?
2. Bagaimana kemampuan/kinerja guru dan tenaga pendidikan di sekolah?
3. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana sekolah?
4. Bagaimana kemampuan manajemen yang dimiliki oleh sekolah?
5. Bagaimana kepemimpinan yang dimiliki kepala sekolah?
6. Apakah guru dan tenaga kependidikan telah menyusun kegiatan administrasinya?
7. Bagaimana kerjasama internal sekolah?
8. Bagaimana kerjasama eksternal sekolah?
9. Bagaimana Kontribusi Stakeholders kepada sekolah? Dalam bentuk apa saja?
10. Apakah Stakeholders percaya dengan kewibawaan dan kebersihan sekolah?
11. Bagaimana bentuk tanggung jawab stakeholders?
12. Bagaimana kuantitas dan kualitas masukan stakeholders
13. Bagaimana bentuk kepedulian stakeholders terhadap sekolah?
14. Apakah keputusan sekolah dibuat berdasarkan aspirasi stakeholders?
15. Apakah public yakin dan percaya dengan keterbukaan sekolah?
16. Apakah partisipasi public dalam kegiatan sekolah meningkat?
17. Bagaimana wawasan dan pengetahuan public terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah?
18. Apakah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan telah berkurang?
19. Apakah public percaya dan puas dengan akuntabilitas sekolah?
20. Apakah public memiliki kesadaran untuk menilai penyelenggaraan pendidikan di sekolah?
21. Apakah kasus KKN di sekolah telah berkurang?
22. Apakah kegiatan sekolah telah sesuai dengan nilai dan norma

LAMPIRAN 2

LEMBAR VALIDASI KUESIONER

AHLI 1 :

Nama : Ani Widayati, M.Pd. Ed.D.

Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi UNY

LEMBAR VALIDASI KUESIONER

A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen kuesioner ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang akan diukur dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

B. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik); 4 (baik); 5 (sangat baik)

C. PENILAIAN BUTIR SECARA UMUM

A. Kemandirian Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1. Sarana dan prasarana ruang kelas memadai untuk kegiatan pembelajaran.		✓			
		2. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan					✓
		3. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer.					✓
		4. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.					✓
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan.					✓
		6. Ketersediaan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya.		✓			
		7. Ketersediaan karyawan yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.		✓			
		8. Sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan program sekolah.					✓
B	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya	9. Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.					✓
		10. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.					✓
		11. Tenaga administrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.					✓
		12. Tenaga perpustakaan telah melaksanakan tugas dan tanggung					✓

		jawabnya dalam pengelolaan sumber belajar di perpustakaan						
		13. Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.					✓	
		14. Sarana dan prasarana sekolah kurang terawat dengan baik		✓				
		15. Bangunan sekolah terawat dengan baik						✓
		16. Warga sekolah menggunakan perlengkapan yang disediakan sekolah dengan baik						✓
		17. Sekolah mampu menggunakan dana yang diterima dari pemerintah dengan baik						✓
C	Kemampuan Manajemen	18. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kurikulum telah terlaksana dengan baik.		✓				
		19. Pengelolaan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur					✓	
		20. Pengelolaan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak lain telah berjalan dengan baik.					✓	
		21. Manajemen kesiswaan sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		22. Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						✓
		23. Manajemen sarana dan prasarana sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		24. Manajemen layanan khusus sekolah (koperasi, UKS, dll) telah berjalan sesuai dengan fungsinya.						✓
D	Kemampuan Kepemimpinan	25. Kepala sekolah menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.						✓
		26. Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan guru dalam						

		memecahkan masalah-masalah kerjanya.							✓
		27. Kepala sekolah dapat membangun kelompok kerja, aktif, kreatif dan produktif.							✓
E	Kemampuan Administrasi	28. Administrasi pembelajaran telah disusun oleh guru dengan lengkap.							✓
		29. Kegiatan surat menyurat telah sesuai dengan prosedur.							✓
		30. Administrasi keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.							✓

B. Kerjasama Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian					
			1	2	3	4	5	
A	Kerjasama Internal	1. <i>Teamwork</i> (kelompok kerja) warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah.						✓
		2. Hubungan guru dengan siswa disekolah.						✓
		3. Terciptanya iklim kerja yang kondusif antar tenaga kependidikan di sekolah.					✓	
		4. Terciptanya suasana belajar siswa yang kondusif di sekolah.					✓	
		5. Keluaran (output) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah						✓
B	Kerjasama Eksternal	6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah						✓
		7. Hubungan kerjasama sekolah dengan komite sekolah.						✓
		8. Hubungan kerjasama sekolah dengan walimurid.						✓
		9. Terjalannya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan						✓

		karyawan).						
		10. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakirin atau lainnya).						✓
		11. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan penyaluran tenaga kerja.						✓
		12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman memorandum of understanding (MOU) dengan dunia usaha industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah						✓

C. Partisipasi

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pertanyaan	Skala Penilaian					
			1	2	3	4	5	
A	Kontribusi Stakeholders (pemikiran, tenaga, finansial)	1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.						✓
		2. Partisipasi dari komite sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.						✓
		3. Partisipasi wali murid berupa dana pendidikan untuk siswa.						✓
		4. Partisipasi dari DUDI pihak relevan lainnya berupa dukungan fasilitas pendidikan.						✓
		5. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah.						✓
		6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran ide dalam penyelenggaraan program sekolah						✓
		7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.						✓
		8. Partisipasi dari wali murid berupa						

		dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah.						✓
B	Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan	9. <i>Stakeholders</i> bersedia menjalin kerjasama dengan sekolah karena <i>stakeholders</i> percaya dengan sekolah.						✓
		10. Sekolah yang bersih dari penyimpangan merupakan salah satu faktor bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.						✓
		11. Dalam menjalin partisipasi dengan sekolah, <i>stakeholders</i> patuh terhadap kebijakan sekolah						✓
		12. Keberlanjutan partisipasi <i>stakeholders</i> dikarenakan sekolah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.						✓
C	Tanggung jawab <i>Stakeholders</i>	13. <i>Stakeholders</i> sadar akan peran-perannya untuk sekolah.						✓
		14. <i>Stakeholders</i> menjalankan tugas dan perannya dengan baik.						✓
		15. <i>Stakeholders</i> bersedia bertanggungjawab atas keputusan/tindakan yang dilakukan.						✓
D	Kualitas dan kuantitas masukan <i>Stakeholders</i>	16. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> sangat bermanfaat bagi kemajuan sekolah.						✓
		17. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> bersifat membangun bagi pendidikan di sekolah.						✓
		18. Sekolah menerima banyak masukan dari <i>stakeholders</i> .						✓
		19. Jumlah Saran/Pendapat yang diberikan <i>stakeholders</i> menurun dari tahun ke tahun.						✓
E	Kepedulian <i>Stakeholders</i>	20. <i>Stakeholders</i> peduli dengan keadaan sekolah.						✓
		21. <i>Stakeholders</i> memiliki rasa simpati pada sekolah.					✓	
		22. Saat sekolah membutuhkan bantuan, <i>stakeholders</i> siap membantu sekolah						✓
F	Keputusan sekolah berdasarkan aspirasi	23. Saran/pendapat <i>stakeholders</i> akan ditindak lanjuti untuk pengambilan						

	<i>Stakeholders</i>	keputusan sekolah.							✓
		24. Pengambilan keputusan sekolah mayoritas hanya menunggu keputusan dari pemerintah.							✓
		25. Pengambilan Keputusan Sekolah, berdasarkan pertimbangan saran/pendapat <i>Stakeholders</i>						✓	

D. Keterbukaan

No	Aspek yang Di nilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Keyakinan dan kepercayaan publik	1. Publik yakin bahwa sekolah menjalankan kegiatan pendidikan secara terbuka kepada publik					✓
		2. Keterbukaan sekolah membuat publik percaya dengan sekolah.				✓	
		3. Publik mendukung sepenuhnya program yang dilakukan sekolah.					✓
		4. Publik yakin sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat.					✓
		5. Publik percaya bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.					✓
B	Peningkatan partisipasi publik	6. Partisipasi publik berupa ide/pemikiran meningkat dari tahun sebelumnya.					✓
		7. Partisipasi berupa dana meningkat dari tahun sebelumnya.					✓
		8. Partisipasi berupa fasilitas sekolah meningkat dari tahun ke tahun.					✓
C	Wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.	9. Publik tidak mengetahui program-program sekolah.					✓
		10. Program-program sekolah meningkatkan pemahaman publik terhadap program tersebut.					✓
		11. Sekolah memberikan informasi terkait dengan program sekolah kepada publik.					✓
D	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-	12. Sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					✓

	undangan								
		13. Kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.							✓
		14. Guru telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.							✓
		15. Karyawan telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.							✓

E. Akuntabilitas

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian					
			1	2	3	4	5	
A	Kepercayaan dan kepuasan publik.	1. Publik percaya dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.						✓
		2. Publik puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.						✓
		3. Tingkat kepercayaan publik dari tahun-tahun sebelumnya sama saja (tidak ada peningkatan).						✓
		4. Tingkat kepuasan publik dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.						✓
B	Kesadaran publik untuk menilai.	5. Publik sadar akan pentingnya program yang diselenggarakan sekolah.						✓
		6. Publik tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya terkait program sekolah						✓
		7. Publik berani menilai penyelenggaraan program sekolah						✓
		8. Publik berani menilai kinerja tenaga kependidikan sekolah.						✓
C	Berkurangnya kasus KKN.	9. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersih dari korupsi.						✓
		10. Sekolah melakukan kegiatan perekrutan sesuai dengan prosedur yang tepat tanpa adanya nepotisme.						✓
		11. Pelanggaran dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak terjadi /telah berkurang.			✓			
D	Kesesuaian kegiatan sekolah	12. Sekolah memiliki program untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.						✓

dengan Nilai dan norma							
	13. Sekolah telah menanamkan nilai moral kepada siswa melalui program sekolah.						✓
	14. Sekolah memiliki program untuk meningkatkan nilai religius/keagamaan pada siswa.						✓
	15. Dalam menyusun program, sekolah mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.						✓

D. KOMENTAR/ SARAN

1. Dlm bbr butir pernyataan terdapat 2 atau lebih indikator yg & nilai
2. Indikator kelengkapan partisi/ kurang lengkap
3. Bbrp item wrpk kesimpulan dan bbrp item yg lain.
4. Bbrp item perlu & perbaikan struktur kalimatnya
5. No 2 & 4 hrs contoh & bbrp kasus.

Yogyakarta, 10-4-2018

Validator,

Jw

Ami Widayati, S.Pd, Mpa, EdD

NIP. 19730908 200112 2001

AHLI 2

Nama : Dra. Sukanti, M.Pd.

Jabatan : Dosen FE UNY

LEMBAR VALIDASI KUESIONER

A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen kuesioner ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang akan diukur dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

B. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik); 4 (baik); 5 (sangat baik)

C. PENILAIAN BUTIR SECARA UMUM

A. Kemandirian Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1. Sarana dan prasarana ruang kelas memadai untuk kegiatan pembelajaran.			✓		
		2. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan					✓
		3. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer.					✓
		4. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.					✓
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan.					✓
		6. Ketersediaan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya.			✓		
		7. Ketersediaan karyawan yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.			✓		
		8. Sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan program sekolah.				✓	
B	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya	9. Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.				✓	
		10. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.					✓
		11. Tenaga administrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.					✓
		12. Tenaga perpustakaan telah melaksanakan tugas dan tanggung					✓

		jawabnya dalam pengelolaan sumber belajar di perpustakaan						
		13. Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.						✓
		14. Sarana dan prasarana sekolah kurang terawat dengan baik				✓		
		15. Bangunan sekolah terawat dengan baik						✓
		16. Warga sekolah menggunakan perlengkapan yang disediakan sekolah dengan baik						✓
		17. Sekolah mampu menggunakan dana yang diterima dari pemerintah dengan baik						✓
C	Kemampuan Manajemen	18. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kurikulum telah terlaksana dengan baik.				✓		
		19. Pengelolaan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur						✓
		20. Pengelolaan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak lain telah berjalan dengan baik.						✓
		21. Manajemen kesiswaan sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		22. Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						✓
		23. Manajemen sarana dan prasarana sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		24. Manajemen layanan khusus sekolah (koperasi, UKS, dll) telah berjalan sesuai dengan fungsinya.						✓
D	Kemampuan Kepemimpinan	25. Kepala sekolah menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.						✓
		26. Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan guru dalam						✓

		memecahkan masalah-masalah kerjanya.						
		27. Kepala sekolah dapat membangun kelompok kerja, aktif, kreatif dan produktif.						✓
E	Kemampuan Administrasi	28. Administrasi pembelajaran telah disusun oleh guru dengan lengkap.						✓
		29. Kegiatan surat menyurat telah sesuai dengan prosedur.						✓
		30. Administrasi keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						✓

B. Kerjasama Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kerjasama Internal	1. <i>Teamwork</i> (kelompok kerja) warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah.					✓
		2. Hubungan guru dengan siswa disekolah.					✓
		3. Terciptanya iklim kerja yang kondusif antar tenaga kependidikan di sekolah.				✓	
		4. Terciptanya suasana belajar siswa yang kondusif di sekolah.				✓	
		5. Keluaran (output) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah					✓
B	Kerjasama Eksternal	6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah					✓
		7. Hubungan kerjasama sekolah dengan komite sekolah.					✓
		8. Hubungan kerjasama sekolah dengan walimurid.					✓
		9. Terjalannya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan					✓

		karyawan).							
		10. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya).							✓
		11. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja.							✓
		12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/memorandum of understanding (MOU) dengan dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah							✓

C. Partisipasi

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pertanyaan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kontribusi Stakeholders (pemikiran, tenaga, finansial)	1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		2. Partisipasi dari komite sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		3. Partisipasi wali murid berupa dana pendidikan untuk siswa.					✓
		4. Partisipasi dari DUDI/pihak relevan lainnya berupa dukungan fasilitas pendidikan.					✓
		5. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah					✓
		7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		8. Partisipasi dari wali murid berupa					✓

		dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah.							
B	Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan	9. <i>Stakeholders</i> bersedia menjalin kerjasama dengan sekolah karena <i>stakeholders</i> percaya dengan sekolah.							✓
		10. Sekolah yang bersih dari penyimpangan merupakan salah satu faktor bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.							✓
		11. Dalam menjalin partisipasi dengan sekolah, <i>stakeholders</i> patuh terhadap kebijakan sekolah							✓
		12. Keberlanjutan partisipasi <i>stakeholders</i> dikarenakan sekolah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.							✓
C	Tanggung jawab <i>Stakeholders</i>	13. <i>Stakeholders</i> sadar akan peran-perannya untuk sekolah.							✓
		14. <i>Stakeholders</i> menjalankan tugas dan perannya dengan baik.							✓
		15. <i>Stakeholders</i> bersedia bertanggungjawab atas keputusan/tindakan yang dilakukan.							✓
D	Kualitas dan kuantitas masukan <i>Stakeholders</i>	16. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> sangat bermanfaat bagi kemajuan sekolah.							✓
		17. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> bersifat membangun bagi pendidikan di sekolah.							✓
		18. Sekolah menerima banyak masukan dari <i>stakeholders</i> .							✓
		19. Jumlah Saran/Pendapat yang diberikan <i>stakeholders</i> menurun dari tahun ke tahun.							✓
E	Kepedulian <i>Stakeholders</i>	20. <i>Stakeholders</i> peduli dengan keadaan sekolah.							✓
		21. <i>Stakeholders</i> memiliki rasa simpati pada sekolah.							✓
		22. Saat sekolah membutuhkan bantuan, <i>stakeholders</i> siap membantu sekolah							✓
F	Keputusan sekolah berdasarkan aspirasi	23. Saran/pendapat <i>stakeholders</i> akan ditindak lanjuti untuk pengambilan							✓

	<i>Stakeholders</i>	keputusan sekolah.							
		24. Pengambilan keputusan sekolah mayoritas hanya menunggu keputusan dari pemerintah.							✓
		25. Pengambilan Keputusan Sekolah, berdasarkan pertimbangan saran/pendapat <i>Stakeholders</i>							✓

D. Keterbukaan

No	Aspek yang Di nilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Keyakinan dan kepercayaan publik	1. Publik yakin bahwa sekolah menjalankan kegiatan pendidikan secara terbuka kepada publik					✓
		2. Keterbukaan sekolah membuat publik percaya dengan sekolah.					✓
		3. Publik mendukung sepenuhnya program yang dilakukan sekolah.					✓
		4. Publik yakin sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat.					✓
		5. Publik percaya bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.					✓
B	Peningkatan partisipasi publik	6. Partisipasi publik berupa ide/pemikiran meningkat dari tahun sebelumnya.					✓
		7. Partisipasi berupa dana meningkat dari tahun sebelumnya.					✓
		8. Partisipasi berupa fasilitas sekolah meningkat dari tahun ke tahun.					✓
C	Wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.	9. Publik tidak mengetahui program-program sekolah.					✓
		10. Program-program sekolah meningkatkan pemahaman publik terhadap program tersebut.					✓
		11. Sekolah memberikan informasi terkait dengan program sekolah kepada publik.					✓
D	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-	12. Sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					✓

undangan								
		13. Kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.						✓
		14. Guru telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.						✓
		15. Karyawan telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.						✓

E. Akuntabilitas

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kepercayaan dan kepuasan publik.	1. Publik percaya dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.					✓
		2. Publik puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.					✓
		3. Tingkat kepercayaan publik dari tahun-tahun sebelumnya sama saja (tidak ada peningkatan).					✓
		4. Tingkat kepuasan publik dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.					✓
B	Kesadaran publik untuk menilai.	5. Publik sadar akan pentingnya program yang diselenggarakan sekolah.					✓
		6. Publik tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya terkait program sekolah					✓
		7. Publik berani menilai penyelenggaraan program sekolah					✓
		8. Publik berani menilai kinerja tenaga kependidikan sekolah.					✓
C	Berkurangnya kasus KKN.	9. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersih dari korupsi.					✓
		10. Sekolah melakukan kegiatan perekrutan sesuai dengan prosedur yang tepat tanpa adanya nepotisme.					✓
		11. Pelanggaran dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak terjadi /telah berkurang.			✓		
D	Kesesuaian kegiatan sekolah	12. Sekolah memiliki program untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.					✓

AHLI 3

Nama : Dra. Nuning Sulastri, M.M.

Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 1 Tempel

LEMBAR VALIDASI KUESIONER

A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen kuesioner ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang akan diukur dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

B. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik); 4 (baik); 5 (sangat baik)

C. PENILAIAN BUTIR SECARA UMUM

A. Kemandirian Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1. Sarana dan prasarana ruang kelas memadai untuk kegiatan pembelajaran.					✓
		2. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan					✓
		3. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer.					✓
		4. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.					✓
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan.					✓
		6. Ketersediaan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya.					✓
		7. Ketersediaan karyawan yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.					✓
		8. Sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan program sekolah.					✓
B	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya	9. Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.					✓
		10. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.					✓
		11. Tenaga administrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.					✓
		12. Tenaga perpustakaan telah melaksanakan tugas dan tanggung					✓

		jawabnya dalam pengelolaan sumber belajar di perpustakaan							
		13. Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.							✓
		14. Sarana dan prasarana sekolah kurang terawat dengan baik						✓	
		15. Bangunan sekolah terawat dengan baik							✓
		16. Warga sekolah menggunakan perlengkapan yang disediakan sekolah dengan baik							✓
		17. Sekolah mampu menggunakan dana yang diterima dari pemerintah dengan baik							✓
C	Kemampuan Manajemen	18. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kurikulum telah terlaksana dengan baik.							✓
		19. Pengelolaan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur							✓
		20. Pengelolaan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak lain telah berjalan dengan baik.							✓
		21. Manajemen kesiswaan sekolah telah berjalan dengan baik.							✓
		22. Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.							✓
		23. Manajemen sarana dan prasarana sekolah telah berjalan dengan baik.							✓
		24. Manajemen layanan khusus sekolah (koperasi, UKS, dll) telah berjalan sesuai dengan fungsinya.							✓
D	Kemampuan Kepemimpinan	25. Kepala sekolah menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.							✓
		26. Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan guru dalam							✓

		memecahkan masalah-masalah kerjanya.							
		27. Kepala sekolah dapat membangun kelompok kerja, aktif, kreatif dan produktif.							✓
E	Kemampuan Administrasi	28. Administrasi pembelajaran telah disusun oleh guru dengan lengkap.							✓
		29. Kegiatan surat menyurat telah sesuai dengan prosedur.							✓
		30. Administrasi keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.							✓

B. Kerjasama Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian					
			1	2	3	4	5	
A	Kerjasama Internal	1. <i>Teamwork</i> (kelompok kerja) warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah.						✓
		2. Hubungan guru dengan siswa disekolah.						✓
		3. Terciptanya iklim kerja yang kondusif antar tenaga kependidikan di sekolah.						✓
		4. Terciptanya suasana belajar siswa yang kondusif di sekolah.						✓
		5. Keluaran (output) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah						✓
B	Kerjasama Eksternal	6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah						✓
		7. Hubungan kerjasama sekolah dengan komite sekolah.						✓
		8. Hubungan kerjasama sekolah dengan walimurid.						✓
		9. Terjalannya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan						✓

		karyawan).						
		10. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya).						✓
		11. Terjalinnnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja.						✓
		12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/memoorandum of understanding (MOU) denga dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah						✓

C. Partisipasi

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pertanyaan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kontribusi Stakeholders (pemikiran, tenaga, finansial)	1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		2. Partisipasi dari komite sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		3. Partisipasi wali murid berupa dana pendidikan untuk siswa.					✓
		4. Partisipasi dari DUDI/pihak relevan lainnya berupa dukungan fasilitas pendidikan.					✓
		5. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah					✓
		7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		8. Partisipasi dari wali murid berupa					✓

	<i>Stakeholders</i>	keputusan sekolah.							
		24. Pengambilan keputusan sekolah mayoritas hanya menunggu keputusan dari pemerintah.							✓
		25. Pengambilan Keputusan Sekolah, berdasarkan pertimbangan saran/pendapat <i>Stakeholders</i>							✓

D. Keterbukaan

No	Aspek yang Di nilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Keyakinan dan kepercayaan publik	1. Publik yakin bahwa sekolah menjalankan kegiatan pendidikan secara terbuka kepada publik					✓
		2. Keterbukaan sekolah membuat publik percaya dengan sekolah.					✓
		3. Publik mendukung sepenuhnya program yang dilakukan sekolah.					✓
		4. Publik yakin sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat.					✓
		5. Publik percaya bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.					✓
B	Peningkatan partisipasi publik	6. Partisipasi publik berupa ide/pemikiran meningkat dari tahun sebelumnya.				✓	
		7. Partisipasi berupa dana meningkat dari tahun sebelumnya.					✓
		8. Partisipasi berupa fasilitas sekolah meningkat dari tahun ke tahun.					✓
C	Wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.	9. Publik tidak mengetahui program-program sekolah.					✓
		10. Program-program sekolah meningkatkan pemahaman publik terhadap program tersebut.					✓
		11. Sekolah memberikan informasi terkait dengan program sekolah kepada publik.					✓
D	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-	12. Sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					✓

dengan Nilai dan norma							
	13. Sekolah telah menanamkan nilai moral kepada siswa melalui program sekolah.						✓
	14. Sekolah memiliki program untuk meningkatkan nilai religius/keagamaan pada siswa.						✓
	15. Dalam menyusun program, sekolah mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat.						✓

D. KOMENTAR/ SARAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 16 April 2018

Validator,

Jemer

Nurroza Silastri, M.M.

156108281988032010



AHLI 4 :

Nama : Drs. Ircham Rosyidi

Jabatan : Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman

LEMBAR VALIDASI KUESIONER

A. TUJUAN

Tujuan penggunaan instrumen kuesioner ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman, yang akan diukur dari kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

B. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom yang tersedia.
2. Makna poin validasi adalah 1 (tidak baik); 2 (kurang baik); 3 (cukup baik); 4 (baik); 5 (sangat baik)

C. PENILAIAN BUTIR SECARA UMUM

A. Kemandirian Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	1. Sarana dan prasarana ruang kelas memadai untuk kegiatan pembelajaran.					✓
		2. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan				✓	
		3. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana laboratorium komputer.					✓
		4. Tingkat kecukupan/pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga.				✓	
		5. Tingkat pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga kependidikan/karyawan.					✓
		6. Ketersediaan guru yang mengajar sesuai dengan kualifikasinya.					✓
		7. Ketersediaan karyawan yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikannya.				✓	
		8. Sekolah hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah dalam melaksanakan program sekolah.					✓
B	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya lainnya	9. Kepala Sekolah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan pengelolaan sekolah.					✓
		10. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran.					✓
		11. Tenaga administrasi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.					✓
		12. Tenaga perpustakaan telah melaksanakan tugas dan tanggung				✓	

		jawabnya dalam pengelolaan sumber belajar di perpustakaan						
		13. Tenaga laboratorium melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membantu guru mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.						✓
		14. Sarana dan prasarana sekolah kurang terawat dengan baik					✓	
		15. Bangunan sekolah terawat dengan baik						✓
		16. Warga sekolah menggunakan perlengkapan yang disediakan sekolah dengan baik					✓	
		17. Sekolah mampu menggunakan dana yang diterima dari pemerintah dengan baik					✓	
C	Kemampuan Manajemen	18. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan kurikulum telah terlaksana dengan baik.						✓
		19. Pengelolaan tenaga kependidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur						✓
		20. Pengelolaan hubungan masyarakat sekolah dengan pihak lain telah berjalan dengan baik.						✓
		21. Manajemen kesiswaan sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		22. Manajemen keuangan dan pembiayaan sekolah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						✓
		23. Manajemen sarana dan prasarana sekolah telah berjalan dengan baik.						✓
		24. Manajemen layanan khusus sekolah (koperasi, UKS, dll) telah berjalan sesuai dengan fungsinya.						✓
D	Kemampuan Kepemimpinan	25. Kepala sekolah menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.						✓
		26. Kepala sekolah membimbing dan mengarahkan guru dalam						✓

		memecahkan masalah-masalah kerjanya.						
		27. Kepala sekolah dapat membangun kelompok kerja, aktif, kreatif dan produktif.						✓
E	Kemampuan Administrasi	28. Administrasi pembelajaran telah disusun oleh guru dengan lengkap.						✓
		29. Kegiatan surat menyurat telah sesuai dengan prosedur.						✓
		30. Administrasi keuangan telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.						✓

B. Kerjasama Sekolah

No	Aspek yang dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kerjasama Internal	1. <i>Teamwork</i> (kelompok kerja) warga sekolah dalam pelaksanaan program sekolah.					✓
		2. Hubungan guru dengan siswa disekolah.					✓
		3. Terciptanya iklim kerja yang kondusif antar tenaga kependidikan di sekolah.					✓
		4. Terciptanya suasana belajar siswa yang kondusif di sekolah.					✓
		5. Keluaran (output) program sekolah merupakan hasil kerja kolektif warga sekolah					✓
B	Kerjasama Eksternal	6. Hubungan kerjasama antara sekolah dengan pemerintah (dinas pendidikan atau lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program sekolah					✓
		7. Hubungan kerjasama sekolah dengan komite sekolah.					✓
		8. Hubungan kerjasama sekolah dengan walimurid.				✓	
		9. Terjalinnya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam penyiapan input sekolah (pengembangan kurikulum, dana, sarana prasarana, guru dan					✓

		karyawan).						
		10. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam proses pembelajaran (melalui prakerin atau lainnya).					✓	
		11. Terjalinya kerjasama dengan dunia usaha/industri (DUDI) atau lembaga yang relevan lainnya dalam pemanfaatan lulusan/penyaluran tenaga kerja.					✓	
		12. Tindak lanjut sekolah terhadap nota kesepahaman/memorandum of understanding (MOU) denga dunia usaha/industri (DUDI) dalam pelaksanaan program sekolah					✓	

C. Partisipasi

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pertanyaan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kontribusi Stakeholders (pemikiran, tenaga, finansial)	1. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.				✓	
		2. Partisipasi dari komite sekolah berupa dukungan dana dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		3. Partisipasi wali murid berupa dana pendidikan untuk siswa.					✓
		4. Partisipasi dari DUDI/pihak relevan lainnya berupa dukungan fasilitas pendidikan.					✓
		5. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan material/fasilitas dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		6. Partisipasi dari warga sekolah/sekolah berupa dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah					✓
		7. Partisipasi dari pemerintah berupa dukungan pemikiran dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓
		8. Partisipasi dari wali murid berupa					

		dukungan pemikiran/ide dalam penyelenggaraan program sekolah.					✓	
B	Kepercayaan <i>Stakeholders</i> terkait kewibawaan dan kebersihan	9. <i>Stakeholders</i> bersedia menjalin kerjasama dengan sekolah karena <i>stakeholders</i> percaya dengan sekolah.						✓
		10. Sekolah yang bersih dari penyimpangan merupakan salah satu faktor bagi <i>stakeholders</i> untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.						✓
		11. Dalam menjalin partisipasi dengan sekolah, <i>stakeholders</i> patuh terhadap kebijakan sekolah						✓
		12. Keberlanjutan partisipasi <i>stakeholders</i> dikarenakan sekolah mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.						✓
C	Tanggung jawab <i>Stakeholders</i>	13. <i>Stakeholders</i> sadar akan peran-perannya untuk sekolah.						✓
		14. <i>Stakeholders</i> menjalankan tugas dan perannya dengan baik.						✓
		15. <i>Stakeholders</i> bersedia bertanggungjawab atas keputusan/tindakan yang dilakukan.						✓
D	Kualitas dan kuantitas masukan <i>Stakeholders</i>	16. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> sangat bermanfaat bagi kemajuan sekolah.						✓
		17. Saran/Pendapat <i>Stakeholders</i> bersifat membangun bagi pendidikan di sekolah.						✓
		18. Sekolah menerima banyak masukan dari <i>stakeholders</i> .						✓
		19. Jumlah Saran/Pendapat yang diberikan <i>stakeholders</i> menurun dari tahun ke tahun.						✓
E	Kepedulian <i>Stakeholders</i>	20. <i>Stakeholders</i> peduli dengan keadaan sekolah.						✓
		21. <i>Stakeholders</i> memiliki rasa simpati pada sekolah.						✓
		22. Saat sekolah membutuhkan bantuan, <i>stakeholders</i> siap membantu sekolah						✓
F	Keputusan sekolah berdasarkan aspirasi	23. Saran/pendapat <i>stakeholders</i> akan ditindak lanjuti untuk pengambilan						✓

	<i>Stakeholders</i>	keputusan sekolah.							
		24. Pengambilan keputusan sekolah mayoritas hanya menunggu keputusan dari pemerintah.							✓
		25. Pengambilan Keputusan Sekolah, berdasarkan pertimbangan saran/pendapat <i>Stakeholders</i>							✓

D. Keterbukaan

No	Aspek yang Di nilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian					
			1	2	3	4	5	
A	Keyakinan dan kepercayaan publik	1. Publik yakin bahwa sekolah menjalankan kegiatan pendidikan secara terbuka kepada publik						✓
		2. Keterbukaan sekolah membuat publik percaya dengan sekolah.						✓
		3. Publik mendukung sepenuhnya program yang dilakukan sekolah.						✓
		4. Publik yakin sekolah dapat menampung aspirasi masyarakat.						✓
		5. Publik percaya bahwa sekolah mampu memberikan pendidikan yang baik untuk peserta didik.						✓
B	Peningkatan partisipasi publik	6. Partisipasi publik berupa ide/pemikiran meningkat dari tahun sebelumnya.						✓
		7. Partisipasi berupa dana meningkat dari tahun sebelumnya.						✓
		8. Partisipasi berupa fasilitas sekolah meningkat dari tahun ke tahun.						✓
C	Wawasan dan pengetahuan publik terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah.	9. Publik tidak mengetahui program-program sekolah.					✓	
		10. Program-program sekolah meningkatkan pemahaman publik terhadap program tersebut.						✓
		11. Sekolah memberikan informasi terkait dengan program sekolah kepada publik.						✓
D	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-	12. Sekolah telah menjalankan kegiatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.						✓

undangan								
		13. Kepala sekolah telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.					✓	
		14. Guru telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.					✓	
		15. Karyawan telah menjalankan tugasnya dengan jujur dan bersih.					✓	

E. Akuntabilitas

No	Aspek yang Dinilai	Butir Pernyataan	Skala Penilaian				
			1	2	3	4	5
A	Kepercayaan dan kepuasan publik.	1. Publik percaya dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.					✓
		2. Publik puas dengan pertanggungjawaban yang disampaikan sekolah.					✓
		3. Tingkat kepercayaan publik dari tahun-tahun sebelumnya sama saja (tidak ada peningkatan).					✓
		4. Tingkat kepuasan publik dari tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan.				✓	
B	Kesadaran publik untuk menilai.	5. Publik sadar akan pentingnya program yang diselenggarakan sekolah.				✓	
		6. Publik tidak ragu dalam menyampaikan pendapatnya terkait program sekolah				✓	
		7. Publik berani menilai penyelenggaraan program sekolah				✓	
		8. Publik berani menilai kinerja tenaga kependidikan sekolah.				✓	
C	Berkurangnya kasus KKN.	9. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang bersih dari korupsi.				✓	
		10. Sekolah melakukan kegiatan perekrutan sesuai dengan prosedur yang tepat tanpa adanya nepotisme.				✓	
		11. Pelanggaran dalam penyelenggaraan program pendidikan tidak terjadi /telah berkurang.				✓	
D	Kesesuaian kegiatan sekolah	12. Sekolah memiliki program untuk meningkatkan kedisiplinan siswa.					✓

LAMPIRAN 3

HASIL UJI COBA INSTRUMEN

KEMANDIRIAN

	AHLI 1		AHLI 2		AHLI 3		AHLI 4		ΣS	v	Keterangan
	Skor	S	Skor	S	Skor	S	Skor	S			
Butir 1	2	1	3	2	5	4	5	4	11	0.688	Valid
Butir 2	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.938	Valid
Butir 3	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 4	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.938	Valid
Butir 5	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 6	5	4	3	2	5	4	5	4	14	0.875	Valid
Butir 7	5	4	3	2	5	4	4	3	13	0.813	Valid
Butir 8	4	3	4	3	5	4	5	4	14	0.875	Valid
Butir 9	4	3	4	3	5	4	5	4	14	0.875	Valid
Butir 10	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 11	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.938	Valid
Butir 12	4	3	5	4	5	4	4	3	14	0.875	Valid
Butir 13	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.938	Valid
Butir 14	2	1	3	2	4	3	4	3	9	0.563	Valid
Butir 15	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 16	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.938	Valid
Butir 17	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.938	Valid
Butir 18	2	1	3	2	5	4	5	4	11	0.688	Valid
Butir 19	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.938	Valid
Butir 20	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.938	Valid
Butir 21	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 22	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 23	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 24	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 25	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 26	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 27	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 28	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 29	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid
Butir 30	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1.000	Valid

KERJASAMA

	AHLI 1		AHLI 2		AHLI 3		AHLI 4		ΣS	V	Keterangan
	Skor	S	Skor	S	Skor	S	Skor	S			
Butir 1	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 2	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 3	4	3	4	3	5	4	5	4	14	0.88	Valid
Butir 4	4	3	4	3	5	4	5	4	14	0.88	Valid
Butir 5	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 6	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 7	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 8	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 9	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 10	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 11	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 12	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid

PARTISIPASI

	AHLI 1		AHLI 2		AHLI 3		AHLI 4		ΣS	v	Keterangan
	Skor	S	Skor	S	Skor	S	Skor	S			
Butir 1	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 2	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 3	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 4	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 5	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 6	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 7	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 8	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 9	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 10	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 11	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 12	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 13	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 14	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 15	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid

Butir 16	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 17	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 18	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 19	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 20	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 21	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.94	Valid
Butir 22	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 23	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 24	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 25	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.94	Valid

KETERBUKAAN

	AHLI 1		AHLI 2		AHLI 3		AHLI 4		ΣS	v	Keterangan
	Skor	S	Skor	S	Skor	S	Skor	S			
Butir 1	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 2	4	3	5	4	5	4	5	4	15	0.94	Valid
Butir 3	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 4	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 5	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 6	5	4	5	4	4	3	5	4	15	0.94	Valid
Butir 7	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 8	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 9	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 10	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 11	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 12	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 13	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 14	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 15	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid

AKUNTABILITAS

	AHLI 1		AHLI 2		AHLI 3		AHLI 4		ΣS	v	Keterangan
	Skor	S	Skor	S	Skor	S	Skor	S			
Butir 1	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 2	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid

Butir 3	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 4	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 5	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 6	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 7	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 8	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 9	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 10	5	4	5	4	5	4	4	3	15	0.94	Valid
Butir 11	2	1	3	2	5	4	4	3	10	0.63	Valid
Butir 12	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 13	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 14	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid
Butir 15	5	4	5	4	5	4	5	4	16	1	Valid

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

Hasil Statistik Deskriptif SMK Negeri 1 Tempel

	Kemandirian	Kerjasama	Partisipasi	Keterbukaan	Akuntabilitas
N Valid	54	54	54	54	54
Missing	0	0	0	0	0
Mean	98.3148	42.0926	78.8333	48.5926	49.3519
Median	98.5000	42.5000	79.0000	48.0000	49.0000
Mode	89.00	36.00 ^a	73.00	44.00	49.00
Std. Deviation	8.15145	3.87673	6.03058	4.30234	3.84196
Variance	66.446	15.029	36.368	18.510	14.761
Range	32.00	12.00	24.00	14.00	14.00
Minimum	84.00	36.00	70.00	43.00	43.00
Maximum	116.00	48.00	94.00	57.00	57.00
Sum	5309.00	2273.00	4257.00	2624.00	2665.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 84.00	1	1.9	1.9	1.9
88.00	2	3.7	3.7	5.6
89.00	7	13.0	13.0	18.5
90.00	5	9.3	9.3	27.8
91.00	3	5.6	5.6	33.3
93.00	2	3.7	3.7	37.0
94.00	1	1.9	1.9	38.9
95.00	1	1.9	1.9	40.7
96.00	1	1.9	1.9	42.6
97.00	1	1.9	1.9	44.4
98.00	3	5.6	5.6	50.0
99.00	3	5.6	5.6	55.6
100.00	3	5.6	5.6	61.1
101.00	3	5.6	5.6	66.7
102.00	1	1.9	1.9	68.5
103.00	1	1.9	1.9	70.4
104.00	1	1.9	1.9	72.2
105.00	1	1.9	1.9	74.1
106.00	3	5.6	5.6	79.6

107.00	3	5.6	5.6	85.2
108.00	2	3.7	3.7	88.9
110.00	3	5.6	5.6	94.4
111.00	1	1.9	1.9	96.3
115.00	1	1.9	1.9	98.1
116.00	1	1.9	1.9	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Kerjasama di SMK Negeri 1 Tempel

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 36.00	6.0	11.1	11.1	11.11
37.00	1.0	1.9	1.9	12.96
38.00	6.0	11.1	11.1	24.07
39.00	4.0	7.4	7.4	31.48
40.00	5.0	9.3	9.3	40.74
41.00	1.0	1.9	1.9	42.59
42.00	4.0	7.4	7.4	50.00
43.00	5.0	9.3	9.3	59.26
44.00	5.0	9.3	9.3	68.52
45.00	3.0	5.6	5.6	74.07
46.00	6.0	11.1	11.1	85.19
47.00	3.0	5.6	5.6	90.74
48.00	5.0	9.3	9.3	100.00
Total	54.0	100.0	100.0	

Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 70.00	1	1.85	1.85	1.85
71.00	2	3.70	3.70	5.56
73.00	12	22.22	22.22	27.78
74.00	5	9.26	9.26	37.04
75.00	1	1.85	1.85	38.89
76.00	2	3.70	3.70	42.59
77.00	1	1.85	1.85	44.44
78.00	2	3.70	3.70	48.15

79.00	4	7.41	7.41	55.56
80.00	4	7.41	7.41	62.96
81.00	4	7.41	7.41	70.37
82.00	3	5.56	5.56	75.93
83.00	1	1.85	1.85	77.78
84.00	4	7.41	7.41	85.19
85.00	2	3.70	3.70	88.89
86.00	1	1.85	1.85	90.74
87.00	1	1.85	1.85	92.59
89.00	1	1.85	1.85	94.44
94.00	3	5.56	5.56	100.00
Total	54	100.00	100.00	

Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 43.00	2	3.7	3.7	3.7
44.00	11	20.4	20.4	24.1
45.00	7	13.0	13.0	37.0
46.00	2	3.7	3.7	40.7
47.00	3	5.6	5.6	46.3
48.00	4	7.4	7.4	53.7
49.00	1	1.9	1.9	55.6
50.00	7	13.0	13.0	68.5
51.00	3	5.6	5.6	74.1
52.00	4	7.4	7.4	81.5
53.00	3	5.6	5.6	87.0
54.00	1	1.9	1.9	88.9
56.00	1	1.9	1.9	90.7
57.00	5	9.3	9.3	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 43.00	1	1.9	1.9	1.9

44.00	7	13.0	13.0	14.8
45.00	5	9.3	9.3	24.1
46.00	1	1.9	1.9	25.9
47.00	1	1.9	1.9	27.8
48.00	5	9.3	9.3	37.0
49.00	10	18.5	18.5	55.6
50.00	5	9.3	9.3	64.8
51.00	4	7.4	7.4	72.2
52.00	6	11.1	11.1	83.3
53.00	1	1.9	1.9	85.2
54.00	1	1.9	1.9	87.0
55.00	3	5.6	5.6	92.6
57.00	4	7.4	7.4	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel per Indikator

		Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya	Kemampuan Manajemen	Kemampuan Kepemimpinan	Kemampuan Administrasi
N	Valid	54	54	54	54	54
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		25.5926	29.7593	23.1296	10.0556	9.7778
Median		25.0000	30.0000	23.0000	9.5000	9.0000
Mode		25.00 ^a	27.00	21.00	9.00	9.00
Std. Deviation		2.44578	2.94564	2.45754	1.25016	1.17629
Variance		5.982	8.677	6.039	1.563	1.384
Range		10.00	10.00	9.00	3.00	4.00
Minimum		22.00	25.00	19.00	9.00	8.00
Maximum		32.00	35.00	28.00	12.00	12.00
Sum		1382.00	1607.00	1249.00	543.00	528.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Kesanggupan_Pemenuhan_Kebutuhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22.00	5	9.3	9.3	9.3

23.00	7	13.0	13.0	22.2
24.00	7	13.0	13.0	35.2
25.00	9	16.7	16.7	51.9
26.00	9	16.7	16.7	68.5
27.00	6	11.1	11.1	79.6
28.00	4	7.4	7.4	87.0
29.00	4	7.4	7.4	94.4
30.00	1	1.9	1.9	96.3
32.00	2	3.7	3.7	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Kemampuan_Sumber_Daya_Manusia_dan_Sumber_Daya_Lainnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25.00	1	1.9	1.9	1.9
	26.00	5	9.3	9.3	11.1
	27.00	14	25.9	25.9	37.0
	28.00	5	9.3	9.3	46.3
	29.00	1	1.9	1.9	48.1
	30.00	3	5.6	5.6	53.7
	31.00	6	11.1	11.1	64.8
	32.00	7	13.0	13.0	77.8
	33.00	6	11.1	11.1	88.9
	34.00	3	5.6	5.6	94.4
	35.00	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Kemampuan_Manajemen

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19.00	1	1.9	1.9	1.9
	20.00	1	1.9	1.9	3.7
	21.00	23	42.6	42.6	46.3
	23.00	5	9.3	9.3	55.6
	24.00	10	18.5	18.5	74.1

25.00	2	3.7	3.7	77.8
26.00	6	11.1	11.1	88.9
27.00	2	3.7	3.7	92.6
28.00	4	7.4	7.4	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Kemampuan_Kepemimpinan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9.00	27	50.0	50.0	50.0
	10.00	10	18.5	18.5	68.5
	11.00	4	7.4	7.4	75.9
	12.00	13	24.1	24.1	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Kemampuan_Administrasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	1	1.9	1.9	1.9
	9.00	32	59.3	59.3	61.1
	10.00	8	14.8	14.8	75.9
	11.00	4	7.4	7.4	83.3
	12.00	9	16.7	16.7	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Kerjasama di SMK Negeri 1 Tempel per Indikator

		Kerjasama Internal	Kerjasama Eksternal
N	Valid	54	54
	Missing	0	0
Mean		17.6111	24.4815
Median		18.0000	24.0000
Mode		15.00	21.00
Std. Deviation		2.00393	2.36915
Variance		4.016	5.613
Range		5.00	7.00
Minimum		15.00	21.00

Maximum	20.00	28.00
Sum	951.00	1322.00

Kerjasama_Internal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15.00	15.00	27.78	27.78	27.78
	16.00	5.00	9.26	9.26	37.04
	17.00	4.00	7.41	7.41	44.44
	18.00	4.00	7.41	7.41	51.85
	19.00	14.00	25.93	25.93	77.78
	20.00	12.00	22.22	22.22	100.00
Total		54.00	100.00	100.00	

Kerjasama_Eksternal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21.00	10	18.5	18.5	18.5
	22.00	2	3.7	3.7	22.2
	23.00	8	14.8	14.8	37.0
	24.00	8	14.8	14.8	51.9
	25.00	4	7.4	7.4	59.3
	26.00	8	14.8	14.8	74.1
	27.00	8	14.8	14.8	88.9
	28.00	6	11.1	11.1	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel per Indikator

	Kontribusi Stakeholders	Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan	Tanggung Jawab Stakeholders	Kualitas dan Kuantitas Masukan Stakeholders	Kepedulian Stakeholders	Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi Stakeholders
N Valid	54	54	54	54	54	54
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	25.0556	13.6111	9.7963	12.4074	9.3333	8.6296
Median	24.0000	13.0000	9.0000	12.0000	9.0000	8.0000

Mode	24.00	12.00	9.00	11.00	9.00	8.00
Std. Deviation	2.20134	1.64164	1.36506	1.47327	.89020	.87516
Variance	4.846	2.695	1.863	2.171	.792	.766
Range	11.00	4.00	5.00	5.00	4.00	4.00
Minimum	21.00	12.00	7.00	10.00	8.00	8.00
Maximum	32.00	16.00	12.00	15.00	12.00	12.00
Sum	1353.00	735.00	529.00	670.00	504.00	466.00

Kontribusi_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21.00	1	1.9	1.9	1.9
	22.00	2	3.7	3.7	5.6
	23.00	1	1.9	1.9	7.4
	24.00	26	48.1	48.1	55.6
	25.00	11	20.4	20.4	75.9
	26.00	3	5.6	5.6	81.5
	27.00	4	7.4	7.4	88.9
	28.00	3	5.6	5.6	94.4
	32.00	3	5.6	5.6	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Kepercayaan_Stakeholders_Terkait_Kewibawaan_dan_Kebersihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12.00	22	40.7	40.7	40.7
	13.00	7	13.0	13.0	53.7
	14.00	8	14.8	14.8	68.5
	15.00	4	7.4	7.4	75.9
	16.00	13	24.1	24.1	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Tanggung_Jawab_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7.00	1	1.9	1.9	1.9
	9.00	37	68.5	68.5	70.4

11.00	3	5.6	5.6	75.9
12.00	13	24.1	24.1	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Kualitas_dan_Kuantitas_Masukan_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10.00	1	1.9	1.9	1.9
	11.00	20	37.0	37.0	38.9
	12.00	11	20.4	20.4	59.3
	13.00	6	11.1	11.1	70.4
	14.00	10	18.5	18.5	88.9
	15.00	6	11.1	11.1	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Kepedulian_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	1	1.9	1.9	1.9
	9.00	44	81.5	81.5	83.3
	10.00	3	5.6	5.6	88.9
	11.00	2	3.7	3.7	92.6
	12.00	4	7.4	7.4	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Keputusan_Sekolah_Berdasarkan_Aspirasi_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	30	55.6	55.6	55.6
	9.00	17	31.5	31.5	87.0
	10.00	5	9.3	9.3	96.3
	11.00	1	1.9	1.9	98.1
	12.00	1	1.9	1.9	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel per Indikator

	Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan Partisipasi Publik	Wawasan dan Pengetahuan Publik	Berkurangnya_Pelanggaran
N Valid	54	54	54	54
Missing	0	0	0	0
Mean	16.6111	9.2222	9.2222	13.5370
Median	15.5000	9.0000	9.0000	13.0000
Mode	15.00	9.00	9.00	12.00
Std. Deviation	2.02267	1.32703	.94503	1.78794
Variance	4.091	1.761	.893	3.197
Range	5.00	6.00	5.00	6.00
Minimum	15.00	6.00	7.00	10.00
Maximum	20.00	12.00	12.00	16.00
Sum	897.00	498.00	498.00	731.00

Keyakinan_dan_Kepercayaan_Publik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 15.00	27	50.0	50.0	50.0
16.00	6	11.1	11.1	61.1
17.00	6	11.1	11.1	72.2
18.00	3	5.6	5.6	77.8
20.00	12	22.2	22.2	100.0
Total	54	100.0	100.0	

Peningkatan_Partisipasi_Publik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 6.00	1	1.9	1.9	1.9
7.00	1	1.9	1.9	3.7
8.00	12	22.2	22.2	25.9
9.00	26	48.1	48.1	74.1
10.00	5	9.3	9.3	83.3
11.00	3	5.6	5.6	88.9
12.00	6	11.1	11.1	100.0

Total	54	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Wawasan_dan_Pengetahuan_Publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7.00	1	1.9	1.9	1.9
	8.00	7	13.0	13.0	14.8
	9.00	32	59.3	59.3	74.1
	10.00	9	16.7	16.7	90.7
	11.00	3	5.6	5.6	96.3
	12.00	2	3.7	3.7	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Berkurangnya_Pelanggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10.00	1	1.9	1.9	1.9
	11.00	1	1.9	1.9	3.7
	12.00	22	40.7	40.7	44.4
	13.00	7	13.0	13.0	57.4
	14.00	4	7.4	7.4	64.8
	15.00	5	9.3	9.3	74.1
	16.00	14	25.9	25.9	100.0
Total		54	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel per Indikator

	Kepercayaan dan Kepuasan Publik	Kesadaran Publik untuk Menilai	Berkurangnya Kasus KKN	Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma
N Valid	54	54	54	54
Missing	0	0	0	0
Mean	12.3519	12.4444	9.9074	14.6481
Median	12.0000	12.0000	9.0000	16.0000
Mode	12.00	12.00	9.00	16.00

Std. Deviation	1.18413	1.26888	1.18590	1.82392
Variance	1.402	1.610	1.406	3.327
Range	5.00	6.00	4.00	5.00
Minimum	11.00	10.00	8.00	11.00
Maximum	16.00	16.00	12.00	16.00
Sum	667.00	672.00	535.00	791.00

Kepercayaan_dan_Kepuasan_Publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11.00	10	18.5	18.5	18.5
	12.00	29	53.7	53.7	72.2
	13.00	7	13.0	13.0	85.2
	14.00	3	5.6	5.6	90.7
	15.00	4	7.4	7.4	98.1
	16.00	1	1.9	1.9	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Kesadaran_Publik_untuk_Menilai

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10.00	1	1.9	1.9	1.9
	12.00	44	81.5	81.5	83.3
	13.00	3	5.6	5.6	88.9
	15.00	1	1.9	1.9	90.7
	16.00	5	9.3	9.3	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Berkurangnya_Kasus_KKN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	1	1.9	1.9	1.9
	9.00	28	51.9	51.9	53.7
	10.00	9	16.7	16.7	70.4
	11.00	7	13.0	13.0	83.3
	12.00	9	16.7	16.7	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

Kesesuaian_Kegiatan_Sekolah_dengan_Nilai_dan_Norma

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11.00	2	3.7	3.7	3.7
	12.00	13	24.1	24.1	27.8
	14.00	3	5.6	5.6	33.3
	15.00	5	9.3	9.3	42.6
	16.00	31	57.4	57.4	100.0
	Total	54	100.0	100.0	

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF DI SMK 2 YPKK SLEMAN

	Kemandirian	Kerjasama	Partisipasi	Keterbukaan	Akuntabilitas
N	Valid	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0
Mean	101.2903	41.0645	79.3548	48.1613	49.2581
Median	99.0000	40.0000	77.0000	46.0000	48.0000
Mode	94.00 ^a	36.00	75.00 ^a	44.00	45.00
Std. Deviation	8.70323	4.66859	6.42157	4.85865	4.78865
Variance	75.746	21.796	41.237	23.606	22.931
Range	27.00	14.00	23.00	18.00	16.00
Minimum	89.00	34.00	72.00	41.00	43.00
Maximum	116.00	48.00	95.00	59.00	59.00
Sum	3140.00	1273.00	2460.00	1493.00	1527.00

Kemandirian di SMK YPKK 2 Sleman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	89.00	1	3.23	3.23	3.23
	90.00	1	3.23	3.23	6.45
	91.00	2	6.45	6.45	12.90
	92.00	2	6.45	6.45	19.35
	94.00	3	9.68	9.68	29.03
	96.00	3	9.68	9.68	38.71
	97.00	1	3.23	3.23	41.94
	99.00	3	9.68	9.68	51.61

100.00	2	6.45	6.45	58.06
101.00	1	3.23	3.23	61.29
102.00	1	3.23	3.23	64.52
106.00	3	9.68	9.68	74.19
111.00	1	3.23	3.23	77.42
112.00	1	3.23	3.23	80.65
113.00	1	3.23	3.23	83.87
114.00	2	6.45	6.45	90.32
115.00	2	6.45	6.45	96.77
116.00	1	3.23	3.23	100.00
Total	31	100.00	100.00	

Kerjasama di SMK YPKK 2 Sleman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	34.00	1	3.2	3.23	3.23
	36.00	7	22.6	22.58	25.81
	37.00	1	3.2	3.23	29.03
	38.00	3	9.7	9.68	38.71
	40.00	4	12.9	12.90	51.61
	41.00	4	12.9	12.90	64.52
	42.00	1	3.2	3.23	67.74
	43.00	1	3.2	3.23	70.97
	46.00	1	3.2	3.23	74.19
	47.00	3	9.7	9.68	83.87
	48.00	5	16.1	16.13	100.00
Total		31	100.0	100.00	

Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	72.00	3	9.68	9.68	9.68
	73.00	2	6.45	6.45	16.13
	75.00	5	16.13	16.13	32.26
	76.00	5	16.13	16.13	48.39
	77.00	3	9.68	9.68	58.06

78.00	1	3.23	3.23	61.29
80.00	3	9.68	9.68	70.97
84.00	2	6.45	6.45	77.42
86.00	1	3.23	3.23	80.65
87.00	2	6.45	6.45	87.10
88.00	1	3.23	3.23	90.32
90.00	1	3.23	3.23	93.55
93.00	1	3.23	3.23	96.77
95.00	1	3.23	3.23	100.00
Total	31	100.00	100.00	

Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	41.00	1	3.23	3.23	3.23
	43.00	1	3.23	3.23	6.45
	44.00	6	19.35	19.35	25.81
	45.00	5	16.13	16.13	41.94
	46.00	3	9.68	9.68	51.61
	47.00	3	9.68	9.68	61.29
	49.00	2	6.45	6.45	67.74
	50.00	1	3.23	3.23	70.97
	51.00	1	3.23	3.23	74.19
	53.00	4	12.90	12.90	87.10
	57.00	3	9.68	9.68	96.77
	59.00	1	3.23	3.23	100.00
Total		31	100.00	100.00	

Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	43.00	1	3.23	3.23	3.23
	44.00	2	6.45	6.45	9.68
	45.00	6	19.35	19.35	29.03
	46.00	3	9.68	9.68	38.71
	47.00	3	9.68	9.68	48.39

48.00	1	3.23	3.23	51.61
49.00	3	9.68	9.68	61.29
50.00	1	3.23	3.23	64.52
51.00	3	9.68	9.68	74.19
52.00	1	3.23	3.23	77.42
54.00	1	3.23	3.23	80.65
55.00	2	6.45	6.45	87.10
56.00	1	3.23	3.23	90.32
59.00	3	9.68	9.68	100.00
Total	31	100.00	100.00	

Statistik Deskriptif Kemandirian SMK YPKK 2 Sleman per Indikator

		Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan	Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya	Kemampuan Manajemen	Kemampuan Kepemimpinan	Kemampuan Administrasi
N	Valid	31	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		27.1290	30.2903	24.0323	9.8710	9.9677
Median		27.0000	30.0000	24.0000	9.0000	9.0000
Mode		29.00	30.00	21.00	9.00	9.00
Std. Deviation		2.01233	2.95740	2.62658	1.20394	1.25124
Variance		4.049	8.746	6.899	1.449	1.566
Range		7.00	10.00	7.00	4.00	3.00
Minimum		23.00	26.00	21.00	8.00	9.00
Maximum		30.00	36.00	28.00	12.00	12.00
Sum		841.00	939.00	745.00	306.00	309.00

Kesanggupan_Pemenuhan_Kebutuhan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	23.00	1	3.2	3.2	3.2
	24.00	2	6.5	6.5	9.7
	25.00	5	16.1	16.1	25.8
	26.00	5	16.1	16.1	41.9
	27.00	3	9.7	9.7	51.6
	28.00	4	12.9	12.9	64.5

29.00	8	25.8	25.8	90.3
30.00	3	9.7	9.7	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kemampuan_Sumber_Daya_Manusia_dan_Sumber_Daya_Lainnya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 26.00	2	6.5	6.5	6.5
27.00	5	16.1	16.1	22.6
28.00	4	12.9	12.9	35.5
29.00	2	6.5	6.5	41.9
30.00	6	19.4	19.4	61.3
31.00	1	3.2	3.2	64.5
32.00	2	6.5	6.5	71.0
33.00	3	9.7	9.7	80.6
34.00	3	9.7	9.7	90.3
35.00	2	6.5	6.5	96.8
36.00	1	3.2	3.2	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kemampuan_Manajemen

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21.00	8	25.8	25.8	25.8
22.00	3	9.7	9.7	35.5
23.00	4	12.9	12.9	48.4
24.00	3	9.7	9.7	58.1
25.00	5	16.1	16.1	74.2
27.00	2	6.5	6.5	80.6
28.00	6	19.4	19.4	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kemampuan_Kepemimpinan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 8.00	1	3.2	3.2	3.2
9.00	16	51.6	51.6	54.8
10.00	5	16.1	16.1	71.0

11.00	4	12.9	12.9	83.9
12.00	5	16.1	16.1	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kemampuan_Administrasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 9.00	18	58.1	58.1	58.1
10.00	2	6.5	6.5	64.5
11.00	5	16.1	16.1	80.6
12.00	6	19.4	19.4	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Kerjasama di SMK YPKK 2 Sleman Per Indikator

	Kerjasama Internal	Kerjasama Eksternal
N Valid	31	31
Missing	0	0
Mean	16.7742	24.2903
Median	16.0000	25.0000
Mode	15.00	21.00
Std. Deviation	2.06090	2.85416
Variance	4.247	8.146
Range	6.00	8.00
Minimum	14.00	20.00
Maximum	20.00	28.00
Sum	520.00	753.00

Kerjasama_Internal

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 14.00	1	3.2	3.2	3.2
15.00	13	41.9	41.9	45.2
16.00	3	9.7	9.7	54.8
17.00	4	12.9	12.9	67.7
19.00	5	16.1	16.1	83.9
20.00	5	16.1	16.1	100.0

Total	31	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

Kerjasama_Eksternal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	1	3.2	3.2	3.2
	21.00	9	29.0	29.0	32.3
	23.00	3	9.7	9.7	41.9
	24.00	2	6.5	6.5	48.4
	25.00	6	19.4	19.4	67.7
	26.00	1	3.2	3.2	71.0
	27.00	1	3.2	3.2	74.2
	28.00	8	25.8	25.8	100.0
Total		31	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Partisipasi di SMK YPKK 2 Sleman per Indikator

		Kontribusi Stakeholders	Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan	Tanggungjawab Stakeholders	Kualitas dan Kuantitas Masukan Stakeholders	Kepedulian Stakeholders	Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi Stakeholders
N	Valid	31	31	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		25.2258	13.2258	9.7097	12.4194	9.5484	9.2258
Median		24.0000	13.0000	9.0000	12.0000	9.0000	9.0000
Mode		24.00	12.00	9.00	12.00	9.00	9.00
Std. Deviation		2.37641	1.38347	1.13118	1.33602	1.02758	.76200
Variance		5.647	1.914	1.280	1.785	1.056	.581
Range		9.00	4.00	3.00	6.00	3.00	3.00
Minimum		21.00	12.00	9.00	10.00	9.00	8.00
Maximum		30.00	16.00	12.00	16.00	12.00	11.00
Sum		782.00	410.00	301.00	385.00	296.00	286.00

Kontribusi_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21.00	1	3.2	3.2	3.2
	23.00	5	16.1	16.1	19.4

24.00	12	38.7	38.7	58.1
25.00	2	6.5	6.5	64.5
26.00	2	6.5	6.5	71.0
27.00	3	9.7	9.7	80.6
28.00	2	6.5	6.5	87.1
29.00	1	3.2	3.2	90.3
30.00	3	9.7	9.7	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12.00	14	45.2	45.2	45.2
	13.00	5	16.1	16.1	61.3
	14.00	6	19.4	19.4	80.6
	15.00	3	9.7	9.7	90.3
	16.00	3	9.7	9.7	100.0
Total		31	100.0	100.0	

Tanggungjawab Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9.00	20	64.5	64.5	64.5
	10.00	5	16.1	16.1	80.6
	11.00	1	3.2	3.2	83.9
	12.00	5	16.1	16.1	100.0
Total		31	100.0	100.0	

Kualitas dan Kuantitas Masukan Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	10.00	1	3.2	3.2	3.2
	11.00	5	16.1	16.1	19.4
	12.00	14	45.2	45.2	64.5
	13.00	6	19.4	19.4	83.9
	14.00	3	9.7	9.7	93.5
	16.00	2	6.5	6.5	100.0
Total		31	100.0	100.0	

Kepedulian_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	9.00	23	74.2	74.2	74.2
	10.00	2	6.5	6.5	80.6
	11.00	3	9.7	9.7	90.3
	12.00	3	9.7	9.7	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Keputusan_Sekolah_Berdasarkan_Aspirasi_Stakeholders

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	4	12.9	12.9	12.9
	9.00	18	58.1	58.1	71.0
	10.00	7	22.6	22.6	93.5
	11.00	2	6.5	6.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Keterbukaan di SMK YPKK 2 Sleman per Indikator

		Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Peningkatan Partisipasi Publik	Wawasan dan Pengetahuan Publik	Berkurangnya Pelanggaran
N	Valid	31	31	31	31
	Missing	0	0	0	0
Mean		16.3226	9.3548	9.2581	13.2258
Median		15.0000	9.0000	9.0000	13.0000
Mode		15.00	9.00	9.00	12.00
Std. Deviation		1.88657	1.33037	.96498	1.56439
Variance		3.559	1.770	.931	2.447
Range		5.00	5.00	4.00	4.00
Minimum		15.00	7.00	7.00	12.00
Maximum		20.00	12.00	11.00	16.00
Sum		506.00	290.00	287.00	410.00

Keyakinan_dan_Kepercayaan_Publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	15.00	18	58.1	58.1	58.1
	16.00	3	9.7	9.7	67.7
	17.00	2	6.5	6.5	74.2
	18.00	2	6.5	6.5	80.6
	19.00	2	6.5	6.5	87.1
	20.00	4	12.9	12.9	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Peningkatan_Partisipasi_Publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7.00	1	3.2	3.2	3.2
	8.00	8	25.8	25.8	29.0
	9.00	11	35.5	35.5	64.5
	10.00	3	9.7	9.7	74.2
	11.00	6	19.4	19.4	93.5
	12.00	2	6.5	6.5	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Wawasan_dan_Pengetahuan_Publik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	7.00	2	6.5	6.5	6.5
	8.00	1	3.2	3.2	9.7
	9.00	19	61.3	61.3	71.0
	10.00	5	16.1	16.1	87.1
	11.00	4	12.9	12.9	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Berkurangnya_Pelanggaran

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12.00	15	48.4	48.4	48.4
	13.00	7	22.6	22.6	71.0
	14.00	2	6.5	6.5	77.4

15.00	1	3.2	3.2	80.6
16.00	6	19.4	19.4	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Statistik Deskriptif Akuntabilitas di SMK YPKK 2 Sleman per Indikator

	Kepercayaan dan Kepuasan Publik	Kesadaran Publik untuk Menilai	Berkurangnya Kasus KKN	Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma
N Valid	31	31	31	31
Missing	0	0	0	0
Mean	12.6129	12.5806	9.7742	14.2903
Median	12.0000	12.0000	9.0000	14.0000
Mode	12.00	12.00	9.00	16.00
Std. Deviation	1.25638	1.52259	1.30919	1.67717
Variance	1.578	2.318	1.714	2.813
Range	4.00	6.00	4.00	4.00
Minimum	11.00	10.00	8.00	12.00
Maximum	15.00	16.00	12.00	16.00
Sum	391.00	390.00	303.00	443.00

Kepercayaan_dan_Kepuasan_Publik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 11.00	3	9.7	9.7	9.7
12.00	18	58.1	58.1	67.7
13.00	3	9.7	9.7	77.4
14.00	2	6.5	6.5	83.9
15.00	5	16.1	16.1	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Kesadaran_Publik_untuk_Menilai

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 10.00	1	3.2	3.2	3.2
11.00	2	6.5	6.5	9.7

12.00	20	64.5	64.5	74.2
13.00	2	6.5	6.5	80.6
14.00	2	6.5	6.5	87.1
16.00	4	12.9	12.9	100.0
Total	31	100.0	100.0	

Berkurangnya_Kasus_KKN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	8.00	2	6.5	6.5	6.5
	9.00	18	58.1	58.1	64.5
	10.00	2	6.5	6.5	71.0
	11.00	3	9.7	9.7	80.6
	12.00	6	19.4	19.4	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

Kesesuaian_Kegiatan_Sekolah_dengan_Nilai_dan_Norma

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	12.00	8	25.8	25.8	25.8
	13.00	2	6.5	6.5	32.3
	14.00	7	22.6	22.6	54.8
	15.00	1	3.2	3.2	58.1
	16.00	13	41.9	41.9	100.0
	Total	31	100.0	100.0	

PERHITUNGAN OLAH DATA KUESIONER

PERHITUNGAN OLAH DATA KUESIONER PER VARIABEL

1. Kemandirian

a) Kecenderungan Variabel Kemandirian di SMK Negeri 1 Tempel

$$\text{Jumlah butir} = 30$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 30 \times 1 = 30$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 30 \times 4 = 120$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (120 + 30) \\ &= 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (120 - 30) \\ &= 15 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemandirian dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 75 + 1.5(15) \\ &= X \geq 75 + 22.5 \\ &= X \geq 97.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 75 \leq X < 75 + 1.5(15) \\ &= 75 \leq X < 97.5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < 75 \\ &= 75 - 1.5(15) \leq X < 75 \\ &= 52.5 \leq X < 75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Baik} &= X \leq M - 1.5(SD) \\ &= X \leq 75 - 1.5(15) \\ &= X \leq 52.5 \end{aligned}$$

2. Kerjasama

a) Kecenderungan Variabel Kerjasama di SMK Negeri 1 Tempel

$$\text{Jumlah butir} = 12$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 12 \times 1 = 12$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 12 \times 4 = 48$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (48 + 12) \\ &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (48 - 12) \end{aligned}$$

$$= 6$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemandirian dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 30 + 1.5(6)$ $= X \geq 30 + 9$ $= X \geq 39$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 30 \leq X < 30 + 1.5(6)$ $= 30 \leq X < 39$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < 30$ $= 30 - 1.5(6) \leq X < 30$ $= 21 \leq X < 30$
Tidak Baik	$= X \leq 30 - 1.5(6)$ $= X \leq 30 - 1.5(6)$ $= X \leq 21$

3. Partisipasi

a) Kecenderungan Variabel Partisipasi di SMK Negeri 1 Tempel

$$\text{Jumlah butir} = 25$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 25 \times 1 = 25$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 25 \times 4 = 100$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (100 + 25)$$

$$= 62,5$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (100 - 25)$$

$$= 12,5$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Partisipasi dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 62,5 + 1.5(12,5)$ $= X \geq 62,5 + 18,75$ $= X \geq 81,25$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 62,5 \leq X < 62,5 + 1.5(12,5)$ $= 62,5 \leq X < 81,25$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$ $= 62,5 - 1,5(12,5) \leq X < 62,5$ $= 43,75 \leq X < 62,5$
Tidak Baik	$= X \leq Mi - 1.5(SD)$ $= X \leq 62,5 - 1,5(12,5)$ $= X \leq 43,75$

4. Keterbukaan

a) Kecenderungan Variabel Keterbukaan di SMK Negeri 1 Tempel

$$\text{Jumlah butir} = 15$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 15 \times 1 = 15$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 15 \times 4 = 60$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (60 + 15) \\ &= 37,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (60 - 15) \\ &= 7,5 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemandirian dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 37,5 + 1.5(7,5) \\ &= X \geq 37,5 + 11,25 \\ &= X \geq 48,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 37,5 \leq X < 37,5 + 1.5(7.5) \\ &= 37,5 \leq X < 48,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\ &= 37,5 - 1,5(7,5) \leq X < 37,5 \\ &= 26,25 \leq X < 37,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\ &= X \leq 37,5 - 1,5(7.5) \\ &= X \leq 26,25 \end{aligned}$$

5. Akuntabilitas

a) Kecenderungan Variabel Akuntabilitas di SMK Negeri 1 Tempel

$$\text{Jumlah butir} = 15$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 15 \times 1 = 15$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 15 \times 4 = 60$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (60 + 15) \\ &= 37,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (60 - 15) \\ &= 7,5 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemandirian dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 37,5 + 1.5(7,5)$ $= X \geq 37,5 + 11,25$ $= X \geq 48,75$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 37,5 \leq X < 37,5 + 1.5(7.5)$ $= 37,5 \leq X < 48,75$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$ $= 37,5 - 1,5(7,5) \leq X < 37,5$ $= 26,25 \leq X < 37,5$
Tidak Baik	$= X \leq Mi - 1.5(SD)$ $= X \leq 37,5 - 1,5(7.5)$ $= X \leq 26,25$

PERHITUNGAN OLAH DATA KUESIONER PER INDIKATOR

1. Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan SMK Negeri Tempel dan SMK YPKK 2

Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan SMK

Negeri Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir= 8

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 8 X 1 = 8

Nilai Maksimum = 8 X 4 = 32

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

= 1/2 (32 + 8)

= 20

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

= 1/6 (32 – 8)

= 4

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik = $X \geq Mi + 1.5SD$

= $X \geq 20 + 1.5(4)$

= $X \geq 20 + 6$

= $X \geq 26$

Baik = $Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$

= $20 \leq X < 20 + 1.5(4)$

= $20 \leq X < 26$

Kurang Baik = $Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$

= $20 - 1,5(4) \leq X < 20$

$$\begin{aligned}
 &= 14 \leq X < 20 \\
 \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
 &= X \leq 20 - 1,5(4) \\
 &= X \leq 14
 \end{aligned}$$

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
 \text{Jumah butir} &= 9 \\
 \text{Penskoran} &= 1 - 4 \\
 \text{Nilai Minimum} &= 9 \times 1 = 9 \\
 \text{Nilai Maksimum} &= 9 \times 4 = 36 \\
 M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\
 &= 1/2 (36 + 9) \\
 &= 22,5 \\
 SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\
 &= 1/6 (36 - 9) \\
 &= 4,5
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\
 &= X \geq 22,5 + 1.5(4,5) \\
 &= X \geq 22,5 + 6,75 \\
 &= X \geq 29,25 \\
 \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
 &= 22,5 \leq X < 22,5 + 1.5(4,5) \\
 &= 22,5 \leq X < 29,25 \\
 \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
 &= 22,5 - 1,5(4,5) \leq X < 22,5 \\
 &= 15,75 \leq X < 22,5 \\
 \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
 &= X \leq 22,5 - 1,5(4,5) \\
 &= X \leq 15,75
 \end{aligned}$$

3. Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kemampuan Manajemen di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
 \text{Jumah butir} &= 7 \\
 \text{Penskoran} &= 1 - 4 \\
 \text{Nilai Minimum} &= 7 \times 1 = 7
 \end{aligned}$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 7 \times 4 = 28$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (28 + 7) \\ &= 17,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (28 - 7) \\ &= 3,5 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK

2 Sleman

Sangat baik	$\begin{aligned} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 17,5 + 1.5(3,5) \\ &= X \geq 17,5 + 5,25 \\ &= X \geq 22,75 \end{aligned}$
Baik	$\begin{aligned} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 17,5 \leq X < 17,5 + 1.5(3,5) \\ &= 17,5 \leq X < 22,75 \end{aligned}$
Kurang Baik	$\begin{aligned} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\ &= 17,5 - 1,5(3,5) \leq X < 17,5 \\ &= 12,25 \leq X < 17,5 \end{aligned}$
Tidak Baik	$\begin{aligned} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\ &= X \leq 22,5 - 1,5(4,5) \\ &= X \leq 12,25 \end{aligned}$

4. Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Jumlah butir} = 3$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 3 \times 4 = 12$$

$$\begin{aligned} M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\ &= 1/2 (12 + 3) \\ &= 7,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (12 - 3) \\ &= 1,5 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kemampuan Kepemimpinan di SMK Negeri 1 Tempel

Sangat baik	$\begin{aligned} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \end{aligned}$
-------------	--

$$\begin{aligned}
&= X \geq 7,5 + 2,25 \\
&= X \geq 9,75 \\
\text{Baik} &= M_i \leq X < M_i + 1.5(SD) \\
&= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= 7,5 \leq X < 9,75 \\
\text{Kurang Baik} &= M_i - 1.5(SD) \leq X < M_i \\
&= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\
&= 5,25 \leq X < 7,5 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq M_i - 1.5(SD) \\
&= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\
&= X \leq 5,25
\end{aligned}$$

5. Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kemampuan Administrasi di SMK YPKK 2 Sleman

Jumlah butir = 7

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 3 X 1 = 3

Nilai Maksimum = 3 X 4 = 12

$M = 1/2$ (nilai maksimum + nilai minimum)

$= 1/2 (12 + 3)$

$= 7,5$

$SD = 1/6$ (nilai maksimum – nilai minimum)

$= 1/6 (12 - 3)$

$= 1,5$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kemampuan Administrasi di SMK Negeri 1 Tempel

$$\begin{aligned}
\text{Sangat baik} &= X \geq M_i + 1.5SD \\
&= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= X \geq 7,5 + 2,25 \\
&= X \geq 9,75 \\
\text{Baik} &= M_i \leq X < M_i + 1.5(SD) \\
&= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= 7,5 \leq X < 9,75 \\
\text{Kurang Baik} &= M_i - 1.5(SD) \leq X < M_i \\
&= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\
&= 5,25 \leq X < 7,5 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq M_i - 1.5(SD) \\
&= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\
&= X \leq 5,25
\end{aligned}$$

1. Kerjasama Internal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman
a) Kecenderungan Indikator Kerjasama Internal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir = 5

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 5 X 1 = 5

Nilai Maksimum = 5 X 4 = 20

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

= 1/2 (20 + 5)

= 12,5

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

= 1/6 (20 – 5)

= 2,33

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kerjasama Internal di SMK

Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Sangat baik = $X \geq M_i + 1.5SD$

= $X \geq 12,5 + 1.5(2,33)$

= $X \geq 12,5 + 3,35$

= $X \geq 15,85$

Baik = $M_i \leq X < M_i + 1.5(SD)$

= $12,5 \leq X < 12,5 + 1.5(2,33)$

= $12,5 \leq X < 15,85$

Kurang Baik = $M_i - 1.5(SD) \leq X < M_i$

= $12,5 - 1,5(2,33) \leq X < 12,5$

= $9,15 \leq X < 12,5$

Tidak Baik = $X \leq M_i - 1.5(SD)$

= $X \leq 12,5 - 1,5(2,33)$

= $X \leq 9,15$

2. Kerjasama Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman
a) Kecenderungan Indikator Kerjasama Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir= 7

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 7 X 1 = 7

Nilai Maksimum = 7 X 4 = 28

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

= 1/2 (28 + 7)

= 17,5

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

= 1/6 (28 – 7)

= 3,5

Untuk mengetahui kecenderungan skor Indikator Kerjasama Eksternal di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\
 &= X \geq 17,5 + 1.5(3,5) \\
 &= X \geq 17,5 + 5,25 \\
 &= X \geq 22,75 \\
 \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
 &= 17,5 \leq X < 17,5 + 1.5(3,5) \\
 &= 17,5 \leq X < 22,75 \\
 \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
 &= 17,5 - 1,5(3,5) \leq X < 17,5 \\
 &= 12,25 \leq X < 17,5 \\
 \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
 &= X \leq 22,5 - 1,5(4,5) \\
 &= X \leq 12,25
 \end{aligned}$$

1. Kontribusi Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman
a) Kecenderungan Indikator Kontribusi Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
 \text{Jumah butir} &= 8 \\
 \text{Penskoran} &= 1 - 4 \\
 \text{Nilai Minimum} &= 8 \times 1 = 8 \\
 \text{Nilai Maksimum} &= 8 \times 4 = 32 \\
 M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\
 &= 1/2 (32 + 8) \\
 &= 20 \\
 SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\
 &= 1/6 (32 - 8) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kesanggupan Pemenuhan Kebutuhan dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\
 &= X \geq 20 + 1.5(4) \\
 &= X \geq 20 + 6 \\
 &= X \geq 26 \\
 \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
 &= 20 \leq X < 20 + 1.5(4) \\
 &= 20 \leq X < 26 \\
 \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
 &= 20 - 1,5(4) \leq X < 20 \\
 &= 14 \leq X < 20 \\
 \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
 &= X \leq 20 - 1,5(4)
 \end{aligned}$$

$$= X \leq 14$$

2. Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan di SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Jumlah butir} = 4$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 4 \times 1 = 4$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 4 \times 4 = 16$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (16 + 4)$$

$$= 10$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (16 - 4)$$

$$= 2$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\text{Sangat baik} = X \geq Mi + 1.5SD$$

$$= X \geq 10 + 1.5(2)$$

$$= X \geq 10 + 3$$

$$= X \geq 13$$

$$\text{Baik} = Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$$

$$= 10 \leq X < 10 + 1.5(2)$$

$$= 10 \leq X < 13$$

$$\text{Kurang Baik} = Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$$

$$= 10 - 1.5(2) \leq X < 10$$

$$= 7 \leq X < 10$$

$$\text{Tidak Baik} = X \leq Mi - 1.5(SD)$$

$$= X \leq 10 - 1.5(2)$$

$$= X \leq 7$$

3. Tanggung Jawab Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Tanggung Jawab Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Jumlah butir} = 3$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 3 \times 4 = 12$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (12 + 3)$$

$$= 7,5$$

$$\begin{aligned}SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\ &= 1/6 (12 - 3) \\ &= 1,5\end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Tanggung Jawab Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}\text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \\ &= X \geq 7,5 + 2,25 \\ &= X \geq 9,75 \\ \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\ &= 7,5 \leq X < 9,75 \\ \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\ &= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\ &= 5,25 \leq X < 7,5 \\ \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\ &= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\ &= X \leq 5,25\end{aligned}$$

4. Kualitas dan Kuantitas Masukan Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kualitas dan Kuantitas Masukan Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir= 4

Penskoran = 1 - 4

Nilai Minimum = 4 X 1 = 4

Nilai Maksimum = 4 X 4 = 16

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

= 1/2 (16 + 4)

= 10

SD = 1/6 (nilai maksimum - nilai minimum)

= 1/6 (16 - 4)

= 2

Untuk mengetahui kecenderungan skor indicator Kepercayaan Stakeholders Terkait Kewibawaan dan Kebersihan

dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 10 + 1.5(2) \\ &= X \geq 10 + 3 \\ &= X \geq 13 \\ \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 10 \leq X < 10 + 1.5(2) \\ &= 10 \leq X < 13 \\ \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\ &= 10 - 1,5(2) \leq X < 10\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 7 \leq X < 10 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
&= X \leq 10 - 1,5(2) \\
&= X \leq 7
\end{aligned}$$

5. Kepedulian Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMk YPKK 2 Sleman
a) Kecenderungan Indikator Kepedulian Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMk YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
\text{Jumlah Butir} &= 3 \\
\text{Penskoran} &= 1 - 4 \\
\text{Nilai Minimum} &= 3 \times 1 = 3 \\
\text{Nilai Maksimum} &= 3 \times 4 = 12 \\
M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\
&= 1/2 (12 + 3) \\
&= 7,5 \\
SD &= 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}) \\
&= 1/6 (12 - 3) \\
&= 1,5
\end{aligned}$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel

$$\begin{aligned}
\text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\
&= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= X \geq 7,5 + 2,25 \\
&= X \geq 9,75 \\
\text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
&= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= 7,5 \leq X < 9,75 \\
\text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
&= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\
&= 5,25 \leq X < 7,5 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
&= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\
&= X \leq 5,25
\end{aligned}$$

6. Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\begin{aligned}
\text{Jumah butir} &= 3 \\
\text{Penskoran} &= 1 - 4 \\
\text{Nilai Minimum} &= 3 \times 1 = 3 \\
\text{Nilai Maksimum} &= 3 \times 4 = 12 \\
M &= 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum}) \\
&= 1/2 (12 + 3)
\end{aligned}$$

$$= 7,5$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (12 - 3)$$

$$= 1,5$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Keputusan Sekolah Berdasarkan Aspirasi Stakeholders di SMK Negeri 1 Tempel

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 7,5 + 1.5(1,5)$ $= X \geq 7,5 + 2,25$ $= X \geq 9,75$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5)$ $= 7,5 \leq X < 9,75$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$ $= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5$ $= 5,25 \leq X < 7,5$
Tidak Baik	$= X \leq Mi - 1.5(SD)$ $= X \leq 7,5 - 1,5(1,5)$ $= X \leq 5,25$

1. Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir = 5
Penskoran = 1 - 4
Nilai Minimum = 5 X 1 = 5
Nilai Maksimum = 5 X 4 = 20
 $M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$
 $= 1/2 (20 + 5)$
 $= 12,5$
 $SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$
 $= 1/6 (20 - 5)$
 $= 2,33$

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Keyakinan dan Kepercayaan Publik di SMK Negeri 1 Tempel

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 12,5 + 1.5(2,33)$ $= X \geq 12,5 + 3,35$ $= X \geq 15,85$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 12,5 \leq X < 12,5 + 1.5(2,33)$ $= 12,5 \leq X < 15,85$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$

$$\begin{aligned}
&= 12,5 - 1,5(2,33) \leq X < 12,5 \\
&= 9,15 \leq X < 12,5 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
&= X \leq 12,5 - 1,5(2,33) \\
&= X \leq 9,15
\end{aligned}$$

2. Peningkatan Partisipasi Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Peningkatan Partisipasi Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir= 3

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 3 X 1 = 3

Nilai Maksimum = 3 X 4 = 12

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

= 1/2 (12 + 3)

= 7,5

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

= 1/6 (12 – 3)

= 1,5

Untuk mengetahui kecenderungan skor variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lainnya di SMK Negeri 1 Tempel

$$\begin{aligned}
\text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\
&= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= X \geq 7,5 + 2,25 \\
&= X \geq 9,75
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
&= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\
&= 7,5 \leq X < 9,75
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
&= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\
&= 5,25 \leq X < 7,5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
&= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\
&= X \leq 5,25
\end{aligned}$$

3. Wawasan dan Pengetahuan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Wawasan dan Pengetahuan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 3 \times 4 = 12$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (12 + 3)$$

$$= 7,5$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (12 - 3)$$

$$= 1,5$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Wawasan dan Pengetahuan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah di SMK Negeri 1 Tempel

$$\begin{aligned} \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 7,5 + 1.5(1,5) \\ &= X \geq 7,5 + 2,25 \\ &= X \geq 9,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\ &= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5) \\ &= 7,5 \leq X < 9,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\ &= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5 \\ &= 5,25 \leq X < 7,5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\ &= X \leq 7,5 - 1,5(1,5) \\ &= X \leq 5,25 \end{aligned}$$

4. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang Undangan di SMK Negeri 1 Tempel dan SMk YPKK 2 Sleman

a) Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang Undangan di SMk Negeri 1 Tempel dan SMk YPKK 2 Sleman

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 4 \times 1 = 4$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 4 \times 4 = 16$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (16 + 4)$$

$$= 10$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (16 - 4)$$

$$= 2$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indicator Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang Undangan dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Sangat baik} &= X \geq Mi + 1.5SD \\ &= X \geq 10 + 1.5(2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= X \geq 10 + 3 \\
&= X \geq 13 \\
\text{Baik} &= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD) \\
&= 10 \leq X < 10 + 1.5(2) \\
&= 10 \leq X < 13 \\
\text{Kurang Baik} &= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi \\
&= 10 - 1,5(2) \leq X < 10 \\
&= 7 \leq X < 10 \\
\text{Tidak Baik} &= X \leq Mi - 1.5(SD) \\
&= X \leq 10 - 1,5(2) \\
&= X \leq 7
\end{aligned}$$

1. Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kepercayaan dan Kepuasan Publik di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumah butir= 4

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 4 X 1 = 4

Nilai Maksimum = 4 X 4 = 16

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

$$= 1/2 (16 + 4)$$

$$= 10$$

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

$$= 1/6 (16 - 4)$$

$$= 2$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indicator Kepercayaan dan Kepuasan Publik

dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik = $X \geq Mi + 1.5SD$

$$= X \geq 10 + 1.5(2)$$

$$= X \geq 10 + 3$$

$$= X \geq 13$$

Baik = $Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$

$$= 10 \leq X < 10 + 1.5(2)$$

$$= 10 \leq X < 13$$

Kurang Baik = $Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$

$$= 10 - 1,5(2) \leq X < 10$$

$$= 7 \leq X < 10$$

Tidak Baik = $X \leq Mi - 1.5(SD)$

$$= X \leq 10 - 1,5(2)$$

$$= X \leq 7$$

2. Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 4 \times 1 = 4$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 4 \times 4 = 16$$

$$M = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (16 + 4)$$

$$= 10$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (16 - 4)$$

$$= 2$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kesadaran Publik untuk Menilai di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

$$\text{Sangat baik} = X \geq Mi + 1.5SD$$

$$= X \geq 10 + 1.5(2)$$

$$= X \geq 10 + 3$$

$$= X \geq 13$$

$$\text{Baik} = Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$$

$$= 10 \leq X < 10 + 1.5(2)$$

$$= 10 \leq X < 13$$

$$\text{Kurang Baik} = Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$$

$$= 10 - 1.5(2) \leq X < 10$$

$$= 7 \leq X < 10$$

$$\text{Tidak Baik} = X \leq Mi - 1.5(SD)$$

$$= X \leq 10 - 1.5(2)$$

$$= X \leq 7$$

3. Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Berkurangnya Kasus KKN di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

$$\text{Jumah butir} = 3$$

$$\text{Penskoran} = 1 - 4$$

$$\text{Nilai Minimum} = 3 \times 1 = 3$$

$$\text{Nilai Maksimum} = 3 \times 4 = 12$$

$$Mi = 1/2 (\text{nilai maksimum} + \text{nilai minimum})$$

$$= 1/2 (12 + 3)$$

$$= 7,5$$

$$SD = 1/6 (\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

$$= 1/6 (12 - 3)$$

$$= 1,5$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Berkurangnya Kasus KKN

Sangat baik	$= X \geq Mi + 1.5SD$ $= X \geq 7,5 + 1.5(1,5)$ $= X \geq 7,5 + 2,25$ $= X \geq 9,75$
Baik	$= Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$ $= 7,5 \leq X < 7,5 + 1.5(1,5)$ $= 7,5 \leq X < 9,75$
Kurang Baik	$= Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$ $= 7,5 - 1,5(1,5) \leq X < 7,5$ $= 5,25 \leq X < 7,5$
Tidak Baik	$= X \leq Mi - 1.5(SD)$ $= X \leq 7,5 - 1,5(1,5)$ $= X \leq 5,25$

4. Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

a) Kecenderungan Indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman

Jumlah butir= 4

Penskoran = 1 – 4

Nilai Minimum = 4 X 1 = 4

Nilai Maksimum = 4 X 4 = 16

M = 1/2 (nilai maksimum + nilai minimum)

$$= 1/2 (16 + 4)$$

$$= 10$$

SD = 1/6 (nilai maksimum – nilai minimum)

$$= 1/6 (16 - 4)$$

$$= 2$$

Untuk mengetahui kecenderungan skor indikator Kesesuaian Kegiatan Sekolah dengan Nilai dan Norma di SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman dilakukan dengan hitungan sebagai berikut:

Sangat baik = $X \geq Mi + 1.5SD$

$$= X \geq 10 + 1.5(2)$$

$$= X \geq 10 + 3$$

$$= X \geq 13$$

Baik = $Mi \leq X < Mi + 1.5(SD)$

$$= 10 \leq X < 10 + 1.5(2)$$

$$= 10 \leq X < 13$$

Kurang Baik = $Mi - 1.5(SD) \leq X < Mi$

$$= 10 - 1,5(2) \leq X < 10$$

$$= 7 \leq X < 10$$

Tidak Baik = $X \leq Mi - 1.5(SD)$

$$= X \leq 10 - 1,5(2)$$

$$= X \leq 7$$

LAMPIRAN 5

REDUKSI HASIL WAWANCARA

Nama Responden : Drs. Agus Priyono
Jabatan Responden : Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
Tempat Wawancara :Depan ruang guru SMK YPKK 2 Sleman
Tanggal Wawancara : Senin, 14 Mei 2018
Waktu Wawancara : 10.00 – 10.40

Sumber Daya Manusia di SMK YPKK 2 Sleman secara kuanitas sudah memenuhi namun secara kualitas masih belum memenuhi misalnya adalah tenaga Tata Usaha belum semua bergelar sarjana, Ada 2 yang sudah bergelar sarjana dan sisanya masih lulusan SLTA. Mereka bisa bekerja namun kualitas antara yang bergelar sarjana dan tidak berbeda. Selanjutnya, Guru, belum semua guru bersertifikasi. Untuk sarana dan prasarana KBM sudah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal, karena ada beberapa hal. Pertama dari keterbatasan tempat, mungkin ada yang bisa dibeli, tapi tidak ada tempatnya. Kedua, terkait dengan pendanaan, siswa yang bersekolah di sini, kebanyakan menengah kebawah, jadi mungkin ada yang harus segera dibeli namun belum terpenuhi karena belum ada dananya. Kinerja guru dan tenaga kependidikan sudah baik namun belum baik sekali. Karena selain pendidikan, dari segi administrasi belum sepenuhnya. Pengelolaan sarana dan prasarana, bagian yang mempunyai tugas itu, belum mempunyai latar belakang yang sesuai dengan sarana, contohnya, bagian yang mempunyai tugas itu, belum memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, contoh bagian sarana dan prasarana tidak bisa memperbaiki barang yang rusak karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tapi secara kuantitas bisa berjalan, bisa digunakan, meskipun menggunakan tenaga dari luar sekolah. Manajemen kesiswaan tidak terdapat kendala, tapi secara pengelolaan tergantung situasi, praktik pengelolaan kesiswaan dalam praktiknya tidak selalu sama tetapsesuai dengan situasi dan kondisi. Kurikulum yang digunakan di SMK YPKK 2 Sleman mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah yaitu K13. Sekolah ini termasuk yang lebih cepat menyesuaikan kurikulum, karena sudah sampai kelas 12 yang menerapkan K13. Pengelolaan pembiayaan sekolah sangat sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Disini tidak ada penyalahgunaan uang, transparan, kemudian bahkan bisa menyisihkan anggaran berjalan dan bisa menghemat, karena manajemen disekolah ini termasuk konsultan, konsultannya mbak umi sebagai bendahara, semua kegiatan saya minta menyisihkan 10%. Sehingga 10% bisa digunakan untuk menutup yang mungkin overload. Hubungan sekolah dan masyarakat sangat baik, karena kegiatan sekolah selalu melibatkan masyarakat, misalnya khitanan massal, bakti social, tidak hanya dari masyarakat yang dekat saja, tetapi juga masyarakat yang jauh, manajemen layanan khusus baru dalam keadaan baik karena YPKK terbatas tempat, kepemimpinan kepala sekolah, secara social dan kemanusiaan bagus, tapi untuk manajemen secara mutu masih perlu ada peningkatan, contoh rapat dinas masih terlalu minim, teguran yang seharusnya keras masih belum berani, ya YPKK ini bisa seperti sekarang bukan hanya karena kepala sekolah, tetapi karena *teamwork* yang ada, Administrasi guru disusun secara tertib menyusun administrasinya. Sekolah ini sangat berdiri, karena swasta, dan setiap tahun bisa menyisihkan dari anggaran berjalan, sumber pendanaannya tidak dari pemerintah tapi dari masyarakat, kegiatan sekolah. Kerjasama internal sudah berjalan dengan baik, terbukti saat ada permasalahan saling berbagi, kerjasama sekolah dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, contohnya adalah kerjasama dengan Disnake, kami mendapatkan sekolah penyalur tenaga kerja terbaik, kedua, saat PKL kami kekurangan siswa, ini menunjukkan bahwa mereka sangat mempercayai YPKK, termasuk pasca kelulusan mereka sangat membutuhkan kita, misalnya mereka membutuhkan 40 tapi kita hanya bisa menyediakan 10-15. Dengan DUDI kerjasama baik sekali, bahkan kami kekurangan anak untuk ditempatkan PKL disana, termasuk rekrutmen bukan anak-anak yang melamar mereka, tetapi mereka yang melamar ke kami.

Kontribusi *Stakeholders*, yang jelas untuk wali murid mendukung dari segi pembiayaan, memberikan kesempatan lowongan dan sebagainya. Kontribusi wali murid dalam kegiatan sekolah bagus, terbukti saat ada undangan sekolah 90% hadir. Dari segi dana 30% wali murid menghambat dalam membayar biaya sekolah. Stakeholders percaya bahwa sekolah ini bersih dan berwibawa karena mereka yang membuat dan mengalami, bentuk tanggungjawab stakeholders kurang lebih 80% karena kurang peduli. Saran dan masukan

dari stakeholders sangat bagus, dan akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. Stakeholders peduli dengan sekolah, misalnya pemerintah membantu sekolah menyediakan dana dalam bentuk BOS rehabilitasi sekolah, bantuan gedung dan lain-lain. Keputusan sekolah diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Public percaya bahwa sekolah sudah terbuka, kami tidak pernah menyembunyikan laporan atau rahasia. Kami menyampaikan keterbukaan baik informasi maupun keuangan program melalui rapat, papan pengumuman dan pengumuman langsung melalui siswa. baik keuangan maupun melalui Peningkatan partisipasi meningkat dapat dilihat dari semakin majunya sekolah baik dari fasilitas pembelajaran maupun prestasi siswa, namun seperti biasa partisipasi dari dukungan dana terkadang masih belum maksimal. Publik sekolah mengetahui program sekolah karena terlibat langsung dalam kegiatan sekolah, misalnya melalui program khitanan massal, bakti social dan sebagainya. Di sekolah ini Alhamdulillah belum pernah terjadi penyimpangan yang sampai melanggar aturan undang-undang.

Publik sudah puas karena lulusan ypkk setelah lulus mayoritas langsung mendapatkan pekerjaan. Kesadaran public untuk menilai baik, hal ini dapat ditunjukkan dengan aktifnya saat rapat dan diskusinya hidup. Di sini belum pernah terdapat kasus KKN, suap, maupun hal menyimpang lainnya. Kegiatan sekolah sudah sesuai dengan nilai dan norma misalnya kami berusaha meningkatkan nilai keagamaan melalui kegiatan sholat dhuha. Khitanan massal dan bakti social karena kita peduli dengan masyarakat.

Nama Responden : Drs Ircham Rosyidi
Jabatan Responden : Kepala Sekolah
Tempat Wawancara : Ruang Kepala Sekolah
Tanggal Wawancara : Senin, 21 Mei 2018
Waktu Wawancara : 09.00 – 9.30

Pemenuhan kebutuhan dilihat dari sumber daya manusia, sudah mencukupi, 17 guru sudah bersertifikasi, walaupun masih ada yang belum S1, tenaga kependidikan yang S1 baru 2, paling tidak ke depannya harus S1, yang penting untuk tenaga kependidikan harus bisa menguasai pelayanan kepada peserta didik maupun orang tua. Tenaga kependidikan tidak harus sarjana, karena sekolah belum kuat dalam membiayai gaji sarjana. Sarana dan prasarana sudah ada yang kurang yaitu berupa lahan dan ruangan. Kita sudah berusaha mencari tempat parkir, karena wilayah ini sudah padat penduduk. Kedua masalah pendanaan, kendalanya seperti sekolah pada umumnya dimana masih banyak yang belum bisa melunasi kewajiban administrasinya saat waktu yang ditentukan. Jika dilihat dari pengelolaan sarana prasarana, sudah memenuhi standar, hanya saja terkadang kekurangan teknisi dalam penggunaan perlengkapan. Kinerja guru dan tenaga pendidikan sudah baik, namun terkadang masih ada beberapa yang belum tertib. Penggunaan pendanaan sudah berjalan maksimal, kami bisa memenuhi keuangan dalam setiap program bahkan bisa menyisihkan sedikit. Kegiatan manajemen secara umum sudah baik, kurikulum yang kami gunakan sampai kelas 12 ini sudah menggunakan K13. Kesiswaan juga berjalan dengan baik karena semua menjalankan tugas sesuai dengan perannya. Kendala selama memimpin, saya sendiri belum berpengalaman, administrasi kepala sekolah itu seperti apa, saya juga belum pernah mengikuti pelatihan tentang kepala sekolah, sementara kita mengikuti instruksi dari pemerintah kita jalani. Kegiatan administrasi lancar walaupun terkadang ada beberapa yang kurang tertib.

Kerjasama internal selama ini sudah berjalan dengan baik. Sekolah bisa berdiri sampai sejauh ini karna kerjasama yang kompak baik antar warga sekolah. Kerjasama eksternal tidak ada masalah, baik itu balai dikmen dan dikpora berjalan dengan baik karena setiap

bulan kita memberikan laporan tentang kondisi sekolah. Kerjasama dengan DUDI selama ini masih dalam taraf praktik kerja lapangan, belum ke tahap penerimaan pegawai, namun sudah ada beberapa yang mau menerima, bahkan pernah kita kekurangan siswa untuk ditempatkan setelah lulus, karena semuanya sudah mendapat tawaran. Baru sebagian DUDI yang menerima lulusan dari YPKK.

Partisipasi dan dukungan dana dari walimurid masih menemui kendala. Saat rapat dengan stakeholder, banyak yang terlibat aktif dalam rapat, komite juga aktif memberi saran, kita juga meminta pertimbangan. *Stakeholders* percaya bahwa sekolah ini bersih dan berwibawa karena *stakeholders* sendiri yang merasakan bahwa kami tidak pernah berbuat yang tidak wajar. *Stakeholders* peduli dengan sekolah, buktinya mereka terlibat dalam setiap kegiatan jika sekolah mengundang mereka maupun mereka datang dengan inisiatif sendiri. Saran dan masukan dari *stakeholders* sangat membangun, dan akan ditindaklanjuti oleh pihak sekolah. *Stakeholders* peduli dengan sekolah, misalnya pemerintah membantu sekolah menyediakan dana dalam bentuk BOS, bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin rehabilitasi sekolah, bantuan gedung dan lain-lain. Keputusan sekolah diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Namun untuk hal yang sederhana seperti rapat guru, penentuan jadwal piket, terkadang hanya beberapa saja yang terlibat.

Masyarakat percaya bahwa sekolah sudah terbuka, kami menyampaikan apa adanya terkait dengan data keuangan maupun informasi program sekolah. Kami menyampaikan keterbukaan baik informasi maupun keuangan program melalui rapat, papan pengumuman dan pengumuman langsung melalui siswa. Peningkatan partisipasi meningkat dapat dilihat dari semakin majunya sekolah baik dari fasilitas pembelajaran maupun prestasi siswa yang menjuarai perlombaan, namun seperti biasa partisipasi dari dukungan dana terkadang masih belum maksimal. Publik sekolah mengetahui program sekolah karena terlibat langsung dalam kegiatan sekolah, misalnya melalui program khitanan massal, bakti sosial dan sebagainya. Di sekolah ini tidak pernah terdapat kasus seperti KKN dan sejenisnya, semuanya apa adanya,

Publik sudah puas karena lulusan ypkk setelah lulus mayoritas langsung mendapatkan pekerjaan. Kesadaran public untuk menilai baik,hal ini dapat ditunjukkan dengan aktifnya saat rapat dan diskusinya hidup. Di sini belum pernah terdapat kasus KKN, suap, maupun hal menyimpang lainnya. Kegiatan sekolah sudah sesuai dengan nilai dan norma misalnya kami berusaha meningkatkan nilai keagamaan melalui kegiatan sholat dhuha. Khitanan massal dan bakti social karena kita peduli dengan masyarakat.

Publik puas dengan sekolah ini, karena sering orangtua yang dulu alumni sekolah ini mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di ypkk 2. Hal itu menunjukkan bahwa mereka puas dengan pendidikan disekolah ini. Publik berani menilai tentang sekolah, saat rapat dengan sekolah mereka berani mengkritik maupun memberikan saran kepada sekolah.di sini belum pernah terdapat kasus KKN. Kami memiliki program yang sesuai dengan nilai dan norma, misalnya adalah bakti social, qurban, khitanan masal dsb.

Nama Responden : Drs. Purwadi
Jabatan Responden : Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
Tempat Wawancara :Depan ruang guru SMK YPKK 2 Sleman
Tanggal Wawancara : Senin, 14 Mei 2018
Waktu Wawancara : 09.00 – 9.40

SDM di SMK YPKK 2 Sleman sudah memenuhi untuk kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, Guru, belum semua guru bersertifikasi. Untuk sarana dan prasarana KBM sudah berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang utama adalah keterbatasan lahan, kami kekurangan lahan parkir dan lapangan olahraga. Jika dilihat dari pendanaan, siswa yang bersekolah di sini, kebanyakan orang tuanya menengah kebawah, jadi mungkin kami sulit mencari dana saat kekurangan, karena sumber penerimaan mayoritas dari wali murid. Kinerja guru dan tenaga kependidikan sudah baik. Karena selain pendidikan, dari segi administrasi belum sepenuhnya. Pengelolaan sarana dan prasarana, terkadang masih belum maksimal karena kurangnya teknisi dari dalam sekolah sehingga menggunakan tenaga dari luar sekolah. Kurikulum yang digunakan di SMK YPKK 2 Sleman mengikuti aturan yang diterapkan pemerintah yaitu K13. Sekolah ini termasuk yang lebih cepat menyesuaikan kurikulum, karena sudah sampai kelas 12 yang menerapkan K13. Pengelolaan pembiayaan sekolah sangat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disini tidak ada penyalahgunaan uang, apa adanya, kemudian bahkan bisa menyisihkan anggaran berjalan dan bisa menghemat, sehingga saat ada kebutuhan mendadak bisa terpenuhi. Hubungan sekolah dan masyarakat sangat baik, karena kegiatan sekolah selalu melibatkan masyarakat, misalnya khitanan massal, bakti social, tidak hanya dari masyarakat yang dekat saja, tetapi juga masyarakat yang jauh, manajemen layanan khusus baru dalam keadaan baik karena YPKK terbatas tempat, kepemimpinan kepala sekolah, secara social dan kemanusiaan bagus, tapi untuk manajemen secara mutu masih perlu ada peningkatan, contoh rapat dinas masih terlalu minim, teguran yang seharusnya keras masih belum berani, ya YPKK ini bisa seperti sekarang bukan hanya karena kepala sekolah, tetapi karena *teamwork* yang ada,

Administrasi guru disusun secara tertib menyusun administrasinya. Sekolah ini sangat berdiri, karena swasta, dan setiap tahun bisa menyisihkan dari anggaran berjalan, sumber pendanaannya tidak dari pemerintah tapi dari masyarakat, kegiatan sekolah. Kerjasama internal sudah berjalan dengan baik, terbukti saat ada permasalahan saling berbagi, kerjasama sekolah dengan pemerintah sudah berjalan dengan baik, contohnya adalah kerjasama dengan Disnake, kami mendapatkan sekolah penyalur tenaga kerja terbaik, kedua, saat PKL kami kekurangan siswa. Dengan DUDI kerjasama baik sekali, bahkan kami kekurangan anak untuk ditempatkan PKL disana, termasuk rekrutmen bukan anak-anak yang melamar mereka, tetapi mereka yang melamar ke kami.

Kontribusi *Stakeholders*, yang jelas untuk wali murid berperan utama dari segi pendanaan, Dari segi dana beberapa wali murid menghambat dalam membayar biaya sekolah namun tidak mencapai 50%. *Stakeholders* percaya bahwa sekolah ini bersih dan berwibawa karena selama ini tidak terdapat protes kepada pihak sekolah. Saran dari *stakeholders* sangat bermanfaat, dan akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. *Stakeholders* peduli dengan sekolah, misalnya pemerintah membantu sekolah menyediakan dana dalam bentuk bantuan beasiswa maupun fasilitas pembelajaran. Keputusan sekolah mayoritas diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Public percaya bahwa sekolah sudah terbuka, kami tidak pernah menyembunyikan laporan atau rahasia. Kami menyampaikan keterbukaan baik informasi maupun keuangan program melalui rapat, papan pengumuman dan pengumuman langsung melalui siswa. baik keuangan maupun melalui Peningkatan partisipasi meningkat dapat dilihat dari semakin majunya sekolah baik dari fasilitas pembelajaran maupun prestasi siswa, namun seperti biasa partisipasi dari dukungan dana terkadang masih belum maksimal. Publik sekolah mengetahui program sekolah karena terlibat langsung dalam kegiatan sekolah, misalnya melalui program khitanan massal, bakti social dan sebagainya. Di sekolah ini Alhamdulillah belum pernah terjadi penyimpangan yang sampai melanggar aturan undang-undang.

Publik sudah puas karena lulusan ypkk setelah lulus mayoritas langsung mendapatkan pekerjaan. Kesadaran public untuk menilai baik,hal ini dapat ditunjukkan dengan aktifnya saat rapat dan diskusinya hidup. Di sini belum pernah terdapat kasus KKN, suap, maupun hal menyimpang lainnya. Kegiatan sekolah sudah sesuai dengan nilai dan norma misalnya kami berusaha meningkatkan nilai keagamaan melalui kegiatan sholat dhuha. Khitanan massal dan bakti social karena kita peduli dengan masyarakat.

Nama Responden : Dra. Eny Pujianingsih
Jabatan Responden : Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan
Tempat Wawancara : Lobi SMK Negeri 1 Tempel
Tanggal Wawancara : Senin, 14 Mei 2018
Waktu Wawancara : 09.00 – 9.40

Kesanggupan pemenuhan kebutuhan dilihat dari sumber daya manusia terdapat kekurangan dilihat dari kuantitasnya, ntuk tenaga kependidikan, khususnya kegiatan administrasi yang lumayan banyak, ada beberapa yang akan pensiun, namun masi belum ada penambahan tenaga kependidikan. Tapi kalau dari sisi kualifikasi inshaallah sudah sesuai bagian dapodik, bagian perpustakaan bagian maintenance dan sebagainya. Dari sisi sarana inshaallah sudah diatas standar minimal, dari segi kualitas masih perlu ada peningkatan. Dari pembiayaan, disatu sisi sudah cukup lumayan banyak, namun anggaran pemerintah sudah diplotkan untuk setiap kegiatan, padahal ada kegiatan yang tidak bisa didanai dari anggaran yang diberikan pemerintah, otomatis harus mencari sumber dana yang lain, dalam hal ini orang tua siswa. Kinerja guru sudah lumayan bagus, jam kerjanya sudah taat aturan, walaupun misalnya guru itu ada tugas diluar atau keterpaksaan tidak bisa berangkat kerja, selalu ada pemberitahuan, ada tugas tugas yang diberikan kepada siswa, sehingga jarang terjadi jam kosong, sedangkan kinerja tenaga kependidikan juga bagus, mereka telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kurikulum yang digunakan di SMK Negeri 1 Tempel ada 3 macam, yang baru lulus kemarin kurikulum 2006, kelas sebelas kurikulum 2013, dan kelas sepuluh kurikulum 2013 revisi. Untuk manajemen layanan khusus seperti UKS, koperasi, dan lain-lain suda berjalan dengan baik, dimana siswa juga berpartisipasi dalam mengelola. Di SMK Negeri 1 Tempel sudah terkondisi bagus untuk SDM nya dan ini sudah sejak tahun 2000, ada peningkatan kinerja yang signifikan dari kepala sekolah, jadi untuk kepala sekolah yang sekarang istilahnya tinggal menerima kinerja yang kemarin. Kalau disatu sisi manajemennya sudah lumayan dengan catatan ada beberapa yang kurang konsisten terkait dengan peraturan. Dari sisi kerjasama sudah lumayan. Tapi secara umum sudah bagus. Guru sudah tertib dalam kegiatan administrasinya dengan membuat silabus, RPP, dan sebagainya, dengan tertib walaupun kadang ada yang terlambat. Tenaga

kependidikan telah menyusun kegiatannya dengan baik. Kerjasama internal sekolah cukup bagus, Alhamdulillah sekolah memiliki forum silaturahmi jurusan, kelas, guru, kegiatan kesiswaan (OSIS), mantan pamong. Kerjasama eksternal dengan pemerintah berjalan dengan baik, misalnya dengan pemerintah misalnya puskesmas sangat mendukung sekolah sehat, dia selalu memberikan bimbingan, pembinaan, dan sebagainya, termasuk saat ada kegiatan, saling mengundang, kemudian pihak Polsek Camat Koramil, Alhamdulillah cukup tinggi bahkan untuk Koramil membantu siswa dalam kegiatan tontu, terus Patroli Keamanan Sekolah dibawah asuhan Polsek, dst. Dengan DUDI pada tahun 2013 sudah menjalankan MoU dengan 48 DUDI yang digunakan untuk Prakerin, field study, assessor, bahkan penyaluran tenaga kerja juga ada, dan beberapa perguruan tinggi atau lembaga setelah selesai, kemarin saya baru saja menerima permintaan dari UII tenaga sekretaris dan keuangan. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat pada kualitas alumni juga cukup bagus, bahkan assessor sejak 1996 saat ujian akhir semester untuk materi kejuruan yang menguji adalah pihak dari luar (DUDI), asosiasi profesi, akademisi. Kontribusi Stakeholders dari dukungan dana masih kurang karena siswa berasal dari masyarakat menengah ke bawah, walaupun telah terjadi kesepakatan di awal tahun ajaran baru saat dilakukan sosialisasi, ditengah perjalanan kadang diingatkan. Dalam rapat dengan stakeholders, dengan komite cukup proaktif memberikan saran. Masyarakat percaya dengan sekolah, karena sekolah bersifat terbuka, Kepala Sekolah punya kewajiban membuat anggaran, tetapi dalam pelaksanaannya juga ada masukan, kemudian saat pertemuan dengan orang tua siswa juga disampaikan, termasuk saat memiliki kendala misalnya semester sebelumnya yaitu masih sekian juta dana dari wali murid yang belum masuk, akhirnya kami saat membayar GTT pun masih belum mencukupi, akhirnya saat pertemuan dengan wali murid dikomunikasikan, dan Alhamdulillah saat pengembalian rapot lumayan banyak yang masuk, Kepedulian Stakeholders secara umum sudah cukup bagus, begitu pula kepedulian dengan siswa juga lumayan bagus. Keputusan sekolah dibuat sesuai dengan SOP dan berjenjang, misalnya kepala sekolah akan membuat aturan tata tertib siswa, keputusan diambil setelah dilakukan dengan berbagai pihak, yaitu pengurus OSIS, MPK, WKS Kesiswaan, kemudian diajukan pada kepala sekolah. Pengambilan Keputusan dilakukan dengan melihat kontennya apa, permasalahannya apa, dan nantinya keputusan

tersebut untuk siapa, tidak semua keputusan harus berjenjang, kalau yang berjenjang itu yang sifatnya universal.

Stakeholders sudah yakin bahwa sekolah telah terbuka dan transparan, karena dari segi dana sekolah telah terbuka kepada public, kalau informasi secara umum sekolah telah menyampaikan informasi. Public terlibat dalam kegiatan sekolah misalnya saat kegiatan Qurban maupun saat Ramadhan. Program-program tersebut membuat wawasan dan pengetahuan public meningkat. Belum terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Public percaya dan puas dalam akuntabilitas yang diberikan sekolah. Kesadaran public untuk menilai cukup bagus biasanya public kurang memahami suatu hal saat pertemuan, kemudian mengutarakan pendapatnya, dan sekolah berusaha menjelaskan. Belum ditemukan kasus KKN, misalnya saat rekrutmen pegawai, sekolah telah menjalankannya sesuai dengan SOP. Kegiatan sekolah sesuai dengan nilai dan norma. Sekolah mengadakan bakti social melalui OSIS misalnya saat ukang tahun sekolahan, idul qurban, penggalangan dana social.

Nama Responden : Dra. Ratna Wiwara
Jabatan Responden : Wakil Kepala Sekolah Kurikulum
Tempat Wawancara : Lobi SMK Negeri 1 Tempel
Tanggal Wawancara : Senin, 27 Mei 2018
Waktu Wawancara : 08.00 – 08.30

SDM di SMKN 1 Tempel secara keseluruhan jumlahnya sudah memenuhi baik dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Guru yang mengajar sudah sesuai kualifikasi, semua sudah S1 hanya satu yang masih D3. Untuk tenaga tata usaha juga sudah sesuai dengan kualifikasinya hanya ada beberapa yang akan pensiun dan perlu pengganti. Dari sisi sarana sudah sesuai dengan sarana yang diterapkan pemerintah, namun masih ada beberapa kelas yang memerlukan fasilitas LCD. Dari sisi pendanaan, kami mayoritas pendanaan berasal dari pemerintah, dimana dana tersebut sudah cukup untuk menyelenggarakan kegiatan, jika dana masih kurang kami mencoba mencari sumber dana lain yaitu dari siswa itu sendiri. Kinerja guru di sekolah ini sudah bagus dimana lebih dari separuh sudah memiliki sertifikat profesi. Sedangkan untuk tenaga tata usaha juga sudah baik, mereka menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kurikulum yang digunakan kami menggunakan 3 kurikulum mulai dari KTSP, K13, dan K13 revisi. Untuk layanan khusus seperti UKS dan Business Center sudah dikelola dengan baik. Kepala sekolah sudah mampu memimpin dengan disiplin dan bisa bekerjasama dengan seluruh warga sekolah. Guru sudah membuat administrasi pembelajaran seperti silabus, RPP dsb. Tenaga kependidikan juga sudah menyusun kegiatan administrasi sesuai tugasnya.

Kerjasama guru dan guru sudah terjalin dengan baik kerjasama guru dengan siswa juga baik, siswa memiliki kesadaran belajar yang baik. Kerjasama guru dengan tenaga tata usaha juga bagus dan bisa saling berkoordinasi. Kerjasama sekolah dengan pihak eksternal juga bagus, pemerintah memberikan dana yang cukup, DUDI menjalankan tugasnya dlm merekrut siswa saat prakerin, uji kompetensi maupun penyerapan tenaga kerja. Kerjasama dengan masyarakat juga bagus, kami menyelenggarakan kegiatan yang juga melibatkan masyarakat.

Kontribusi Stakeholders dari dukungan dana terkadang masih mengalami kendala, siswa belum bisa melunasi biaya sekolah pada waktu yang ditentukan. Saat rapat dengan stakeholders kami sering menerima saran dari mereka. Stakeholders percaya dengan sekolah karena selama ini sekolah bersifat terbuka dan selalu menyampaikan apa adanya terutama dari sisi keuangan. Saat rapat dengan stakeholders, mereka memberikan saran. Masyarakat percaya dengan sekolah, karena selama ini tidak terdapat pengaduan tentang hal yang kurang baik kepada sekolah. Stakeholders peduli dengan kegiatan sekolah, karena stakeholders sering terlibat dalam setiap kegiatan sekolah. Keputusan sekolah dibuat sesuai dengan kondisi dari konteks permasalahan yang dibahas misalnya keputusan terkait aturan sekolah, akan dibahas bersama dengan seluruh warga sekolah. mayoritas keputusan dibuat berdasarkan musyawarah mufakat, dan tidak ada keputusan yang dibuat sepihak.

Stakeholders percaya bahwa sekolah transparan, baik dari segi dana maupun informasi. Sekolah menyampaikan keterbukaan kepada publik melalui papan informasi, rapat, website sekolah maupun media lainnya. Public terlibat dalam kegiatan sekolah misalnya saat kegiatan Qurban maupun saat Ramadhan. Program-program tersebut membuat wawasan dan pengetahuan public meningkat. Selama ini, belum terdapat pelanggaran terhadap peaturan perundang-undangan.

Public percaya dan puas dalam akuntabilitas yang diberikan sekolah. Kesadaran public untuk menilai cukup bagus biasanya public kurang memahami suatu hal saat pertemuan, kemudian mengutarakan pendapatnya, dan sekolah berusaha menjelaskan. Belum ditemukan kasus KKN, misalnya saat rekrutmen pegawai, sekolah telah menjalankannya sesuai dengan prosedur. Kegiatan sekolah sesuai dengan nilai dan norma. Sekolah mengadakan bakti social misalnya saat ulang tahun sekolah, idul qurban, penggalangan dana social.

LAMPIRAN 6

SURAT – SURAT PENELITIAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3724/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga DIY

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 877/UN34.18/PP.07.02/2018
Tanggal : 26 Maret 2018
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK NEGERI 1 TEMPEL DAN SMK YPKK 2 SLEMAN"** kepada:

Nama : BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
NIM : 14803241075
No.HP/Identitas : 082218297923/3404013105960003
Prodi/Jurusan : Pendidikan Akuntansi / Pendidikan Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Lokasi Penelitian : SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman
Waktu Penelitian : 9 April 2018 s.d 31 Mei 2018

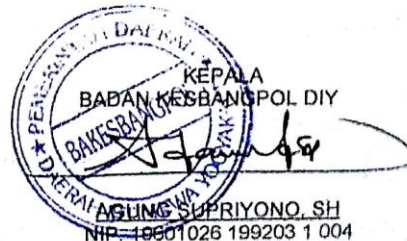
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat/rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 541322, Fax. 541322
web : www.dikpora.jogjaprov.go.id, email : dikpora@jogjaprov.go.id, Kode Pos 55166

Yogyakarta, 28 Maret 2018

Nomor : 070/3522
Lamp : -
Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
1. Kepala SMK Negeri 1 Tempel
2. Kepala SMK YPKK 2 Sleman

Dengan hormat, memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 074/3724/Kesbangpol/2018 tanggal 26 Maret 2018 perihal Rekomendasi Penelitian, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY memberikan ijin rekomendasi penelitian kepada:

Nama : Bonyfasius Anggada Putra
NIM : 14803241075
Prodi/Jurusan : Pendidikan Akuntansi/ Pendidikan Akuntansi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI
SMK NEGERI 1 TEMPEL DAN SMK YPKK 2 SLEMAN
Lokasi : SMK Negeri 1 Tempel dan SMK YPKK 2 Sleman
Waktu : 9 April 2018 s.d 31 Mei 2018

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi penelitian.
2. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami menyampaikan terimakasih.

a.n Kepala
Plt. Kepala Bidang Perencanaan dan Standarisasi



Didik Wardaya, SE., M.Pd.
NIP 19660530 198602 1 002

Tembusan Yth :
1. Kepala Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Bidang Dikmenti Dikpora DIY



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMK NEGERI 1 TEMPEL

Jalan Magelang Km 17 , Jlegongan, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta, 55552

Telepon (0274) 869-068, Faksimile (0274) 869-068

Website : www.smkn1tempel.sch.id , E-mail: smkn1tempel@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.4/763

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

- a. n a m a : Dra. NUNING SULASTRI, M.M.
- b. NIP : 19610828 198803 2 010
- c. Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
- d. jabatan : Kepala Sekolah

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. n a m a : **BONYFASIUS ANGGADA PUTRA**
- b. NIM : 14803241075
- c. Prodi / Program : Pendidikan Akuntansi – S1
- d. Instansi : Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta
- e. Benar - benar : Telah melakukan pengambilan data dalam rangka penelitian dengan judul " IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK YPKK 2 SLEMAN DAN SMK NEGERI 1 TEMPEL "

Pengambilan data penelitian sudah dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Rabu, 16 s.d. 30 Mei 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempel, 08 Juni 2018

Kepala SMK Negeri 1 Tempel. *[Signature]*



Dra. NUNING SULASTRI, M.M.

NIP 19610828 198803 2 010



YAYASAN PENDIDIKAN KETURUNAN DAN KETRAMPILAN
SMK YPKK 2 SLEMAN

BIDANG KEAHLIAN BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM KEAHLIAN 1. AKADEMIK KEAHLIAN 2. BISNIS DAN PEMASARAN
KOMPETENSI KEAHLIAN 1. AKADEMIK DAN KEAHLIAN LEBIH BAGA, 2. BISNIS DAN PEMASARAN
TERAKREDITASI : A

Alamat : Jalan Pemuda, Wadon, Dukuh Sleman Sleman DIY, Telp. (0274) 868394, Kode Pos 55511
Email: smkypkksleman2@gmail.com Website : www.smkypkk2sleman.sch.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 267/1/VI/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. IRCHAM ROSYIDI
NIP : -
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Kepala Sekolah SMK YPKK 2 Sleman

Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah :

Nama : BONYFASIUS ANGGADA PUTRA
NIM : 14803241075
Program Studi : Pendidikan Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian di *SMK YPKK 2 Sleman* dari tanggal 9 April 2018 s.d 31 Mei 2018 guna memenuhi Tugas Akhir dengan judul " *IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH DI SMK NEGERI 1 TEMPEL DAN SMK YPKK 2 SLEMAN*"

Demikian surat keterangan ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, kemudian kepada yang berkepentingan harap menjadi periksa adanya.

Sleman, 7 Juni 2018

Kepala Sekolah



IRCHAM ROSYIDI